



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG

Jl. Terusan Ryacudu 1 Jati Agung, Lampung Selatan 35365

Lampung Selatan, 20 Februari 2024

Nomor : B/435 /II/REN.2.3./2024

Klasifikasi: Biasa

Lampiran : Satu Buku

Hal : Mengirimkan Laporan Kinerja
Polda Lampung T.A. 2023.

Kepada

Yth. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

di

Jakarta

u. p. Asrena Kapolri

1. Rujukan :
 - a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tanggal 24 Juli 2015, tentang Perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Polri;
 - b. surat Asisten Bidang Perencanaan Umum Dan Anggaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/1357/XII/Srena tanggal 12 Desember 2023 tentang penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023;
 - c. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor: Kep/146/II/2023 tanggal, 15 Februari 2023 tentang Rencana Strategis Kepolisian Daerah Lampung 2020-2024 (Perubahan);
 - d. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor: Kep/392/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 tentang Rencana Kerja Kepolisian Daerah Lampung T.A. 2024.
2. Sehubungan dengan hal di atas, bersama ini disampaikan kepada Jenderal Laporan Kinerja Polda Lampung Tahun Anggaran 2023 (terlampir).
3. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

Tembusan :

1. Kapolri.
2. Irwasum Polri.
3. Distribusi A, B dan C Polda Lampung.





LAPORAN

KINERJA 2023

POLDA LAMPUNG

Lampung Selatan, 20 Februari 2024



LAPORAN

KINERJA 2023

POLDA LAMPUNG

Lampung Selatan, 20 Februari 2024

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
UNIT KERJA POLDA LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**

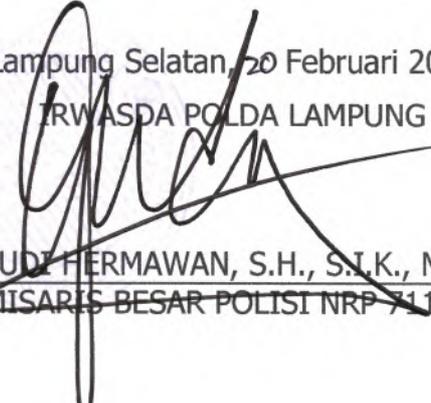
Kami telah mereviu laporan kinerja unit kerja **Polda Lampung** untuk tahun anggaran 2023 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Polri.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Lampung Selatan, 20 Februari 2024

TRWASDA POLDA LAMPUNG


YUDI HERMAWAN, S.H., S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71120261

DAFTAR ISI

	HAL
PERNYATAAN TELAH DIREVIU OLEH ITWASDA POLDA LAMPUNG	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Umum	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
1. Tugas	3
2. Fungsi	4
3. Struktur Organisasi	5
C. Peran Strategis	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Visi	9
B. Misi	9
C. Tujuan	10
D. Sasaran Prioritas	10
E. Sasaran Strategis	11
F. Penetapan Kinerja Polda Lampung T.A. 2023	13
G. Anggaran DIPA T.A. 2023	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Polda Lampung	16
B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	17
0. Sasaran Strategis <i>Impack</i>	17
1. Sasaran Strategis Pertama	25
2. Sasaran Strategis Kedua	32
3. Sasaran Strategis Ketiga	37
4. Sasaran Strategis Keempat	40
5. Sasaran Strategis Kelima	51
C. Realisasi Anggaran	76
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	87

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Polda Lampung T.A. 2023.
2. Kep Kapolda Lampung Nomor : Kep/145/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 perihal penetapan IKU di lingkungan Polda Lampung 2020-2024 (perubahan).
3. Penghargaan yang diperoleh Satker Polda Lampung T.A. 20223

DAFTAR TABEL

NO	JUDUL	HAL
1.	Perjanjian Kinerja Polda Lampung T.A. 2023	13
2.	Dashboard Nilai NPSS Polda Lampung Tahun 2023	16
3.	NPSS Polda Lampung Tahun 2019-2023	16
4.	Capaian Kinerja Polda Lampung T.A. 2023	17
5.	Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKU indeks keamanan dan ketertiban	18
6.	Indikator IDI Provinsi Lampung, 2022	21
7.	Ranking skor IDI Sumatera, 2022	21
8.	Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKU indeks pemeliharaan kamtibmas yang partisipatif	26
9.	Tren vitalitas kecelakaan lalu lintas 2022-2023	28
10.	Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKU indeks penegakkan hukum	32
11.	Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP Indeks profesionalitas personel	37
12.	Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKU indeks dukungan sarpras dan peralatan	41
13.	Perkembangan penambahan gedung/rumdin/bangunan	42
14.	Perkembangan penambahan alat angkut, 2023	43
15.	Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	44
16.	Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan	47
17.	Data mentah penyusun nilai performa satker pada media dan media sosial (31/12, 2023)	50
18.	Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP indeks penguatan implementasi kebijakan	52
19.	Kegiatan penguatan kapabilitas dan kapasitas organisasi, 2023	55
20.	<i>Timeline</i> kegiatan penilaian mandiri ITK	56
21.	Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP Indeks Tatakelola Kepolisian TAB 2023	57
22.	Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKU indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi kepolisian	59
23.	Hasil kajian IKM Polda Lampung T.A. 2023	61
24.	Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP persentase penanganan pengaduan masyarakat	61
25.	Perkembangan jumlah dumas dan empat tahun terakhir	63
26.	Data dumas TAB 2023	64
27.	Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP persentase Persentase penyelesaian pelanggaran personel	65
28.	Perbandingan kuantitas pelanggaran personel pada empat tahun terakhir	68

NO	JUDUL	HAL
29.	Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP Persentase penyelesaian masalah hukum	69
30.	Data jumlah masalah hukum pada satker yang terjadi TAB 2023	71
31.	Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja IKP Nilai Kinerja Anggaran	72
32.	Perbandingan nilai kinerja anggaran empat tahun terakhir	74
33.	Perbandingan pagu dan realisasi anggaran Polda Lampung 2020-2023	76
34.	Program anggaran Polda Lampung T.A. 2023	77
35.	Realisasi anggaran persatker Polda Lampung T.A. 2023	79
36.	Hasil penguatan kelembagaan, 2023	82
37.	Capaian Sasaran Strategis Polda Lampung, 2023	85
38.	Capaian IKU dan IKP Polda Lampung, 2023	85

DAFTAR GAMBAR

NO	JUDUL	HAL
1.	Struktur Organisasi Polda Lampung	5
2.	Perbandingan DSP dan Riil Satker unsur pengawas/pelayan	6
3.	Perbandingan DSP dan Riil Satker unsur Pelaksana tugas pokok	6
4.	Perbandingan DSP dan Riil Satker unsur pendukung	7
5.	Perbandingan DSP dan Riil pada Satuan Polresta dan Polres	7
6.	Peta Strategi Polda Lampung tahun 2020-2024	11
7.	Dinamika indeks kamtibmas empat tahun terakhir	19
8.	Sebaran Indeks keamanan dan ketertiban masyarakat, 2023	19
9.	Dinamika indeks kamtibmas pada 15 Polres	20
10.	Pertumbuhan ekonomi Lampung, 2023	22
11.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 2023	22
12.	Perkembangan IPM, 2023	22
13.	Skor IPM pada kabupaten-kota, 2023	23
14.	Skor Gini Ratio kabupaten-Kota, 2023	23
15.	Kemiskinan Provinsi Lampung, 2023	24
16.	Jumlah penduduk miskin kabupten-kota, 2023 (dlm ribu)	24
17.	Sebaran indeks kamtibmas, 2023	25
18.	Dinamika indeks harkamtibmas empat tahun terakhir	26
19.	Perkembangan kontribusi 8 komponen kinerja indeks harkamtibmas dalam tiga tahun terakhir.....	27
20.	Sebaran kinerja indeks harkamtibmas pada daerah hukum Polda Lampung T.A. 2023	29
21.	Dinamika Indeks harkamtibmas pada 15 Polres	30
22.	Lensa kegiatan suport program pemerintah, 2023	30
23.	Konsepsi LFA pengentasan kemiskinan ekstrim Polda Lampung	31
24.	Dinamika indeks penegakan hukum empat tahun terakhir	33
25.	Perkembangan kontribusi 6 komponen kinerja indeks gakkum dalam tiga tahun terakhir	33
26.	Dinamika kasus menonjol empat tahun terakhir.....	34
27.	Dinamika kasus penyalahgunaan narkoba empat tahun terakhir	34
28.	Dinamika penanganan kasus laka lantas, 2023	35
29.	Sebaran kinerja indeks penegakan hukum, 2023	35
30.	Dinamika Indeks penegakan hukum pada 54 Polres, 2023	36
31.	Dinamika indeks profesionalitas personel dalam empat tahun terakhir	38
32.	perkembangan kontribusi 5 komponen kinerja indeks profesiosnalitas personel dalam empat tahun terakhir	39
33.	Perkembangan alokasi peserta pelatihan dan dikbangspes dalam tiga tahun	39
34.	Dinamika indeks dukungan sarpras dan peralatan empat tahun terakhir	41

NO	JUDUL	HAL
35.	Perkembangan kontribusi 4 komponen kinerja indeks dukungan sarpras dan peraltan dalam 4 tahun terakhir	42
36.	Dinamika indeks SPBE Polda Lampung dalam empat tahun terakhir	45
37.	Hasil evaluasi SPBE mandiri satker unsur pengawas dan pembantu pimpinan	45
38.	Hasil evaluasi mandiri SPBE satker unsur pelaksana tugas pokok	45
39.	Hasil evaluasi mandiri SPBE Polres, 2023	46
40.	Dinamika nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan empat tahun terakhir	47
41.	Kontribusi kinerja komponen nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan	48
42.	Data nilai performa satker pada media dan medsos (31/12, 2023)	51
43.	Dinamika kinerja indeks penguatan implemenasi kebijakan dalam empat tahun terakhir	53
44.	Perkembangan kontribusi 2 komponen kinerja indeks penguatan implementasi kebijakan	53
45.	Kontribusi kinerja subkomponen nilai penguatan kapabilitas organisasi empat tahun terakhir	54
46.	Kontribusi kinerja subkomponen nilai penguatan kapasitas organisasi tiga tahun terakhir.	55
47.	tujuh prinsip dalam penilaian ITK	56
48.	Dinamika skor ITK pada 12 Polres Polda Lampung tiga tahun terakhir	58
49.	Dinamika kinerja komponen indeks kepuasan layanan kepolisian dalam empat tahun terakhir	60
50.	Dinamika kontribusi satker pada Indeks kepuasan layanan kepolisian empat tahun terakhir	60
51.	Dinamika kinerja persentase penanganan dumsan dalam empat tahun terakhir	62
52.	Perbandingan kinerja penanganan dumsan empat tahun terakhir	63
53.	Daerah hukum Polda yang terdapat dumsan, 2023	64
54.	Dinamika kinerja persentase penyelesaian pelanggaran personel empat tahun terakhir	66
55.	Perkembangan kontribusi 2 komponen kinerja penyelesaian pelanggaran personil dalam empat tahun terakhir	66
56.	Dinamika kinerja penyelesaian pelanggaran personel pada 15 Polres T.A. 2023	67
57.	Perbandingan kuantitas pelanggaran dan penyelesaian pelanggaran personel empat tahun terakhir	67
58.	Dinamika kinerja persentase penyelesaian pelanggaran personel empat tahun terakhir	69
59.	Perkembangan kontribusi 3 komponen kinerja penyelesaian masalah hukum dalam empat tahun terakhir	70
60.	Perkembangan jumlah gugatan peradilan selama tiga tahun terkahir	70
61.	Daerah hukum Polda yang terdapat masalah hukum, 2023	71

NO	JUDUL	HAL
62.	Perbandingan nilai kinerja anggaran Polda Lampung periode 2020-2023.	73
63.	Sebaran kontribusi NKA satker Mapolda	75
64.	Sebaran kontribusi NKA Polres	75
65.	Dinamika persentase penyerapan anggaran per-jenis belanja T.A. 2023	76
66.	Dinamika persentase penyerapan program anggaran T.A. 2023	77
67.	Perkembangan alokasi peserta pelatihan dan dikbangspes dalam empat tahun terakhir	86
68.	Komponen kinerja indek profesinalitas personel, 2023	86

DAFTAR GAMBAR

NO	JUDUL	HAL
1.	Struktur Organisasi Polda Lampung	5
2.	Perbandingan DSP dan Riil Satker unsur pengawas/pelayan	6
3.	Perbandingan DSP dan Riil Satker unsur Pelaksana tugas pokok	6
4.	Perbandingan DSP dan Riil Satker unsur pendukung	7
5.	Perbandingan DSP dan Riil pada Satuan Polresta dan Polres	8
6.	Peta Strategi Polda Lampung tahun 2020-2024	11
7.	Dinamika indeks kamtibmas empat tahun terakhir	19
8.	Sebaran Indeks keamanan dan ketertiban masyarakat, 2023	19
9.	Dinamika indeks kamtibmas pada 15 Polres	20
10.	Pertumbuhan ekonomi Lampung, 2023	22
11.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 2023	22
12.	Perkembangan IPM, 2023	22
13.	Skor IPM pada kabupaten-kota, 2023	23
14.	Skor Gini Ratio kabupaten-Kota, 2023	23
15.	Kemiskinan Provinsi Lampung, 2023	24
16.	Jumlah penduduk miskin kabupten-kota, 2023 (dlm ribu)	24
17.	Sebaran indeks kamtibmas, 2023	25
18.	Dinamika indeks harkamtibmas empat tahun terakhir	26
19.	Perkembangan kontribusi 8 komponen kinerja indeks harkamtibmas dalam tiga tahun terakhir.....	27
20.	Sebaran kinerja indeks harkamtibmas pada daerah hukum Polda Lampung T.A. 2023	29
21.	Dinamika Indeks harkamtibmas pada 15 Polres	30
22.	Lensa kegiatan suport program pemerintah, 2023	30
23.	Konsepsi LFA pengentasan kemiskinan ekstrim Polda Lampung	31
24.	Dinamika indeks penegakan hukum empat tahun terakhir	32
25.	Perkembangan kontribusi 6 komponen kinerja indeks gakkum dalam tiga tahun terakhir	33
26.	Dinamika kasus menonjol empat tahun terakhir.....	34
27.	Dinamika kasus penyalahgunaan narkoba empat tahun terakhir	34
28.	Dinamika penanganan kasus laka lantas, 2023	35
29.	Sebaran kinerja indeks penegakan hukum, 2023	35
30.	Dinamika Indeks penegakan hukum pada 54 Polres, 2023	36
31.	Dinamika indeks profesionalitas personel dalam empat tahun terakhir	38
32.	perkembangan kontribusi 5 komponen kinerja indeks profesiosnalitas personel dalam empat tahun terakhir	39
33.	Perkembangan alokasi peserta pelatihan dan dikbangspes dalam tiga tahun	39
34.	Dinamika indeks dukungan sarpras dan peralatan empat tahun terakhir	41

NO	JUDUL	HAL
35.	Dinamika indeks SPBE Polda Lampung dalam empat tahun terakhir	45
36.	Hasil evaluasi SPBE mandiri satker unsur pengawas dan pembantu pimpinan	45
37.	Hasil evaluasi mandiri SPBE satker unsur pelaksana tugas pokok	45
38.	Hasil evaluasi mandiri SPBE Polres, 2023	46
39.	Dinamika nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan empat tahun terakhir	47
40.	Kontribusi kinerja komponen nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan	48
41.	Data nilai performa satker pada media dan medsos (31/12, 2023)	52
42.	Dinamika kinerja indeks penguatan implemenasi kebijakan dalam empat tahun terakhir	53
43.	Perkembangan kontribusi 2 komponen kinerja indeks penguatan implementasi kebijakan	53
44.	Kontribusi kinerja subkomponen nilai penguatan kapabilitas organisasi empat tahun terakhir	54
45.	Kontribusi kinerja subkomponen nilai penguatan kapasitas organisasi tiga tahun terakhir.	55
46.	tujuh prinsip dalam penilaian ITK	56
47.	Dinamika skor ITK pada 12 Polres Polda Lampung tiga tahun terakhir	58
48.	Dinamika kinerja komponen indeks kepuasan layanan kepolisian dalam empat tahun terakhir	60
49.	Dinamika kontribusi satker pada Indeks kepuasan layanan kepolisian empat tahun terakhir	60
50.	Dinamika kinerja persentase penanganan dumsan dalam empat tahun terakhir	62
51.	Perbandingan kinerja penanganan dumsan empat tahun terakhir	63
52.	Daerah hukum Polda yang terdapat dumsan, 2023	65
53.	Dinamika kinerja persentase penyelesaian pelanggaran personel empat tahun terakhir	66
54.	Perkembangan kontribusi 2 komponen kinerja penyelesaian pelanggaran personil dalam empat tahun terakhir	66
55.	Dinamika kinerja penyelesaian pelanggaran personel pada 15 Polres T.A. 2023	67
56.	Perbandingan kuantitas pelanggaran dan penyelesaian pelanggaran personel empat tahun terakhir	68
57.	Dinamika kinerja persentase penyelesaian pelanggaran personel empat tahun terakhir	70
58.	Perkembangan kontribusi 3 komponen kinerja penyelesaian masalah hukum dalam empat tahun terakhir	70
59.	Perkembangan jumlah gugatan peradilan selama tiga tahun terakhir	71
60.	Daerah hukum Polda yang terdapat masalah hukum, 2023	71
61.	Perbandingan nilai kinerja anggaran Polda Lampung periode 2020-2023.	74
62.	Sebaran kontribusi AKN satker Mapolda	75

NO	JUDUL	HAL
63.	Sebaran kontribusi NKA Polres	75
64.	Dinamika persentase penyerapan anggaran per-jenis belanja T.A. 2023	76
65.	Dinamika persentase penyerapan program anggaran T.A. 2023	77
66.	Perkembangan alokasi peserta pelatihan dan dikbangspes dalam empat tahun terakhir	86
67.	Komponen kinerja indek profesinalitas personel, 2023	86



LAPORAN KINERJA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG T.A. 2023

I. Pendahuluan

A. Umum.

Kepolisian di negara Republik Indonesia memiliki posisi dan peran yang sangat strategis dalam memelihara situasi keamanan dan ketertiban. Saat ini institusi Polri memiliki satuan kewilayahan sebanyak tiga puluh empat kepolisian daerah (Polda). Oleh karena itu keberadaan Kepolisian Daerah Lampung, memegang peran penting dalam memelihara situasi keamanan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum di Provinsi Lampung. Hal ini tidak lepas dari eksistensi Polda Lampung yang secara umum mendukung target kinerja Polri setiap tahunnya. Oleh karena itu **Laporan Kinerja Polda Lampung**, menjadi salah satu bagian penting dari keberhasilan Polri dalam menjalankan rencana pembangunan nasional.

Tahun 2023 merupakan tahun ke-empat dari Renstra Polda Lampung Tahun 2020-2024, dan apabila melihat perkembangan lingkungan strategis, maka terdapat beberapa permasalahan yang sangat kompleks, terkait dengan berbagai pemangku kepentingan pada skala lokal kedaerahan dalam upaya memulihkan keadaan perekonomian yang akan mempengaruhi situasi keamanan secara nasional pasca pandemi *Covid19*, ditambah lagi dengan adanya upaya dari pihak-pihak yang mempunyai agenda untuk melakukan distorsi terhadap orientasi toleransi dan penetrasinya paham radikalisme dalam kehidupan masyarakat. Situasi ini dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain secara internal evaluasi terhadap tupoksi pada satuan setingkat Polres dan terutama sekali satuan setingkat Polsek yang belum selaras dengan sistem pemerintahan daerah, sehingga mengalami ketimpangan dalam mewujudkan pelayanan kepolisian, oleh karena itu tupoksi organisasi perlu adanya peninjauan kembali untuk melakukan penyesuaian, terutama dalam rumusan kebijakan strategis untuk mengubah pola pikir dan budaya organisasi yang berorientasi pada hasil. Oleh karena itu Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. telah mengeluarkan kebijakan **transformasi menuju Polri yang Presisi**, yang didalamnya terdapat empat transformasi, yaitu transformasi organisasi, transformasi operasional, transformasi pelayanan dan transformasi pengawasan, yang terus digali dan diimplementasikan dengan memanfaatkan saran TIK, terlebih menyangkut pelayanan administrasi kepolisian sebagai layanan dasar publik perlu terus diakselerasi dan direvitalisasi, terutama pada layanan SPKT, satpas SKCK, Satpas

SIM dan pelayanan bersama satu atap (Samsat), ditambah responsif terhadap kebijakan nasional menyangkut penanganan kemiskinan dan kondusivitas iklim investasi serta percepatan mitigasi risiko dari dampak pembangunan nasional.

Sedangkan pada sisi lain secara eksternal, situasi global yang ditandai dengan banyak dan mudahnya saluran masyarakat dalam mendapatkan dan menyerap informasi serta budaya global yang tanpa batas. Hal ini lambat laun akan mempengaruhi terhadap pola tindak dan perilaku masyarakat dalam tatanan sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, ditambah lagi budaya permisif dan mudah dipicunya masyarakat dengan isu yang memancing terjadinya konflik sosial, baik berupa friksi yang bernuansa sosial budaya, SARA, batas wilayah maupun sumber daya alam. Peristiwa konflik tersebut dapat distimulan dengan adanya tekanan kebutuhan hidup, persaingan perekonomian yang tidak sehat, pembangunan pertumbuhan penduduk yang belum merata dan adanya kerusakan alam. Kesemuanya ini adalah merupakan aspek garapan dalam pengelolaan kamtibmas, dan fungsi kepolisian memegang peran penting dan utama sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tupoksi di kewilayahan, diperankan oleh satuan kerja yang disebut kepolisian daerah (Polda) sebagaimana amanat Perpol 4 Tahun 2018.

Mengamati *trend* hasil pembangunan tahun 2023 yang indikatornya dapat lihat dari berita resmi statistik yang dirilis BPS setiap periodenya. Pertama mengenai **ideologi dan politik itu terkait indeks demokrasi**, khusus di provinsi Lampung yang saat ini sama-sama sedang melaksanakan Pemilu 2024 dan dirangkai dengan Pemilukada serentak 2024. IDI tahun 2023 masih merujuk pada IDI tahun 2022 yaitu pada angka 78,32 skor IDI ini termasuk dalam kategori “demokrasi yang belum sempurna (interval $60 < IDI \leq 80$), IDI tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021. Selanjutnya menyangkut hasil pembangunan ekonomi tahun 2023, **pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung naik** signifikan menjadi 5,40. Hal ini dapat diartikan bahwa angkatan kerja sudah mulai diserap oleh dunia usaha. Dan untuk **laju inflasi berada pada level 3,47%**. Kita ketahui bersama bahwa skor laju inflasi ditetapkan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia. Oleh karena itu tahun 2023 BI telah menetapkan bahwa laju inflasi 2023 adalah pada level 3% dan tahun 2024 pada level 2,5%, sehingga inflasi di Provinsi Lampung masih stabil. Masih berkaitan dengan hasil pembangunan yang lain yaitu **tingkat pengangguran terbuka (TPT) berada pada skor 4,23, skor ini lebih kecil** dari tahun lalu. Keadaan ini juga berpengaruh positif pada hasil pembangunan yang lain yaitu indeks pembangunan manusia (IPM), **tahun 2023 IPM Provinsi Lampung naik** dibanding tahun sebelumnya, yakni pada poin 72,74 atau tumbuh 0,96% (meningkat 0,69 digit) dibandingkan tahun 2022. Provinsi Lampung kini berada pada status capaian pembangunan manusia “tinggi” ($70 \leq IPM \leq 80$). nilai IPM ini diperoleh melalui tiga pendekatan dimensi dasar, yakni umur panjang dan sehat; pengetahuan; dan kehidupan yang layak. Kemudian apabila melihat dari hasil pembangunan sosial budaya terkait kesenjangan atau ketidakmerataan pendapatan atau Gini Ratio. Maka skor **gini ratio tahun 2023 berada pada interval 0,324**, merupakan batas aman dari ketidakmerataan, karena apabila nilai gini ratio mendekati skor 1, hal ini menunjukkan ketimpangan. Berlanjut pada **tingkat kemiskinan, saat ini tingkat kemiskinan Provinsi Lampung berada pada angka 11,11** atau turun 0,33 digit dari tahun sebelumnya.

Secara umum demikianlah sebagian dari hasil dari pembangunan di Provinsi Lampung, selanjutnya bagaimana kiprah Polda Lampung terhadap hasil

pembangunan tersebut. Mari kita lihat aktualisasi Polda Lampung mulai dari kegiatan pemberian pelayanan administrasi kepolisian, sampai dengan kegiatan operasional kepolisian yang bersifat pre-emptif, preventif dan penegakan hukum, yang kesemuanya itu ditujukan untuk menjaga kondusivitas pembangunan di Provinsi Lampung, khususnya kontribusi dukungannya terhadap program pemerintahan dengan konsentrasi pada pengentasan kemiskinan ekstrim dan menjaga iklim investasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah untuk menyokong perekonomian nasional. Untuk itu Polda Lampung berupaya memberikan *stressing* pada pengelolaan kamtibmas yang kondusif. Demikian juga kegiatan kepolisian untuk mendukung keberlanjutan pembangunan berikutnya pada tahun 2024, sebagai mana yang diamanatkan dalam Renstra 2020-2024. Oleh karena itu Polda Lampung terus berupaya meningkatkan performa kinerja, guna memenuhi ekspektasi masyarakat, dalam mengoptimalkan pemeliharaan kamtibmas, peningkatan pelayanan kepolisian dan penegakan hukum yang berkeadilan. Dengan terus melakukan instropeksi, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penataan organisasi yang efektif dan memperkuat fungsi pengawasan, guna memantapkan jati diri Polri yang seutuhnya. Maka dengan disajikannya **Laporan Kinerja Polda Lampung** ini, menjadi wujud representasi pertanggungjawaban kinerja dari segenap personel Kepolisian Daerah Lampung tahun anggaran 2023.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.

Sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, secara eksplisit peraturan tersebut menerangkan bahwa kedudukan, tugas dan fungsi kepolisian daerah, serta struktur organisasi Polda Lampung sebagai berikut :

1. Tugas

Tugas pokok Polri secara umum sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
- c) menegakan hukum.

Selanjutnya Kepolisian Daerah sebagaimana Perpol Nomor 14 Tahun 2018 adalah alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayan kepada masyarakat dengan lingkup tugas sebagai berikut :

- a) Melaksanakan fungsi kepolisian umum baik di bidang preventif maupun di bidang represif.
- b) Melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) berdasarkan UU Nomor 8 tahun 1981 dan peraturan perundang undangan lainnya.

- c) Membina dan mengawasi pelaksanaan fungsi kepolisian khusus yang diemban oleh alat/badan pemerintah yang mempunyai kewenangan kepolisian terbatas berdasarkan undang-undang.
- d) Membina kemampuan dan kekuatan serta pelaksanaan fungsi penertiban dan penyelamatan masyarakat dalam rangka mengemban sistem kamtibmas yang bersifat swakarsa.
- e) Melakukan tugas-tugas lain yang diemban oleh peraturan perundang-undangan.
- f) Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perpol Nomor 14 Tahun 2018, maka Polda Lampung menyelenggarakan fungsi kepolisian sebagai berikut :

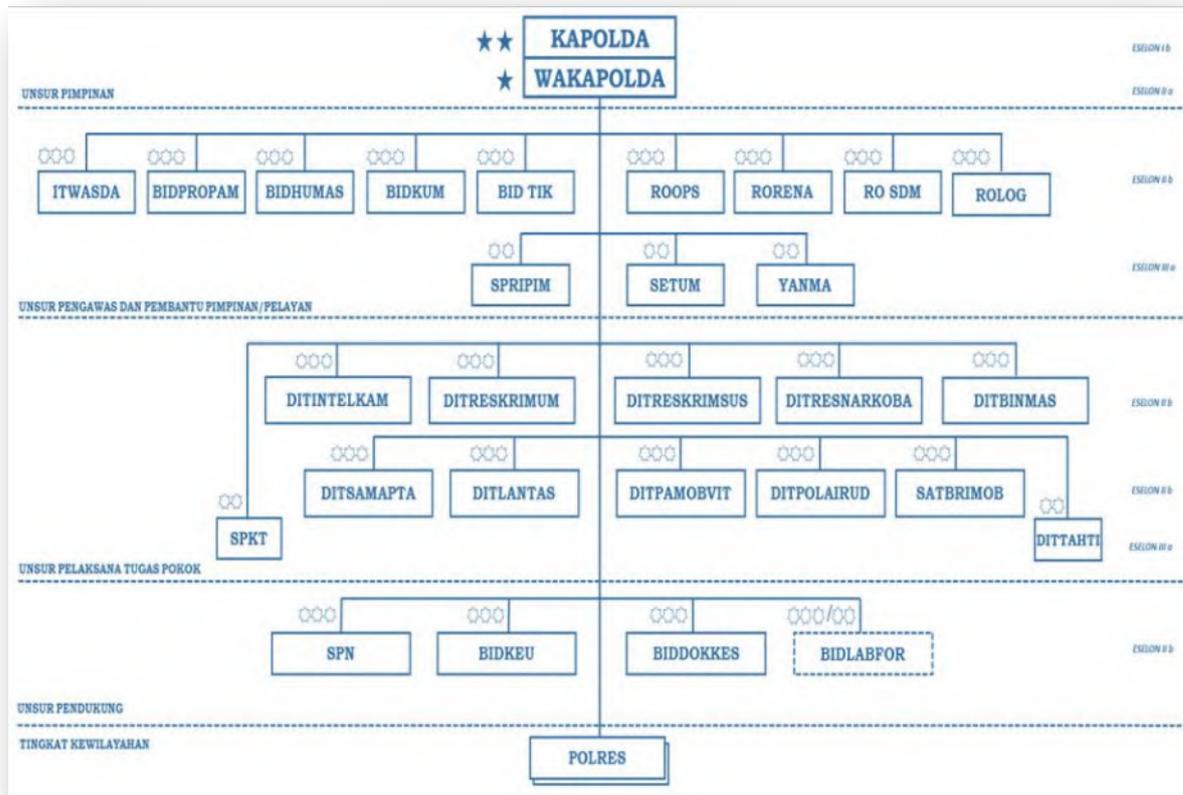
- a) pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri, dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) pelaksanaan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan intelijen teknologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas, maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polda dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri;
- c) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi, laboratorium forensik lapangan, pembinaan dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta pengawasan proses penyidikan;
- d) pelaksanaan sabhara kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat, dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa, serta pengamanan objek khusus yang meliputi *Very Very Important Person* (VVIP), *Very Important Person* (VIP), tempat pariwisata, dan objek vital khusus lainnya;
- e) pelaksanaan lalu lintas kepolisian, yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (turjawali) lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta registrasi dan identifikasi (regident) pengemudi dan kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas);

- f) pelaksanaan kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan/*search and rescue*
- g) (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan;
- h) pembinaan masyarakat, yang meliputi perpolisian masyarakat (polmas), pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban, terjalinnya hubungan Polri dengan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian, serta pembinaan teknis dan pengawasan kepolisian khusus termasuk satuan pengamanan; dan
- i) pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Struktur Organisasi Polda Lampung

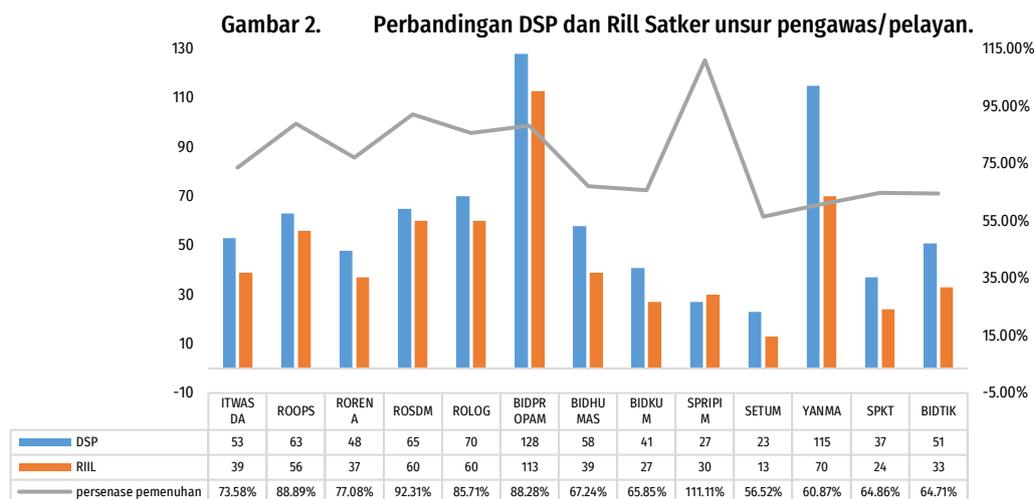
Saat ini Polda Lampung merupakan salah Polda tipe A, yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/1098/2016 tanggal 25 Oktober 2016, dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi Polda Lampung.

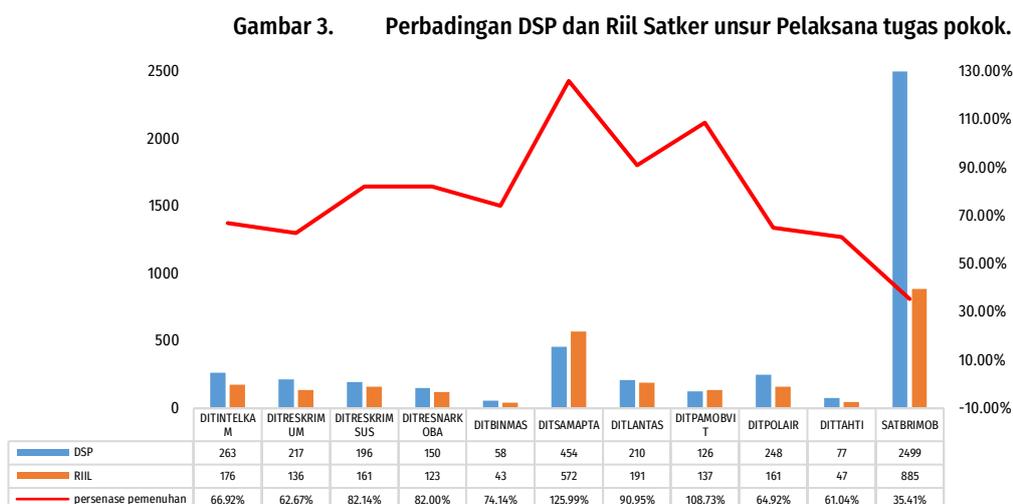


Dalam struktur organisasi Polda Lampung saat ini satuan kerja berjumlah 25 satker terdiri atas unsur pimpinan, unsur pengawas dan pembantu

pimpinan/pelayan, kemudian dilayer tengah organisasi ada unsur pelaksana tugas pokok dan layer organisasi berikutnya yaitu unsur pendukung dan satuan kewilayahan yaitu Polresta dan Polres. Adapun jumlah personel Polda Lampung saat berjumlah 11.789 personel. Dengan jenjang kepangkatan pegawai negeri pada Polri (PNPP) dari anggota Polri berpangkat Pati, Pamen, Pama dan Brigadir, Tamtama, yang berjumlah 11.292 personel, serta PNS yang terdiri dari PNS golongan IV, III, II dan golongan I, yang jumlah 497 personel. Selanjutnya untuk komposisi jumlah personel setiap unsur organisasi mulai dari unsur pimpinan berjumlah 2 personel dengan pangkat Irjen Pol dan Brigjen Pol, terisi 100%, untuk satker unsur pengawas, pembantu pimpinan/pelayan sebagai berikut:



Dari gambar tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa terdapat tiga belas Satker sebagai unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayan, yang apabila dibuat rata-rata pemenuhan jumlah riil personel, satker unsur ini terpenuhi sebesar 76,69%, walaupun dalam kenyataannya terdapat dua satker yang jumlah personelnnya melebihi dari DSP, yaitu Bidpropam dan Spripim. Sementara itu Satker selain di atas sudah lebih dari 50%, dengan Satker Setum pemenuhan personelnnya sebesar 56,52%. Kemudian untuk Satker pelaksana tugas pokok terdiri dari sebelas satker dengan perincian jumlah personel sebagai berikut:



Pada satker unsur pelaksana tugas pokok ini, rata-rata terpenuhi adalah sebesar 77,72%. Terdapat dua satker yang melebihi DSP masing-masing Ditsamapta dan Ditpamobvit, sedangkan yang lainnya umumnya berkisar antara

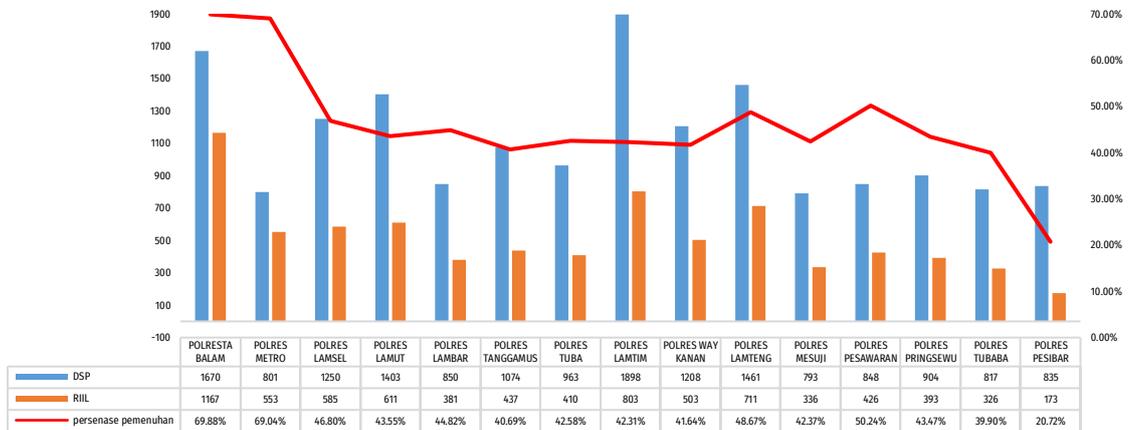
61% - 90%, tetapi terdapat satu satker yang jumlah ril personelnnya di bawah 40%, yaitu Satbrimob dipenuhi sebesar 35,47%. Selanjutnya pemenuhan jumlah personel pada satker unsur pendukung sebagai berikut:

Gambar 4. Perbandingan DSP dan Riil Satker unsur pendukung.



Satker unsur pendukung terdiri dari empat satker masing-masing satker SPN terpenuhi 100%, Bidkeu terpenuhi 59,46, Biddokkes terpenuhi 161,29% yang salah satunya ditempatkan personel Polda Lampung dalam rangka pengobatan dan sakit menahun sebanyak 41 personel dan rumkit Bhayangkara dengan pemenuhan 66,14%. Dan sebagai informasi pada tahun 2023 ini terdapat personel menunggu penugasan setelah melaksanakan pendidikan pembentukan sebanyak 419 personel terdiri dari 59 pangkat Ipda dan 359 berpangkat Bripda. Untuk distribusi personel pada satuan kewilayahan terdiri dari satu satuan Polresta dan empat belas satuan Polres dengan data sebagai berikut:

Gambar 5. Perbandingan DSP dan Riil pada Satuan Polresta dan Polres.



Satuan Polres dengan pemenuhan personelnnya yang terendah adalah Polres Pesisir Barat yang baru diresmikan pada bulan Februari 2023 dan Polres Tulang Bawang Barat. Secara umum personel satuan Polres telah terpenuhi rata-rata 45,78%. Sedangkan Polres yang jumlah personel melebihi dari 50% terdapat pada Polresta Bandar Lampung dan Polres Metro. Selanjutnya dengan jumlah personel sebanyak 11.789 personel ini, Polda Lampung telah berupaya untuk mencapai target kinerja yang telah tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2023.

C. Peran Strategis.

Polda Lampung memiliki peran yang strategis dalam mendukung tugas fungsi institusi Polri, yakni sebagai satuan kewilayahan di Pulau Sumatera yang menjadi pintu gerbang lalu lintas angkutan manusia, barang dan jasa dari dan antar Pulau Jawa-Sumatera, secara spesifik peran ini terkait dengan tugas mengawal, memelihara dan menjaga situasi kamtibmas mulai dari perjalanan angkutan manusia, barang dan jasa sepanjang melewati daerah hukum Polda Lampung. Tentunya dalam pelaksanaan tugas ini Polda Lampung memberikan kontribusi dalam merumuskan, mengkoordinasikan dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan tugas kepolisian di daerah hukum Polda Lampung dan jajaran satuan kewilayahan yang terdiri dari satu Polresta, dan empat belas Polres, agar dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Tugas dalam menyiapkan perumusan kebijakan dipandang sangat strategis, karena berkaitan dengan menyiapkan berbagai kebijakan kewilayahan dalam mendukung institusi Polri dengan merealisasikan berbagai petunjuk dan arahan pelaksanaan tupoksi preemtif, preventif dan penegakan hukum di daerah hukum Polda Lampung. Oleh karena itu dalam menyiapkan kebijakan dan instrumen harus dilakukan secara cermat. Kesalahan dalam menyiapkan kebijakan akan memiliki dampak yang besar bagi kegagalan pelaksanaan tugas sebagai mana tersebut di atas.

Sedangkan dalam perjalanan tupoksi tersebut berperan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan serta tidak kalah pentingnya adalah kualitas keberhasilan dari kebijakan kewilayahan tersebut dapat optimal diimplementasikan oleh semua satuan kerja di lingkungan Polda Lampung, sehingga dampak dari kebijakan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu Polda Lampung sebagai koordinator pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian di daerah Lampung harus mampu berperan optimal sebagai penggerak (*trigger mechanism*).

II. Perencanaan Kinerja

Dalam Rencana Strategis Polda Lampung tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam menjalankan visi, misi dan tujuan organisasi. Polda Lampung merupakan bagian dari Polri sebagai institusi yang mandiri, berwawasan global, berorientasi nasional dan bertindak lokal, terus meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan semua stakeholder dalam memberikan dan melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan menegakkan hukum demi rasa keadilan bagi masyarakat. Adapun visi, misi dan tujuan yang telah dirumuskan tersebut, diarahkan dengan semangat soliditas untuk membangkitkan dan mendorong seluruh personel Polda Lampung, guna mewujudkan personel Polri yang prediktif, responsibilitas dan transparansi yang berkeadilan dalam melaksanakan tupoksi, dengan menjunjung tinggi budaya dan kearifan lokal, yang diimbangi dengan akhlak dan moral yang tinggi serta mampu meningkatkan daya kreativitas dan inovasi dalam menghadapi tantangan tugas dan kehidupan masyarakat dalam menegakkan hukum yang profesional dan proporsional.

A. Visi

“Terwujudnya daerah hukum Polda Lampung yang aman dan tertib.”

Visi tersebut diatas merupakan turunan dari Visi Polri dan dioperasionalkan melalui penjelasan kata-kata kunci dari kalimat visi tersebut, mengandung makna:

- Daerah hukum Polda Lampung sebagai bagian wilayah negara Indonesia yang aman, bebas dari segala bentuk ancaman.
- Daerah hukum Polda Lampung sebagai wilayah negara Indonesia yang tertib.

B. Misi

Mengacu pada tugas, fungsi dan kewenangan yang telah diamanatkan UU Polri dan Perpol Nomor 14 Tahun 2018 tentang SOTK satuan kewilayahan tingkat Polda dan Perkap Nomor 12 Tahun 2017 tentang syarat dan tatacara pembagian daerah hukum Polri, serta penjabaran dari misi dan tujuan dari Renstra Polri 2020-2024, maka terdapat tiga pilar yang menjadi misi Polda Lampung yaitu:

- **Melindungi**, yakni:
Meningkatkan upaya pencegahan dari gangguan kamtibmas, guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat, pemerintah dan segenap sumber daya provinsi Lampung yang terbebas dari gangguan kamtibmas.
- **Mengayomi**, yakni:
Memberikan jaminan terhadap kehidupan masyarakat Lampung dengan meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan daya dukung dan kerja sama untuk mengantisipasi segala bentuk gangguan kamtibmas.
- **Melayani**, yakni:
membantu masyarakat untuk memperoleh pelayanan kepolisian, baik dalam penegakan hukum maupun layanan dasar publik secara profesional dan berkeadilan.

Melindungi diartikan sebagai tanggung jawab preventif dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya Polda Lampung dalam memperkuat Polri (satuan induk) dalam melakukan pencegahan demi mewujudkan keamanan dan ketertiban. **Mengayomi** diartikan sebagai tanggung jawab preemtif bahwa pengelolaan sumber daya Polda Lampung sebesar-besarnya untuk mewujudkan perlindungan pengayoman dan pelayanan dalam kehidupan masyarakat, dengan dukungan kesadaran hukum yang partisipatif. Maka dengan misi ini Polda Lampung berharap senantiasa memberikan perhatian penuh kepada seluruh stakeholder, mulai dari komunitas/pranata sosial masyarakat, instansi pemerintahan, dunia usaha, dan segenap sumber daya kehidupan yang ada. **Melayani** diartikan baik sebagai aparatur pengelola penegakan hukum yang berprinsip azas legalitas dalam memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kepolisian.

Ketiga hal di atas dilakukan secara bertanggung jawab berlandaskan pedoman hidup Tribhata dan pedoman kerja Catur Prasetya, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah bagi jati diri Polri untuk kepentingan bersama

C. Tujuan

Menjabarkan misi Polri menjadi tujuan Polda Lampung, maka tujuan Polda Lampung adalah:

1. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan hukum secara berkeadilan;
3. Mewujudkan Polda Lampung yang profesional.
4. Modernisasi pelayanan Polda Lampung.
5. Menerapkan manajemen yang terintegrasi dan terpercaya.

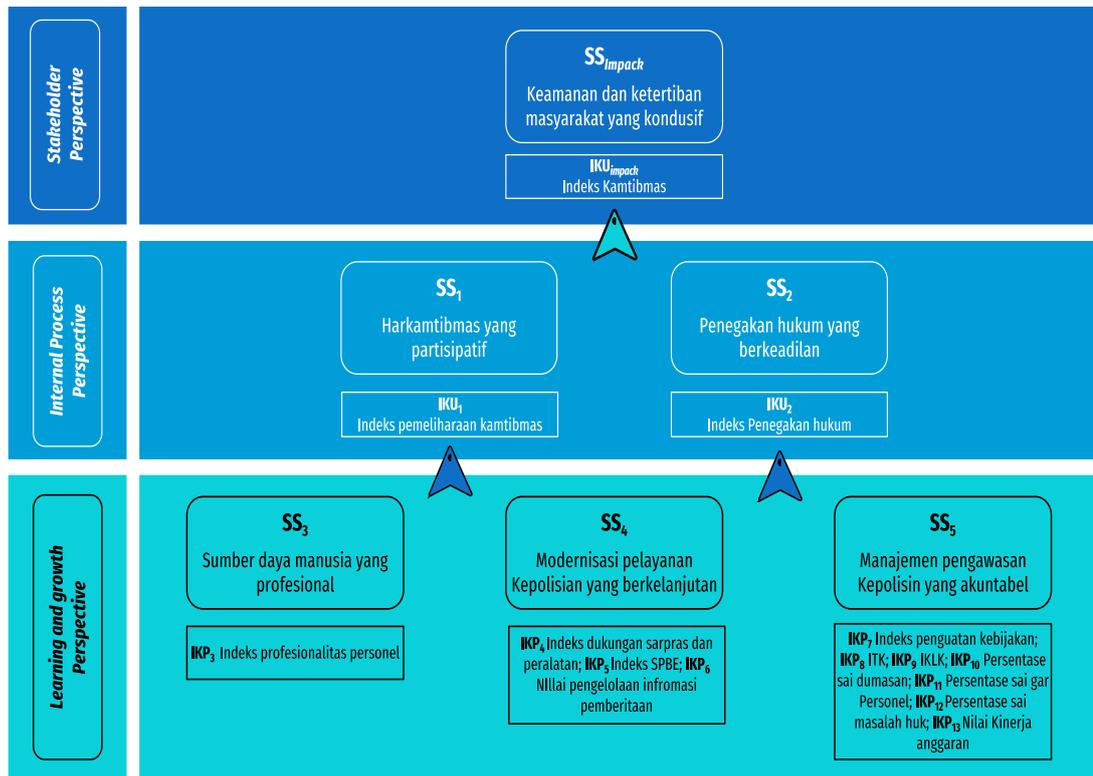
D. Sasaran Prioritas

1. Harkamtibmas yang kondusif guna menciptakan rasa aman di tengah masyarakat;
2. Mengoptimalkan kualitas Pelayanan publik Polri;
3. Penegakkan hukum yang transparan dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik;
4. Meningkatkan Profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polri;
5. pemenuhan sarana prasarana dan Almatsus Polri yang modern;
6. penguatan pengawasan yang efektif guna menguatkan integritas dan tatakelola organisasi yang baik;

E. Sasaran Strategis.

Sasaran Strategis Polda Lampung sesuai dengan Keputusan Kapolda Lampung Nomor: Kep/464/IV/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Renstra Polda Polda Lampung 2020-2024, menggunakan pendekatan metode *Balance Scorecard (BSC)* yang dibagi dalam tiga perspektif yakni *stakeholder perspective*, *internal process perspective* dan *learning and growth perspective* yang tergambar dalam peta strategis Renstra Polda Lampung 2020-2024 sebagai berikut:

Gambar 6. Peta Strategi Polda Lampung tahun 2020-2024



Mengait dengan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Polda Lampung saling terkait satu dengan yang lainnya, untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Polri yang selaras dengan *Grand Strategi* Polri. Sasaran strategis (SS) Polda Lampung merupakan rumusan kalimat pernyataan yang singkat, jelas dan mudah dipahami; merupakan sasaran-sasaran yang bersifat penting dan prioritas tinggi pada Renstra 2020-2024, merupakan kalimat pernyataan kondisional dan bersifat kualitatif, bukan kuantitatif.

Peta Strategi yang telah disusun ini menggambarkan juga hubungan sebab akibat antar perspektif. **Pengecekan hubungan sebab akibat pencapaian SS pada satu perspektif mendukung pencapaian SS pada perspektif di atasnya, dilakukan dengan membaca dari bawah ke atas, yakni perspektif learning and growth harus menjawab "apa yang harus dimiliki Polda Lampung", perspektif internal process harus menjawab "apa yang harus dilakukan/dikerjakan Polda Lampung untuk memenuhi kebutuhan rasa aman dan keadilan masyarakat Lampung", dan perspektif stakeholders harus menjawab "apa yang diharapkan masyarakat dan negara,** dalam hal ini masyarakat dan pemerintahan provinsi Lampung atas eksistensi Polda Lampung. Selanjutnya dalam SS tersebut tersusun atas indikator-indikator kinerja yang dipilih secara tepat, jelas dan terukur, yang menggambarkan pencapaian keberhasilan dari misi dan tujuan Polda Lampung melalui metodologi *Balance*

scorecard. Pada metodologi *Balance scorecard* tersebut terbagi dalam dua jenis indikator kinerja yakni Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Pendukung/penunjang (IKP). Kemudian sasaran strategis pada tiga perspektif pada Peta Strategi Polda Lampung dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Stakeholder Perspective:** Sudut pandang organisasi yang berfokus pada bagaimana organisasi memenuhi harapan stakeholder atau Bagaimana Polda Lampung berorientasi pada ekspektasi masyarakat dan pemerintahan. Pada perspektif ini terdiri dari satu sasaran strategis yaitu:

(SS-*impack*) keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, dengan satu indikator kinerja *impack* “**Indeks keamanan dan ketertiban**”.

2. **Internal Process Perspective:** Sudut pandang organisasi yang berfokus pada rangkaian proses tupoksi yang dikerjakan untuk memenuhi keinginan, baik dari pihak eksternal (masyarakat dan pemerintah) dan internal yang terkait langsung atas pelaksanaan tupoksi kepolisian yang diselenggarakan Polda Lampung. dalam memelihara kamtibmas dan penegakan hukum. Pada perspektif ini terdiri dari dua sasaran strategis yaitu:

(SS₁) pemeliharaan kamtibmas yang partisipatif, dengan satu indikator kinerja, dengan indikator kinerja utama “**Indeks harkamtibmas**”.

(SS₂) penegakan hukum yang berkeadilan, dengan satu indikator kinerja utama yaitu “**Indeks penegakan hukum**”.

3. **Learning and growth Perspective:** yakni sudut pandang Polda Lampung yang berfokus rangkaian proses pengelolaan kondisi sumber daya internal yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh Polda Lampung untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* yang sesuai dengan keinginan dan harapan baik dari *internal process* maupun *stakeholder* melalui pengembangan dan pembangunan kapasitas dan kapabilitas organisasi. Pada perspektif ini terdiri dari tiga sasaran strategis yaitu:

(SS₃) **sumber daya manusia yang profesional**”, dengan Indikator Kinerja Pendukung yakni; “**Indeks profesionalitas personel**”.

(SS₄) **Modernisasi pelayanan Kepolisian yang berkelanjutan**, dengan tiga indikator kinerja pendukung yaitu;

- a) Indeks dukungan sarpras dan peralatan, .
- b) Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- c) Nilai pengelolaan informasi pemberitaan.

(SS₅) **Manajemen pengawasan kepolisian akuntabel**, dengan tujuh indikator kinerja pendukung yaitu:

- a) indeks penguatan implementasi kebijakan:
- b) Indeks Tatakelola Kepolisian;
- c) Indeks kepuasan layanan Kepolisian.
- d) Persentase penyelesaian dumas;

- e) Persentase penyelesaian pelanggaran personel;
- f) Persentase penyelesaian masalah hukum.
- g) Nilai kinerja anggaran.

F. Penetapan Kinerja Polda Lampung T.A. 2023

Perjanjian Kinerja yang disusun Polda Lampung merupakan pelaksanaan dari Peraturan Kapolri tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja di Lingkungan Polri. Hal ini dapat mengandung arti bahwa **perjanjian kinerja** merupakan tekad dan janji akan dicapai antar pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberi amanah/tanggung jawab/kinerja. Penetapan kinerja Polda Lampung T.A. 2023 secara terperinci:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Polda Lampung T.A. 2023.

Kode SS/IKU/ IKP	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama/Pendukung	Satuan	Polarisasi	Target 2023
<i>Stakeholder Perspective</i>				
SS.impact	Keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif			
IKU.impact	Indeks keamanan dan ketertiban	indeks	maximize	3,4
<i>Internal Process Perspective</i>				
SS.1	Harkamtibas yang partisipatif			
IKU.1	Indeks pemeliharaan kamtibmas	indeks	maximize	73
SS.2	Penegakan hukum yang berkeadilan			
IKU.2	Indeks penegakan hukum	indeks	maximize	69
<i>Learn and growth Perspective</i>				
SS.3	Sumber daya manusia yang profesional			
IKP.3	Indeks profesionalitas personel	indeks	maximize	73
SS.4	Modernisasi pelayanan kepolisian yang berkelanjutan			
IKP.4	Indeks dukungan sarpras dan peralatan	indeks	maximize	70
IKP.5	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	indeks	maximize	2,4
IKP.6	Nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan	indeks	maximize	70
SS.5	Manajemen pengawasan Kepolisian yang akuntabel			
IKP.7	Indeks penguatan implementasi kebijakan	indeks	maximize	74
IKP.8	Indeks Tatakelola Kepolisian	indeks	maximize	5,4
IKP.9	Indek kepuasan layanan kepolisian	indeks	maximize	82
IKP.10	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	persentase	maximize	75
IKP.11	Persentase penyelesaian pelanggaran personel	persentase	maximize	86
IKP.12	Persentase penyelesaian masalah hukum	persentase	maximize	91
IKP.13	Nilai kinerja anggaran	indeks	maximize	78

Sumber : dokumen Rencana Kerja Polda Lampung T.A. 2023

G. Anggaran DIPA T.A. 2023

Target Polda Lampung yang hendak dicapai pada T.A. 2023 merupakan target tahun ke-empat dari Renstra Polda Lampung 2020-2024. Adapun **DIPA Polda Lampung T.A. 2023 adalah sebesar Rp. 1.352.158.376.000,-** (satu triliun tiga ratus lima puluh dua milyar seratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Adapun anggaran tersebut terdiri dari atas 5 (lima) program, yaitu:

1. Program Profesionalisme SDM Polri.

- a) **Tujuan;** terwujudnya postur SDM Polri yang profesional, modern dan terpercaya berdasarkan kompetensi dan kinerja yang optimal melalui infrastruktur SDM yang berkualitas, bermanfaat dan berkelanjutan guna mendukung produktivitas kerja, disiplin dan tanggung jawab personel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna meningkatkan *value* organisasi.

b) Kegiatan:

- 1) dukungan Manajemen profesionalisme SDM Polri (3096);
- 2) penyelenggaraan pendidikan dan latihan Polri (3100);
- 3) penyelenggaraan administrasi perawatan pegawai Polri (3105);
- 4) pengendalian pegawai Polri (3107)
- 5) pembinaan karier personel Polri (3108);
- 6) pelayanan psikologi anggota Polri (3110).

2. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

a) Tujuan; terwujudnya stabilitas politik dan keamanan melalui penegakkan hukum yang profesional, proporsional dan akuntabel serta menjunjung tinggi hak asasi manusia;

b) Kegiatan:

- 1) dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (3137);
- 2) Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana (3140)
- 3) penindakan tindak pidana umum (3142);
- 4) penindakan tindak pidana narkoba (3144);
- 5) penindakan tindak pidana ekonomi khusus (3145);
- 6) penindakan tindak pidana korupsi (3146);
- 7) penindakan tindak pidana siber (3151);
- 8) penindakan tindak pidana perairan (4342);
- 9) penindakan tindak pidana laka lantasi (4343);
- 10) penindakan tindak pidana tertentu (5083);
- 11) koordinasi dan pengawasan PPNS (5085) dan;
- 12) pengawasan penyidikan (5086).

3. Program modernisasi almatsus dan sarana prasarana Polri.

a) Tujuan: terpeliharanya Harkamtibmas melalui tata kelola dan modernisasi sarana dan prasarana aparaturnya Polri guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi pembinaan dan operasional;

b) Kegiatan:

- 1) pengembangan peralatan Polri (3084);
- 2) dukungan manajemen dan teknik Sarpras (5059);
- 3) pengembangan fasilitas dan konstruksi (5062).

4. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

a) Tujuan: terpelihara Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan manajemen operasional dan informasi kepolisian serta integrasi lintas sektoral yang fokus pelaksanaan tugas fungsi preemtif dan preventif;

b) Kegiatan:

- 1) analisis keamanan (3112);
- 2) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik (3114);
- 3) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi (3155);

- 4) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya (3116);
- 5) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara (3117);
- 6) Kerjasama keamanan dan ketertiban K/L (3120);
- 7) Dukungan manajemen pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (3128);
- 8) Pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (3130);
- 9) Penyelenggaraan pengamanan obyek vital (3131);
- 10) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang lalu lintas (3133);
- 11) penyelenggaraan kepolisian perairan (3134);
- 12) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan khusus (3150);
- 13) pembinaan potensi keamanan (5076);
- 14) pengendalian operasi kepolisian (5080);
- 15) pelacakan dan penangkapan keamanan dan ketertiban (5081);
- 16) penanggulangan keamanan dalam negeri (5087).

5. Program Dukungan Manajemen.

a) Tujuan: terwujudnya *good governance* dan *clean government* melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian, sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran dan integrasi lintas sektor.

b) Kegiatan:

- 1) pelayanan administrasi keuangan Polri (3068);
- 2) penerangan masyarakat (3070);
- 3) penyelenggarakan teknologi informasi (4071);
- 4) pelayanan kesehatan Polri (3072);
- 5) dukungan pelayanan internal perkantoran Polri;(3073);
- 6) pertanggungjawaban profesi (3088);
- 7) penyelenggarakan pengamanan internal Polri;(3089);
- 8) penegakkan tata tertib dan disiplin Polri (3090);
- 9) penyelenggarakan pemeriksaan dan pengawasan (3091);
- 10) pengelolaan multimedia (3149);
- 11) pemberian bantuan dan nasehat hukum (3154);
- 12) penyusunan dan penyuluhan hukum (3155);
- 13) penyusunan kebijakan Polri (5051);
- 14) penata kelembagaan dan ketatalaksanaan Polri (5052);
- 15) reformasi birokrasi Polri (5053);
- 16) manajemen anggaran (5054);
- 17) pengelola informasi dan dokumentasi (5056).

III. Akuntabilitas Kinerja.

A. Capaian Kinerja Polda Lampung.

Akuntabilitas kinerja Polda Lampung merupakan kinerja secara kolektif yang diperoleh dari tiga puluh sembilan satuan kerja, dengan didasari atas Perjanjian Kinerja pada seluruh level satuan kerja, yang dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala, sehingga diperoleh capaian kinerja Polda Lampung Tahun 2023 sebagai berikut ini:

Tabel 2. Dashboard Nilai Pencapaian sasaran strategis (NPSS) Polda Lampung 2023

Perspektif	Bobot	Kode SS	Nama SS	Jml IKU	NSS	Status NSS ¹	Skors NSS	NKP	Status NKP
Stakeholder	33,33%	SS0	Keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.	1	107,97%		107,97%	35,99%	
Internal Proses	33,33%	SS1	Harkamtibmas yang partisipatif	1	112,89%		108,17%	36,05%	
		SS2	Penegakan hukum yang berkeadilan.	1	103,45%				
Learn and growth	33,33%	SS3	Sumber daya manusia yang profesional	1	98,18%		105,22%	35,07%	
		SS4	Modernisasi pelayanan kepolisian yang berkelanjutan	3	106,62%				
		SS5	Manajemen pengawasan kepolisian yang akuntabel	7	110,88%				
Nilai Pencapaian Sasaran Strategis							107,12%		

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan yang menggunakan metodologi peta strategi *Balance Scorecard*, termasuk juga pencapaian pada setiap *layer* perspektifnya. Sehingga menjadi representasi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam setiap tahunnya. Oleh karena untuk mengetahui perkembangan pencapaiannya dengan tahun sebelumnya melalui NPSS Polda Lampung dalam empat tahun terakhir dari 2020-2023 sebagai berikut:

Tabel 3. NPSS Polda Lampung 2020-2023.

No	Kinerja	Tahun				Kenaikan 2022 Ke 2023
		2020	2021	2022	2023	
1.	NPSS	114,60%	117,85%	113,53%	107,12%	-5,64%
2.	Stakeholder Perspective	39,99%	40,00%	40,00%	35,99%	-10,03%
3.	Internal Perspective	36,82%	40,00%	37,87%	36,05%	-4,80%
4.	Learned & growth Perspective	37,79%	37,86%	35,66%	35,07%	-1,65%

NPSS Polda Lampung tahun 2023 adalah sebesar 107,12%, mengalami tren penurunan sebesar 5,64% dari 113,54% pada tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk nilai perspektif *stakeholders* tahun 2023 juga mengalami penurunan sebesar 10,03%, demikian juga terjadi kontraksi penurunan kinerja sasaran strategis baik pada perspektif *internal process* dan perspektif *learn and growth* masing-masing turun sebesar 4,80% dan 1,65% dari tahun 2022. Selanjutnya secara terperinci capaian

¹ Status NSS dan Status NKP adalah status yang menunjukkan ekspektasi dari pencapaian NSS dan NKP, yang dibagi dalam tiga spektrum warna (warna hijau menunjukkan status memenuhi ekspektasi; warna kuning menunjukkan belum memenuhi ekspektasi dan warna merah menunjukkan tidak memenuhi ekspektasi, dengan interval sebagai berikut:

Hijau	Kuning	Merah
100 ≤ X ≤ 120	80 ≤ X < 100	X < 80
Memenuhi ekspektasi	Belum memenuhi ekspektasi	Tidak memenuhi ekspektasi

indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Capaian Kinerja Polda Lampung T.A. 2023.

Kode SS/IKU/IKP	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama/Pendukung	Satuan	Polarisasi	Target 2023	Realisasi	Capaian
Stakeholder Perspective						
SS- <i>impact</i>	Keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif					
IKU- <i>impact</i>	Indeks keamanan dan ketertiban	indeks	<i>maximize</i>	3,400	3,67	107,97%
Internal Process Perspective						
SS-1	Harkamtibmas yang partisipatif					
IKU-1	Indeks pemeliharaan kamtibmas	indeks	<i>maximize</i>	74,00	83,54	112,89%
SS-2	Penegakan hukum yang berkeadilan					
IKU-2	Indeks penegakan hukum	indeks	<i>maximize</i>	69,00	71,38	103,45%
Learn and growth Perspective						
SS-3	Sumber daya manusia yang profesional					
IKP-3	Indeks profesionalitas personel	indeks	<i>maximize</i>	73,00	71,67	98,18%
SS-4	Modernisasi pelayanan kepolisian yang berkelanjutan					
IKP-4	Indeks dukungan sarpras dan peralatan	indeks	<i>maximize</i>	70,00	81,97	117,11%
IKP-5	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	indeks	<i>maximize</i>	2,40	2,40	100,00%
IKP-6	Nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan	indeks	<i>maximize</i>	70,00	71,92	102,74%
SS-5	Manajemen pengawasan Kepolisian yang akuntabel					
IKP-7	Indeks penguatan implementasi kebijakan	indeks	<i>maximize</i>	74,00	87,95	118,85%
IKP-8	Indeks Tatakelola Kepolisian	indeks	<i>maximize</i>	5,40	5,58	103,33%
IKP-9	Indek kepuasan layanan kepolisian	indeks	<i>maximize</i>	82,00	84,05	102,50%
IKP-10	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	persentase	<i>maximize</i>	75,00%	100,00%	120,00%
IKP-11	Persentase penyelesaian pelanggaran personel	persentase	<i>maximize</i>	86,00%	95,75%	111,34%
IKP-12	Persentase penyelesaian masalah hukum	persentase	<i>maximize</i>	91,00%	100,00%	109,89%
IKP-13	Nilai kinerja anggaran	indeks	<i>maximize</i>	78,00	85,98	110,23%

Berdasarkan rekap realisasi kinerja dan capaian kinerja baik pada indikator kinerja *impact*, indikator kinerja utama semua target kinerja dapat tercapai, sedangkan untuk indikator kinerja pendukung khususnya pada indikaor kinerja Indeks profesionalitas personel untuk tahun 2023 ini tidak tercapai, selanjut untuk mengetahui lebih rinci dari capaian setiap indikator kinerja dapat di lihat pada analisis dan evaluasi capaian kinerja berikut ini.

B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja.

Analisa dan evaluasi capai kinerja dari masing-masing sasaran strategis pada setiap perspektif menggambarkan penjelasan dari keberhasilan maupun kendala kegagalan sebagaimana yang telah ditargetkan dalam pernyataan perjanjian kinerja T.A. 2023, selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut :

Stakeholder Perspective.

0. **Sasaran Strategis (SS-*Impact*) :**
Keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

Sasaran Strategis (SS-*Impact*) Keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, memiliki satu IKU (indikator kinerja utama) yakni **Indeks kamtibmas**, yang merupakan sasaran dampak dari sasaran strategis pemeliharaan keamanan dan ketertiban yang partisipatif dan penegakan hukum yang berkeadilan, sebagai mana amanat Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diatur dalam Pasal 2, 4, 5 dan 13 yang menunjukkan suatu situasi keamanan dimana masyarakat terjaga, terawat, terpelihara, selamat, terhindar dari mara bahaya serta tingkat terlindunginya masyarakat dari berbagai macam ancaman keamanan, perasaan aman nyaman masyarakat secara psikis dengan keberadaan atau kehadiran

peran Polri di tengah masyarakat. Oleh karena itu Polda Lampung memberikan perhatian penuh pada perspektif *stakeholder* ini.

IKU₀ - Indeks keamanan dan ketertiban masyarakat.

Indeks keamanan dan ketertiban masyarakat² adalah suatu ukuran dalam mengelola situasi keamanan dan ketertiban yang disepakati Polri, guna mewujudkan situasi yang kondusif, nilai indeks ini diperoleh dari nilai komposit yang dihasilkan dari dampak keseluruhan tupoksi kepolisian berdasarkan dimensi harkamtibmas dan dan penegakan hukum. Kinerja ini bermanfaat baik bagi *stakeholder internal* sebagai masukan dalam meningkatkan aktualisasi tupoksi maupun bagi *stakeholder eksternal* dalam mendukung pembangunan di daerah Lampung. Adapun analisis dan evaluasi capaian indikator kinerja ini sebagai berikut:

Tabel 5. Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKU₀ Indeks kamtibmas.

SSimpack Keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif											
IKI-0 Indeks keamanan dan ketertiban											
Realisasi 2020-2022				Tahun 2023			Renstra Polda Lampung 2020-2024				
Triwulan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	realisasi	target	% capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2024	% capaian target 2024	Target nasional	% capaian target nasional
I	3,47	4,07	4,14	3,67	3,4	107,97%	-11,33%	3,5	104,88%	3,3	111,24%
II	3,62	4,08	4,23	3,84	3,4	112,90%	-9,26%	3,5	109,67%	3,3	116,32%
III	3,70	4,14	4,19	3,82	3,4	112,22%	-8,94%	3,5	109,01%	3,3	115,62%
IV	3,75	4,69	4,21	3,91	3,4	114,98%	-7,14%	3,5	111,70%	3,3	118,47%

Apabila dilihat dari realisasi capaian kinerja dampak pada situasi keamanan dan ketertiban di daerah hukum Polda Lampung yang diukur secara kuantitatif melalui Indikator kinerja *impack (IKU₀ Indeks kamtibmas)*, maka target TAB 2023 dapat tercapai dengan besaran 114,98%. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja

TAB-1, terjadi penurunan kinerja sebesar 7,14%.

kemudian apabila dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024, maka capaian kinerjanya masih di atas 100%,

demikian juga apabila

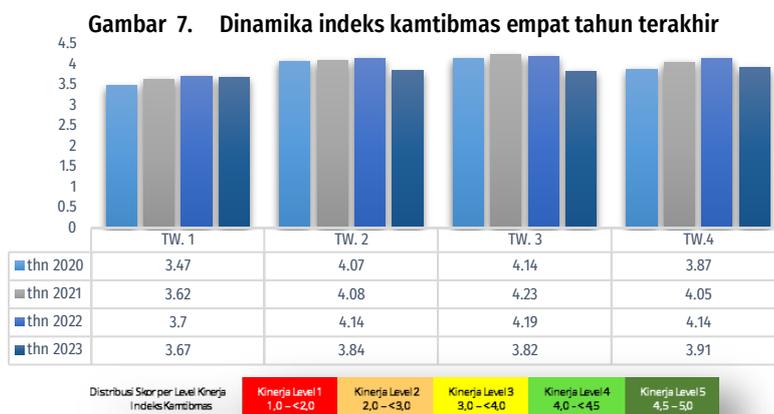
dibanding dengan target nasional sebesar 3,2 maka capaiannya masih di atas 100%. Artinya IKU₀ yang tersusun atas nilai komposit IKU₁ indeks harkamtibmas

"Penghargaan dan apresiasi dari Gubernur Provinsi Lampung Nomor: G.350/IV.408/HK/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang melakukan pengungkapan kasus yang menjadi atensi nasional, yakni mengagalkan pengiriman pekerja migran Indonesia yang akan dikirimkan ke negara Timur Tengah dari wilayah Provinsi Lampung. Penghargaan dan apresiasi dari Koordinator nasional TRC (tim reaksi cepat) perlindungan perempuan dan anak atas dedikasi penegakan hukum serta keberhasilan mengungkap perkara anak dan perdagangan orang selama 2023 di Wilayah Provinsi Lampung (14/9 2023). Penghargaan dan apresiasi dari Kepala Badan Karantina Indonesia dukungan terhadap partisipasi pelaksanaan tugas perlindungan sumber daya alam hayati Tahun 2023 di wilayah Indonesia (17/10 2023). Penghargaan dari DPD Federasi Guru Independen Indonesia Provinsi Lampung Nomor: 001/A/FGII/XI/2023 atas perhatian pada dunia pendidikan dan respon cepat atas penanganan tawuran antar pelajar di wilayah provinsi Lampung. Penghargaan dari Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia Nomor : 0018/PP.PMI/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023, atas dukungan pelaksanaan kegiatan Jumbara PMR tingkat nasional IX tahun 2023 di Kalianda Lampung Selatan Provinsi Lampung dari tanggal 2-10 Juli 2023. Penghargaan dari Kepala BKKBN atas komitmen menggerakkan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana serta percepatan penurunan stunting untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera (7/5 2023)."

² Indeks kamtibmas berdasarkan Keputusan Kapolri No: Kep/1910/IX/2020 tanggal 24 September 2022 tentang Penetapan Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2020-2024, hal. 34.

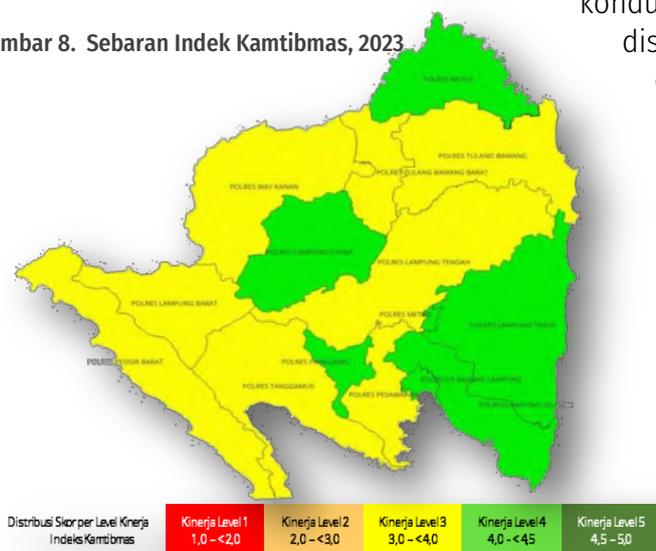
dan IKU₂ indeks penegakan hukum berhasil dengan gemilang mencapai target kinerja sasaran strategis dampak Keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, yang telah sepakati dalam Renstra 2020-2024. Keberhasilan pengelolaan situasi keamanan dan ketertiban ini, tentunya didukung oleh kiprah dari seluruh sumber daya satuan kepolisian Polda Lampung, dalam melaksanakan tupoksi dan kegiatan operasional kepolisian, baik preemtif, preventif dan penegakan hukum yang dihadapkan pada tantangan, ancaman dan hambatan dari dinamika lingkungan strategis yang terjadi pada TAB.

Hal ini juga memberi dampak positif bagi keberhasilan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintahan daerah Lampung, khususnya ditandai dengan pemberian penghargaan dan apresiasi dari stakeholder kepada Polda Lampung dan jajaran. Berikut ini gambaran dinamika kinerja indeks kamtibmas setiap triwulan selama empat tahun terakhir ini sebagai berikut:



Dari gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa perkembangan indeks kamtibmas setiap triwulan berada pada level kinerja 3,47 - 4,23 yaitu pada rentang level kinerja 3-4 pada skala likert 1-5. Keberhasilan dari kinerja ini, merupakan fakta yang menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023, dimensi harkamtibmas dan penegakan hukum yang diselenggarakan Polda Lampung dan jajaran secara komplen memberikan kontribusi terhadap terwujudnya situasi kamtibmas yang kondusif. Kemudian untuk mengetahui lebih dalam mengenai sebaran kondusivitas keamanan dan ketertiban, bersama ini disajikan peta situasi kamtibmas TAB 2023 dengan ekspektasi menggunakan spektrum warna pada 15 satuan Polres di jajaran Polda Lampung sebagai berikut:

Gambar 8. Sebaran Indeks Kamtibmas, 2023



disajikan peta situasi kamtibmas TAB 2023 dengan ekspektasi menggunakan spektrum warna pada 15 satuan Polres di jajaran Polda Lampung sebagai berikut:

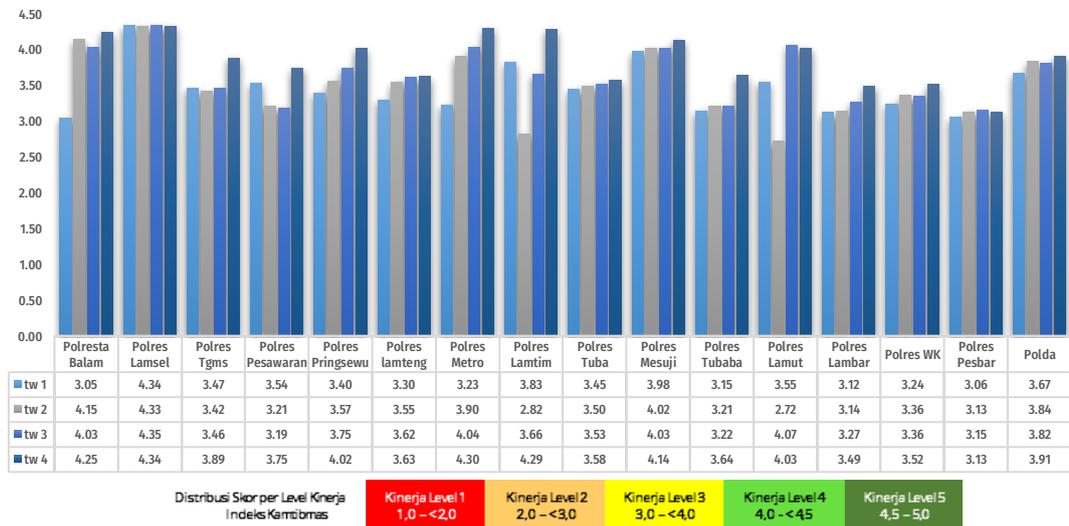
Terlihat sebaran indeks Kamtibmas (**Gambar 8**) secara umum daerah hukum Polda Lampung berwarna kuning, menunjukkan berada pada level kinerja 3, artinya **indeks keamanan dan ketertiban pada 15 satuan kewilayahan Polres jajaran Polda Lampung berada pada kisaran angka indeks 3,0-4,0.**

Terlihat Polresta Bandar Lampung, Polres Lampung Selatan, Lampung Timur, Metro, Pringsewu, Lampung Utara dan Mesuji sudah mencapai

kinerja level 4. Sementara itu delapan Polres berwarna kuning.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap **keberhasilan** dalam pengelolaan keamanan dan ketertiban masyarakat ini adalah keterpaduan dari penyelenggaraan dinamika operasional kepolisian; mulai dari pengelolaan dimensi harkamtibmas yang meliputi delapan komponen pendukung terdiri dari pengelolaan kamseltibcar lantas, pengelolaan kegiatan *community policing*, pengelolaan kegiatan response time pada patroli pada daerah rawan, pengelolaan antisipasi terhadap potensi gangguan, pengelolaan harkamtibmas perairan, pengelolaan pelayanan pengamanan obvit dan objek tertentu, pengelolaan kualitas kekuatan Brimob dan pengelolaan operasi kepolisian serta pengelolaan dimensi penegakan hukum, yang berupaya untuk mewujudkan transparansi penyidikan yang berkeadilan. Di samping itu peran aktif penyelenggaraan kerjasama harkamtibmas guna menumbuhkan kesadaran, kepedulian dan wawasan masyarakat terhadap kamtibmas setempat. Kemudian konsisten dan secara berkelanjutan mendukung untuk mengoptimalkan sinergit Polda Lampung dengan program-program pembangunan baik pemerintahan pusat maupun daerah. Melalui peningkatan kualitas terhadap harmonisasi kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan masyarakat di provinsi Lampung. Selanjutnya untuk mengetahui dan analisis terhadap pendukung **IKU₀** ini, dapat dijelaskan pada **IKU₁** dan **IKU₂** dalam LKIP ini. Tetapi untuk mengetahui sampai sejauh mana analisis perkembangan indeks keamanan dan ketertiban setiap triwulan pada 15 satuan Polres sebagai berikut:

Gambar 9. Dinamika Indeks kamtibmas pada 15 Polres, 2023



Dari 15 satuan Polres yang ada, pada triwulan I terdapat satu daerah hukum Polres yang berada pada **kinerja level 4** yakni **Polres Lampung Selatan**, sedangkan **Polres lainnya masing-masing pada kinerja level 3**. Memasuki **triwulan II kinerja level 4 bertambah menjadi tiga Polres yaitu Polresta Bandar Lampung, Polres Lampung Selatan dan Polres Mesuji**, sedangkan Polres lainnya berada pada kinerja level 3. Pada **triwulan III kinerja level 4 menjadi lima Polres yaitu Polresta Bandar Lampung, Polres Lampung Selatan, Metro, Mesuji dan Lampung Utara**. Lalu memasuki **kinerja triwulan IV kembali kinerja Polresta Bandar Lampung bersama lima Polres lainnya dengan kinerja level 4**.

Secara umum mengakhiri tahun 2023, situasi kamtibmas di daerah hukum Polda Lampung kondusif, menunjukkan kontribusi positif baik terhadap pencapaian target indeks kamtibmas Polda Lampung maupun kontribusi terhadap indeks kamtibmas nasional. Sebagai **evidence** keadaan dari situasi kamtibmas yang

Tabel 6. Indikator IDI Provinsi Lampung, 2022

No.	Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	th 2022	th 2021
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara	80,63	84
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat	74,1	76,28
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	86,15	88,41
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	83,69	84,01
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	82	82
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	73,98	70,18
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	78,71	77,71
8	Kesetaraan gender	92,36	91,62
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	91,34	77,38
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	65,31	63,51
11	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	73,52	76,6
12	Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah	95,03	94,51
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	76,85	71,9
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	73,21	72,66
15	Kinerja lembaga legislatif	54,36	54,35
16	Kinerja lembaga yudikatif	86,82	87,41
17	Netralitas penyelenggara pemilu	64,36	64,36
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	61,5	68,69
19	Jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	73,07	72,21
20	Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah	83,61	68,91
21	Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	81,36	78,02
22	Pendidikan politik pada kader partai politik	73,45	54,27

Indonesia (**Tabel 6**), berdasarkan metode baru pengukuran IDI, terdapat 22 indikator, tahun 2022 ada tujuh indikator mengalami penurunan skor. Kemudian untuk perkembangan IDI Lampung tahun 2023 baru sekitar pertengahan tahun 2024 akan dirilis Kantor BPS, tetapi untuk sementara terdapat dari pernyataan dari Kantor Kesbangpol Provinsi Lampung yang disampaikan pada laman RRI Lampung⁴ “terdapat ada beberapa angka dari 22 indikator penentu IDI yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Adapun Indikator yang diperkirakan mengalami kenaikan pada IDI Lampung 2023, diantaranya Perda yang disahkan dan angka anarkis yang menurun.”

Untuk saat ini IDI Provinsi Lampung diurut berdasarkan provinsi di Pulau Sumatera, maka berada pada urutan 5 dari 10 Provinsi (**Tabel 7**), menjadi salah satu Provinsi yang mengalami penurunan skor IDI. Berlanjut pada pembangunan sektor ekonomi di provinsi Lampung. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS diperoleh informasi mengait keadaan situasi perekonomian, diantaranya

Tabel 7. Ranking skor IDI Sumatera, 2022

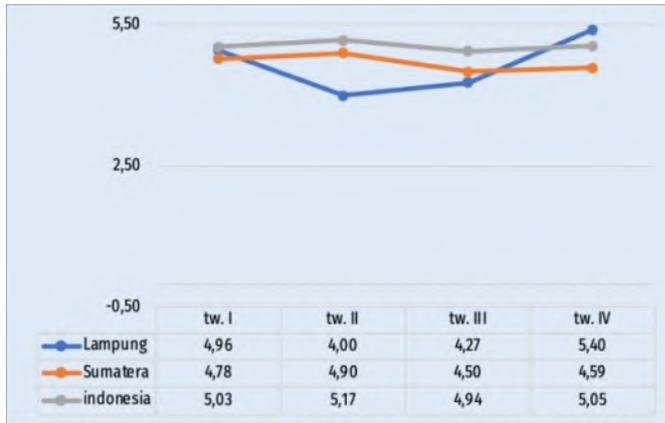
Provinsi	Tahun 2022	Tahun 2021	Tren IDI
Aceh	80,82	80,92	-0,12%
Sumatera Selatan	80,59	78,63	2,49%
Sumatera Utara	79,53	77,6	2,49%
Kep. Riau	78,77	79,53	-0,96%
Lampung	78,32	80,18	-2,32%
Sumatera Barat	77,35	78,51	-1,48%
Jambi	77,19	72,91	5,87%
Kep. Bangka Belitung	76,65	74,11	3,43%
Riau	73,64	75,66	-2,67%
Bengkulu	73,23	72,73	0,69%

³ <https://lampung.bps.go.id/id/news/2024/02/05/254/ekonomi-lampung-tumbuh-4-55-di-tahun-2023-tertinggi-pasca-pandemi.html>

⁴ menaikan skor IDI provinsi Lampung tahun 2023 <https://www.rri.co.id/daerah/477824/pemprov-lampung-berupaya-tingkatkan-indeks-demokrasi-indonesia>

pertumbuhan ekonomi. Untuk tahun 2023 ini ekonomi Provinsi Lampung tumbuh 5,40 poin, berada pada rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia dan di atas perekonomian di Pulau Sumatera. Capaian ini merupakan kondisi perekonomian Lampung tertinggi, setelah pandemi covid19.

Gambar 10. Pertumbuhan ekonomi Lampung, 2023

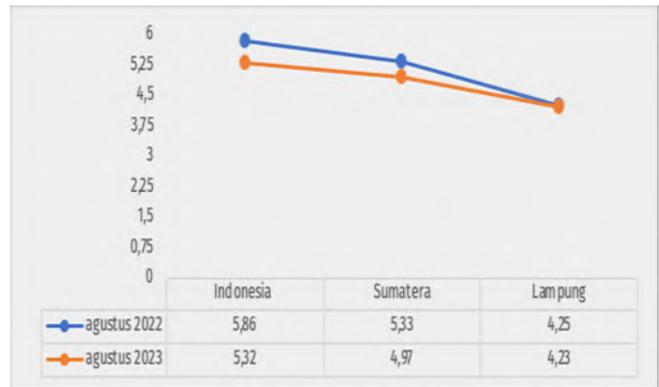


Hal ini dapat dilihat pada informasi pada **Gambar 10**. Kemudian untuk profil kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2023, juga mengalami penurunan, keadaan ini menunjukkan bahwa program pembangunan yang dilaksanakan, terutama program

pembangunan menurunkan kemiskinan, memberikan hasil yang positif. Sedangkan di sisi lain terkait keadaan tingkat pengangguran terbuka (**Gambar 11**) yang menggambarkan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, diperoleh informasi bahwa TPT tahun 2023 turun sebesar 0,02 digit dibanding tahun 2022 atau turun dari skor 4,25 menjadi 4,23.

Kemudian apabila dibandingkan dengan TPT rata-rata di Pulau Sumatera dan tingkat nasional, maka TPT Provinsi Lampung memiliki skor yang lebih kecil. Kita ketahui bersama, bahwa pengangguran terbuka sering kali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran terbuka, akan mempengaruhi dalam

Gambar 11. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 2023



perhitungan produktivitas dan pendapatan masyarakat, yang akan berkurang, sehingga berdampak pada timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Memang secara umum di negara Indonesia sampai dengan saat belum bisa terlepas dari pengangguran terbuka, oleh karena itu menjadi salah satu bagian masalah yang dihadapi pemerintahan setiap periodenya. Dengan demikian situasi ekonomi yang stabil merupakan salah satu tujuan dari pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terciptanya stabilitas nasional, iklim investasi akan baik, pertumbuhan

ekonomi yang tinggi akan terwujud, dan angka pengangguran terbuka dapat ditekan.

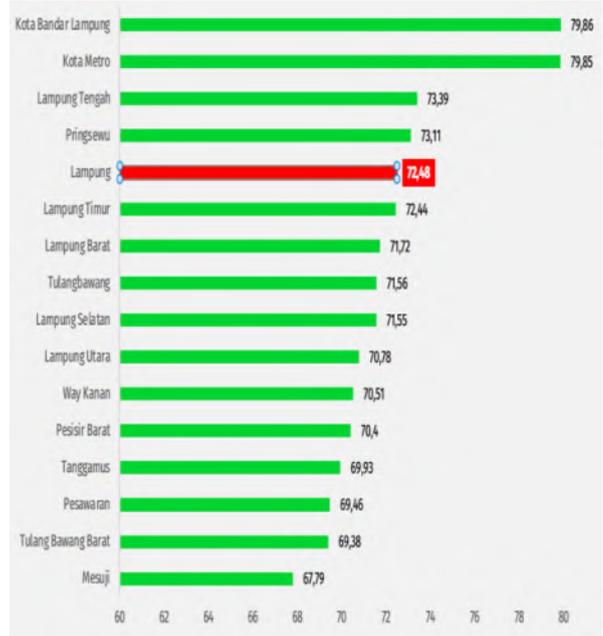
Gambar 12. Perkembangan IPM, 2023



Kembali pada korelasi situasi kamtibmas dengan hasil program pembangunan lainnya adalah mengenai dinamika pembangunan manusia Provinsi Lampung tahun 2023, dengan indikatornya indeks pembangunan manusia (IPM). Hasil IPM provinsi Lampung (**Gambar 12**)

menunjukkan skor meningkat dibandingkan TAB-1. Nilai IPM Provinsi Lampung naik dari 71,79 menjadi 72,48. Kita ketahui bersama bahwa status pencapaian pembangunan manusia dibagi menjadi 4 kategori, yaitu rendah (skor di bawah 60), sedang (skor 60-70), tinggi (70-80), sangat tinggi (lebih dari 80). Berdasarkan hal tersebut, maka status IPM Provinsi Lampung masuk ke dalam kategori skor tinggi. Oleh karena itu IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM juga bisa menentukan peringkat atau level pembangunan pada suatu wilayah atau suatu negara. Pada **Gambar 13** di atas menyajikan skor IPM pada Kabupaten-Kota di Provinsi Lampung. Terdapat skor IPM kabupaten-kota yang posisinya di atas skor IPM provinsi Lampung, yakni IPM pada Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Pringsewu. Sementara itu terdapat sebelas kabupaten dibawah skor IPM Provinsi Lampung, masing dengan terdiri dari kategori tinggi sama dengan IPM Provinsi sebanyak tujuh kabupaten dan empat Kabupaten dengan kategori sedang (60-70).

Gambar 13. Skor IPM pada kabupaten-kota, 2023



IPM ini dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun

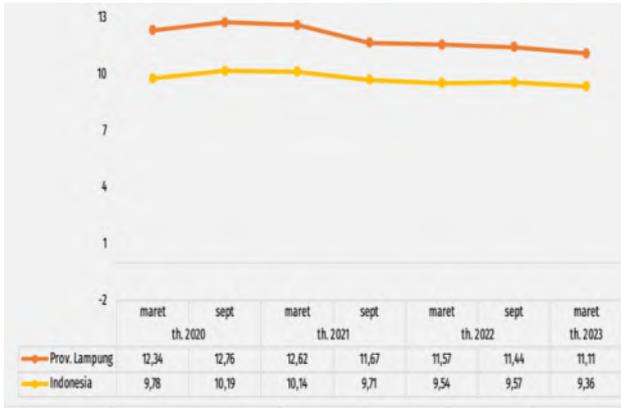
Gambar 14. Skor Gini Ratio kabupaten-kota, 2023



untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per-kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Dan kesemua dimensi tersebut akan berkait dan mempengaruhi terhadap situasi kamtibmas pada suatu wilayah. Keadaan ini menjadi paralel, rendahnya IPM akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan

tingginya jumlah penduduk miskin. Kemiskinan akan mempengaruhi terhadap situasi kamtibmas. Karena ketimpangan dalam hal ini mengenai ketidakmerataan pendapatan yang berpengaruh pada gini ratio (**Gambar 14**). Gini ratio adalah instrumen untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara relatif antar penduduk suatu wilayah, Nilai koefisien Gini berkisar antara 0 (sangat merata) sampai dengan 1 (sangat timpang). Adapun faktor penyebab yang menjadi ketimpangan tersebut antara lain perbedaan kondisi demografi, kondisi Pendidikan yang tidak merata, kurangnya lapangan kerja dan perbedaan status sosial di masyarakat. Gini Ratio di wilayah Lampung berkisar antara 0,256-0,381. Ketimpangan pendapatan masyarakat dikatakan rendah apabila koefisien Gini dibawah 0,3. Ketimpangan pendapatan masyarakat berada pada tahap sedang, apabila koefisien Gini berada pada rentang 0,3 sampai dengan 0,5.

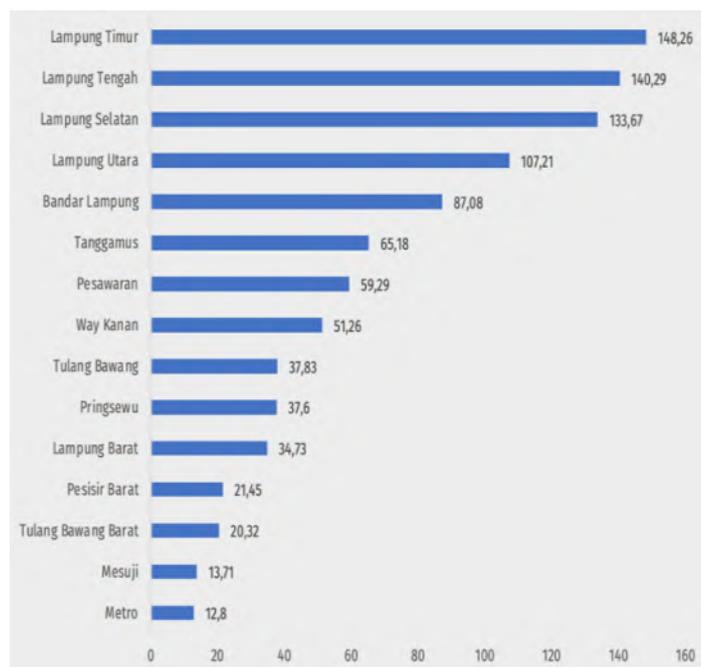
Gambar 15. Kemiskinan provinsi Lampung, 2023



berlanjut pada tingkat kemiskinan Provinsi Lampung menurut data yang dirilis BPS periode Maret 2023 (**Gambar 15**) berada pada angka persentase 11,11 menurun apabila dibandingkan periode September 2022 yang jatuh pada angka 11,44, dengan poin angka turun 0,33 digit. Dan apabila dibandingkan dengan nasional masih diatas rata-rata nasional pada angka 9,36. Kemudian apabila melihat dari sebaran jumlah penduduk miskin pada kabupaten-kota di Provinsi Lampung (**Gambar 16**), maka jumlah terbesar penduduk miskin yang di atas 100.000 penduduk adalah terdapat pada empat kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Utara.

Oleh karena itu pengelolaan kamtibmas yang tepat, akan membawa pada situasi yang kondusif bagi pembangunan khususnya di wilayah Lampung dan umumnya di Indonesia. Mengakhiri tahun ke-empat dari Renstra 2020-2024, Polda Lampung dan jajaran telah berupaya mewujudkan amanat visi dan misi pemerintahan Presiden Joko Widodo, dengan merealisasi kinerja indeks kamtimas tahun 2023 dengan nilai indek 3,91 **melebihi dari target nasional pada angka indeks 3,3 sehingga capaian**

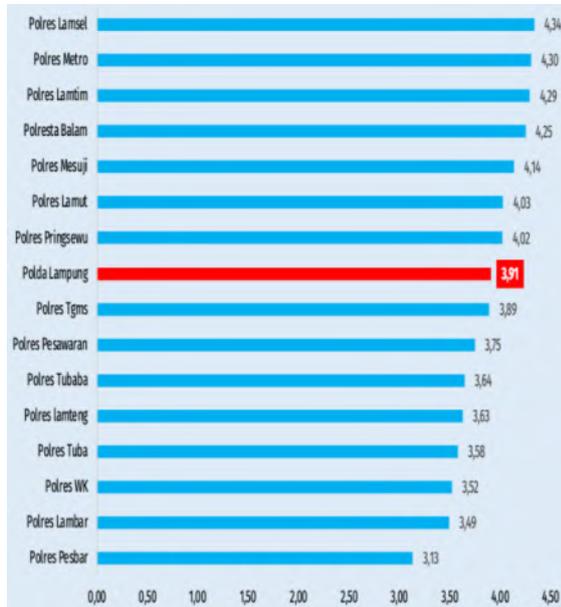
Gambar 16. Jumlah penduduk miskin kabupten-kota, 2023 (dlm ribu)



kinerja indeks kamtibmas di wilayah Lampung saat ini adalah sebesar 114,98%.

Sebaran indeks kamtibmas (**Gambar 17**) juga didukung oleh pengelolaan kamtibmas pada lima belas Polres yang berada daerah hukum Polda Lampung. Adapun nilai indeks kamtibmas Polres yang berada di atas Polda Lampung atau level kinerja $4 \leq \text{indek} \leq 4,5$ adalah sebanyak tujuh Polres, masing-masing Polres Lampung Selatan, Metro, Lampung Timur, Polresta Bandar Lampung, Polres Mesuji, Lampung Utara dan Polres Pringsewu. Secara umum perkembangan situasi kamtibmas di daerah hukum Polda Lampung memberikan kontribusi bagi kondusivitas pembangunan.

Gambar 17. Sebaran indeks kamtibmas, 2023



Internal Process Perspective

1. Sasaran Strategis (SS-1). Harkamtibmas yang partisipatif.

Sasaran Strategis (SS-1) Harkamtibmas yang partisipatif, memiliki satu IKU yaitu Indeks pemeliharaan kamtibmas, sasaran kinerja ini merupakan sasaran yang ingin dihasilkan oleh Polda Lampung dalam menciptakan kondusivitas daerah hukumnya melalui pemeliharaan kamtibmas yang partisipatif sepanjang Renstra 2020-2024 melalui pendekatan kamseltibcar lalu lintas, kegiatan community policing, pemenuhan kegiatan patroli, termasuk kegiatan harkamtibmas perairan yang khas, kualitas penanggulangan keamanan berkadar tinggi, pengeolaan antisipasi potensi gangguan, pelayanan pengamanan objek vital dan pengelolaan tingkat kriminalitas pada 10.000 penduduk. Selanjutnya hasil capaian kinerja pada indikator kinerja pada sasaran strategis ini dijelaskan sebagai berikut:

IKU-1 Indeks pemeliharaan kamtibmas.

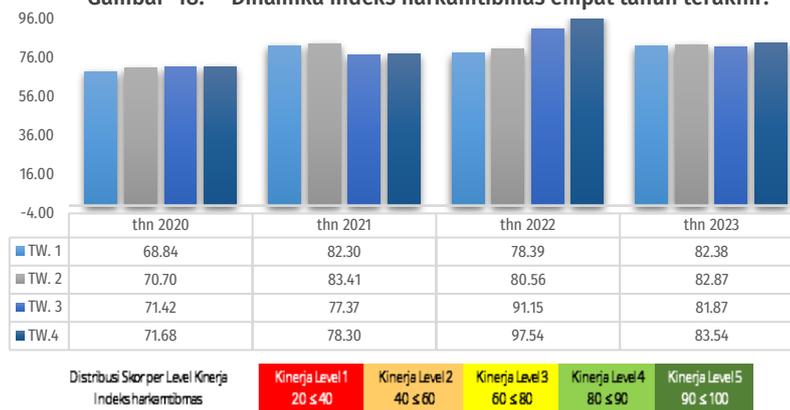
Pada indikator kinerja ini, penilaiannya didasari pada ukuran capaian kinerja yang disepakati Polda Lampung dalam memelihara kamtibmas dengan serangkaian pengelolaan sumber daya pencegahan terhadap gangguan kamtibmas ketertiban masyarakat, melalui perhitungan komposit dari delapan komponen yakni; road savety index, Index community policing, persentase pemenuhan kegiatan patroli, persentase pemenuhan aktivitas harkamtibmas perairan, kualitas penanggulangan keamanan berkadar tinggi, persentase antisipasi potensi gangguan, persentasi pelayanan pengamanan objek vital dan crime rate. Adapun analisis dan evaluasi capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 8. Analisa dan evaluasi capaian kinerja IKU Indeks pemeliharaan kamtibmas yang partisipatif.

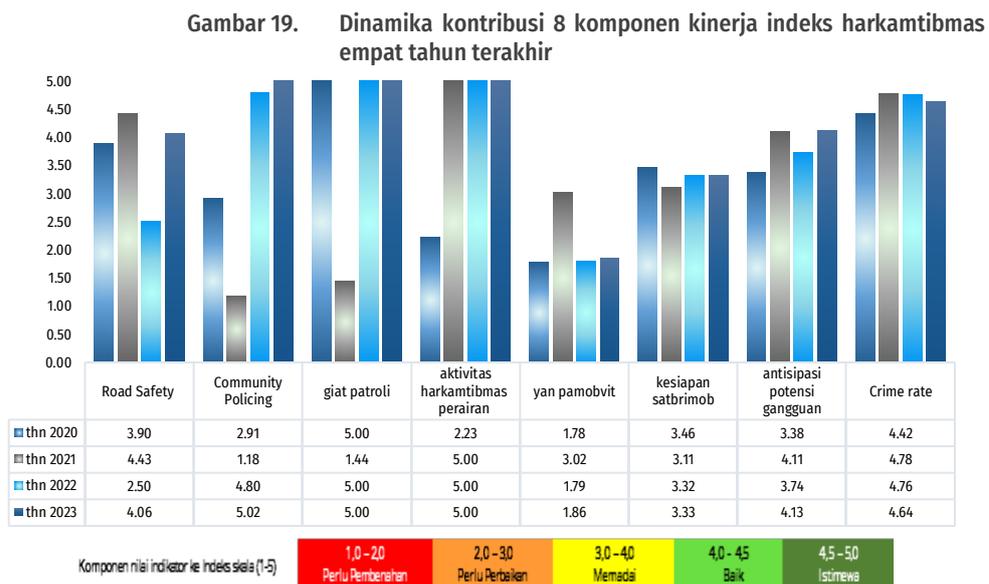
SS, Pemeliharaan kamtibmas yang partisipatif											
IKU, Indeks pemeliharaan keamanan dan ketertiban											
Realisasi 2020-2022				Tahun 2023			Renstra Polda Lampung 2020-2024				
Triwulan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	realisasi	target	% capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2024	% capaian target 2024	Target nasional	% capaian target nasional
I	68,84	82,30	78,39	82,38	74	111,32%	5,09%	75	109,84%	65	120,00%
II	70,70	83,41	80,56	82,87	74	111,99%	2,87%	75	110,49%	65	120,00%
III	71,42	77,37	91,15	81,87	74	110,64%	-10,18%	75	109,16%	65	120,00%
IV	71,68	78,30	97,54	83,54	74	112,89%	-14,35%	75	111,39%	65	120,00%

Apabila melihat realisasi tahun 2023, maka target kinerja pemeliharaan kamtibmas tercapai 112,89%, dan apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja TAB-1, maka mengalami penurunan sebesar 14,35%. Selanjutnya dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024, maka capaian kinerjanya masih di atas 100%. **Demikian juga apabila dibanding dengan target nasional pada angka 65, maka capaiannya masih di atas 100%.** Artinya kinerja yang telah dilaksanakan pada TAB berhasil mencapai target, dan tentunya apabila memandang tantangan tugas untuk masa yang akan datang yang penuh dengan dinamika, maka masih tetap perlu akselerasi performa kinerja yang diiringi dengan usaha dan kreativitas untuk mempertahankan dan menjaga kualitas dan kuantitas pelaksanaan tupoksi dalam mendukung kinerja yang diukur melalui **IKU₁ Indeks Harkamtibmas**. Secara umum beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dalam pemeliharaan kamtibmas yang partisipatif ini adalah fungsi lalu lintas dapat menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas sehingga berpengaruh terhadap *road safety index*, kegiatan *community policing* yang terselenggara selama TAB 2023 memberikan peran aktif masyarakat berpartisipasi dalam harkamtibmas di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing, kegiatan patroli sabhara dapat menekan daerah rawan gangguan kamtibmas, demikian pula aktivitas kegiatan kepolisian perairan secara preemtif dan preventif dapat melindungi, mengayomi masyarakat perairan. Pelayanan pengaman objek vital dapat diselenggarakan di samping dalam upaya meningkatkan PNBK, juga peran fungsi intelkam dalam memberikan informasi terkait kegiatan deteksi aksi yang harus diselenggarakan oleh fungsi kepolisian lainnya, termasuk memberikan masukan kepada stakeholder dalam mencapai tujuan pembangunan. Selanjutnya penyelenggaraan operasi kepolisian membantu dalam upaya menurunkan korban dari pelaku tindak pidana. Berikut ini gambaran dinamika kinerja indeks harkamtibmas per triwulan dalam empat tahun terakhir:

Gambar 18. Dinamika indeks harkamtibmas empat tahun terakhir.



Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan indeks harkamtibmas setiap triwulan berada pada level kinerja 60-97 yaitu pada rentang level kinerja 3-5 pada *skala likert*. Keberhasilan dari kinerja ini, menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023, kegiatan preemtif dan preventif yang diselenggarakan fungsi lalu lintas, Binmas, Samapta, Polairud, Pamobvit, dan fungsi Intelkam, serta fungsi Brimob dan pelaksanaan operasi kepolisian secara komplemen memberikan kontribusi terhadap terwujudnya pemeliharaan situasi kamtibmas yang partisipatif. Selanjutnya untuk lebih detail analisis terhadap seberapa besar kontribusi kinerja yang diberikan dari **delapan komponen penyusun IKU-1 indeks harkamtibmas** dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sepanjang **tahun 2023** terdapat **satu komponen penyusun Indeks harkamtibmas yang memerlukan upaya pembenahan dan perbaikan**. Adapun komponen tersebut adalah kegiatan fungsi pamobvit pada komponen **pelayanan pengamanan objek vital** tahun 2023 masih belum beranjak untuk menunjukkan nilai kinerja terbaiknya, **fakta performa kinerja selama empat tahun terakhir menunjukkan fluktuatif, terdapat kecenderungan kinerja yang menurun**. Hal ini memerlukan upaya perbaikan, terutama adalah meningkatkan kegiatan audit pengamanan, guna mengajak para owner/pemangku kepentingan pada objek vital maupun objek tertentu untuk selalu memperhatikan aspek keamanan dalam aktivitas pada entitasnya. Hasil analisis faktor yang menjadi penyebab, diantaranya menyangkut belum tergalinya pemahaman implementasi dari Perpol Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perkap Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Obvitnas dan Objek Tertentu, baik pada internal maupun di kalangan pengelola obvit dan objek tertentu di daerah hukum Polda Lampung. Kemudian faktor yang lainnya, berupa keadaan pengelola tupoksi fungsi pamobvit pada satuan Polres jajaran Polda Lampung, masih dalam bentuk unit organisasi di bawah Satsabhara yang dihadapkan pada tantangan tugas berupa situasi lingkungan strategis yang sedang dan akan terus berkembang. Sehingga memerlukan **upaya pembenahan** secara spesifik, berupa optimalisasi manajemen sistem pengamanan obvitnas dan objek tertentu, dengan latar belakang telah tergelarnya *baseline* pemetaan obvit dan objek tertentu yang

belum diberdayakan secara efektif. Kemudian upaya pembenahan secara umum adalah dengan meningkatkan tupoksi fungsi pamobvit pada satuan Polres, melalui penguatan kelembagaan, dengan mengkaji terhadap pembentukan Satpamobvit Polres sebagaimana amanat dari Perkap Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Organisasi tertentu pada kesatuan kewilayahan. Selanjutnya didukung pula dengan upaya optimalisasi SOTK fungsi pamobvit melalui internalisasi proses penyusunan MoU dan pedoman kerja sama dalam sistem manajemen pengamanan sebagaimana ketentuan pada Perkap Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Polri yang dilakukan oleh fungsi Bidkum dan Roops. Fokus upaya lainnya adalah dengan menajamkan tupoksi Pamobvit dalam mengimplementasi Perpol 3 Tahun 2019 dengan menyusun manual organisasi/proses bisnis dalam pelayanan pengamanan obvit dan objek tertentu, guna memudahkan dalam menjabarkan Perpol Nomor 3 Tahun 2019 baik dalam sistem, proses dan prosedur kerja menjadi lebih jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Kemudian apabila melihat komponen *road savety* tahun 2023 mengalami upaya perbaikan dari tahun sebelumnya Adapun faktor pendukung dari hal ini yaitu menurunnya tingkat fatalitas korban meninggal dunia akibat laka lantas baik ditinjau aspek per 100.000 penduduk atau per 10.000 kendaraan menunjukkan tren penurunan dibandingkan dengan TAB-1. Dapat dilihat dari data dibawah ini:

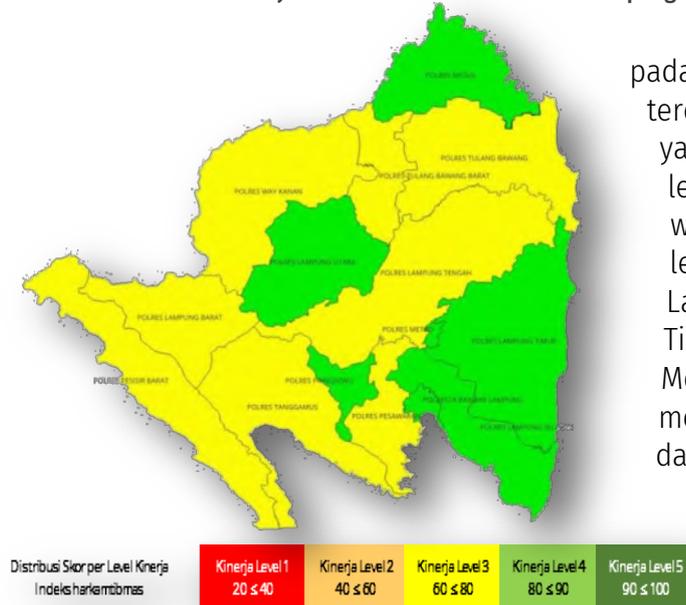
Tabel 9. Tren vatalitas kecelakaan lalu lintas 2022-2023

	2022	2022	tren
Jumlah korban laka meninggal dunia	737	657	turun 10,73%
Jumlah kendaraan	3.626.796	4037912	naik 11,34%
Jumlah penduduk	8.901.566	9176549	naik 3,09%

Berdasarkan data tersebut di atas, maka jumlah korban meninggal dunia tahun 2022 menunjukkan tren penurunan sebesar 10,73% dari tahun 2022, sementara itu juga jumlah kendaraan 2023 naik sebanyak 11,34% dan jumlah penduduk naik sebesar 3,09%. Berdasarkan fakta data tersebut, diperlukan langkah dan upaya konstruktif untuk menjaga kenaikan tingkat fatalitas korban kecelakaan terutama menurunkan korban meninggal dunia. **Langkah dan upaya kamseltibcarlantas;** dimulai dari kegiatan jangka pendek melalui revitalisasi kegiatan rutin kamseltibcarlantas yakni turjawali penerangan lantas, dikmas lantas. Kemudian jangka menengah melalui penyelenggaraan kegiatan kerja sama, rapat koordinasi lintas sektoral terkait kamseltibcar lantas, muatan pendidikan tertib lalu lintas pada berbagai lembaga pendidikan formal, dan langkah jangka panjang berupa peninjauan terhadap regulasi di bidang lalu lintas pada skala daerah hukum Polda Lampung atau pun menginisiasi/memberi masukan terhadap regulasi terkait kamseltibcarlantas di Provinsi Lampung dalam rangka menekan fatalitas korban meninggal dunia. Membentuk forum bersama dengan pemerintahan daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat peduli lalu lintas menyelenggarakan kegiatan pembinaan

lalu lintas dan angkutan jalan mulai dari pembinaan pada tahapan perencanaan; pengaturan; pengendalian; dan pengawasan penyelenggaraan kamseltibcarlantas. Selanjutnya untuk melihat pemetaan terhadap kinerja harkamtibmas TAB 2023 berdasarkan ekspektasi spektrum warna pada daerah hukum satuan Polres jajaran Polda Lampung sebagai berikut:

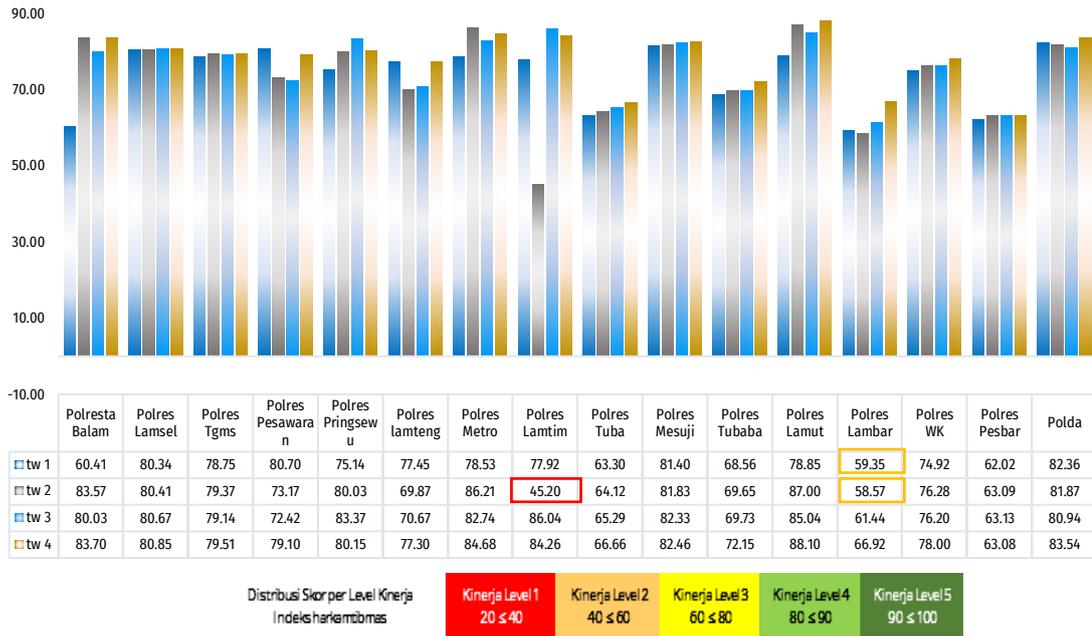
Gambar 20. Sebaran kinerja indeks harkamtibmas Polda Lampung T.A. 2023



Terlihat hampir berimbang spektrum warna kuning dan hijau muda pada peta daerah hukum Polda Lampung, terdapat delapan Polres berwarna kuning yang menunjukkan kinerja harkamtibmas level 3, kemudian terdapat tujuh Polres warna hijau muda yang menunjukkan kinerja level 4, yaitu pada Polresta Bandar Lampung, Polres Lampung Selatan, Lampung Timur, Pringsewu, Lampung Utara dan Mesuji. Secara umum faktor yang mempengaruhi terhadap **keberhasilan** dalam pengelolaan harkamtibmas ini adalah keterpaduan dari penyelenggaraan dinamika operasional kepolisian; mulai dari pengelolaan komponen indeks harkamtibmas yang meliputi delapan komponen pendukung mulai dari pengelolaan

kamseltibcar lantas, pengelolaan kegiatan *community policing*, pengelolaan kegiatan patroli pada daerah rawan, pengelolaan antisipasi terhadap potensi gangguan, pengelolaan harkamtibmas perairan, pengelolaan pelayanan pengamanan obvit dan objek tertentu, pengelolaan kualitas kekuatan Brimob dan pengelolaan operasi kepolisian serta pengelolaan dimensi penegakan hukum, yang berupaya untuk mewujudkan transparansi penyidikan yang berkeadilan. Di samping itu peran aktif penyelenggaraan kerjasama harkamtibmas guna menumbuhkan kesadaran, kepedulian dan wawasan masyarakat terhadap kamtibmas setempat. Kemudian konsisten dan secara berkelanjutan mendukung untuk mengoptimalkan sinergitas Polda Lampung dengan program-program pembangunan baik pemerintahan pusat maupun daerah. Melalui peningkatan kualitas terhadap harmonisasi kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan masyarakat di provinsi Lampung. Selanjutnya untuk mengetahui dan analisis terhadap pendukung **IKU-1** ini, dapat dijelaskan pada dinamika kinerja indeks harkamtibmas pada 15 Polres setiap triwulan, pada gambar berikut ini:

Gambar 21. Dinamika Indeks harkamtibmas pada 15 Polres



Dari 15 satuan Polres yang ada, pada **triwulan I** terdapat satu daerah hukum Polres yang berada pada **kinerja level 2 yakni Polres Lampung Barat**, sedangkan **Polres lainnya berada pada kinerja level 3-4**. Memasuki **triwulan II kinerja level 2** terdapat pada Polres Lampung Timur dan Polres Lampung Barat, sedangkan Polres lainnya berada pada **kinerja level 3 dan 4**. Pada **triwulan III – IV semua Polres berada pada kinerja level 3-4**. Secara umum mengakhiri tahun 2023 kinerja kegiatan harkamtibmas memberikan kontribusi positif baik terhadap pencapaian target indeks kamtibmas Polda Lampung maupun institusi Polri pada umumnya.

Sebagai *evidence* pada TAB 2023 Polda Lampung berhasil mengelola keamanan dan ketertiban, guna mendukung dan mengamankan program nasional, mulai dari tematik pengelolaan kemiskinan, ekonomi, pengangguran, pembangunan manusia, dengan kegiatan berpartisipasi dalam pengamanan pemberian bantuan tunai, pelibata personel dalam program menurunkan stunting, program keluarga harapan, program bantuan

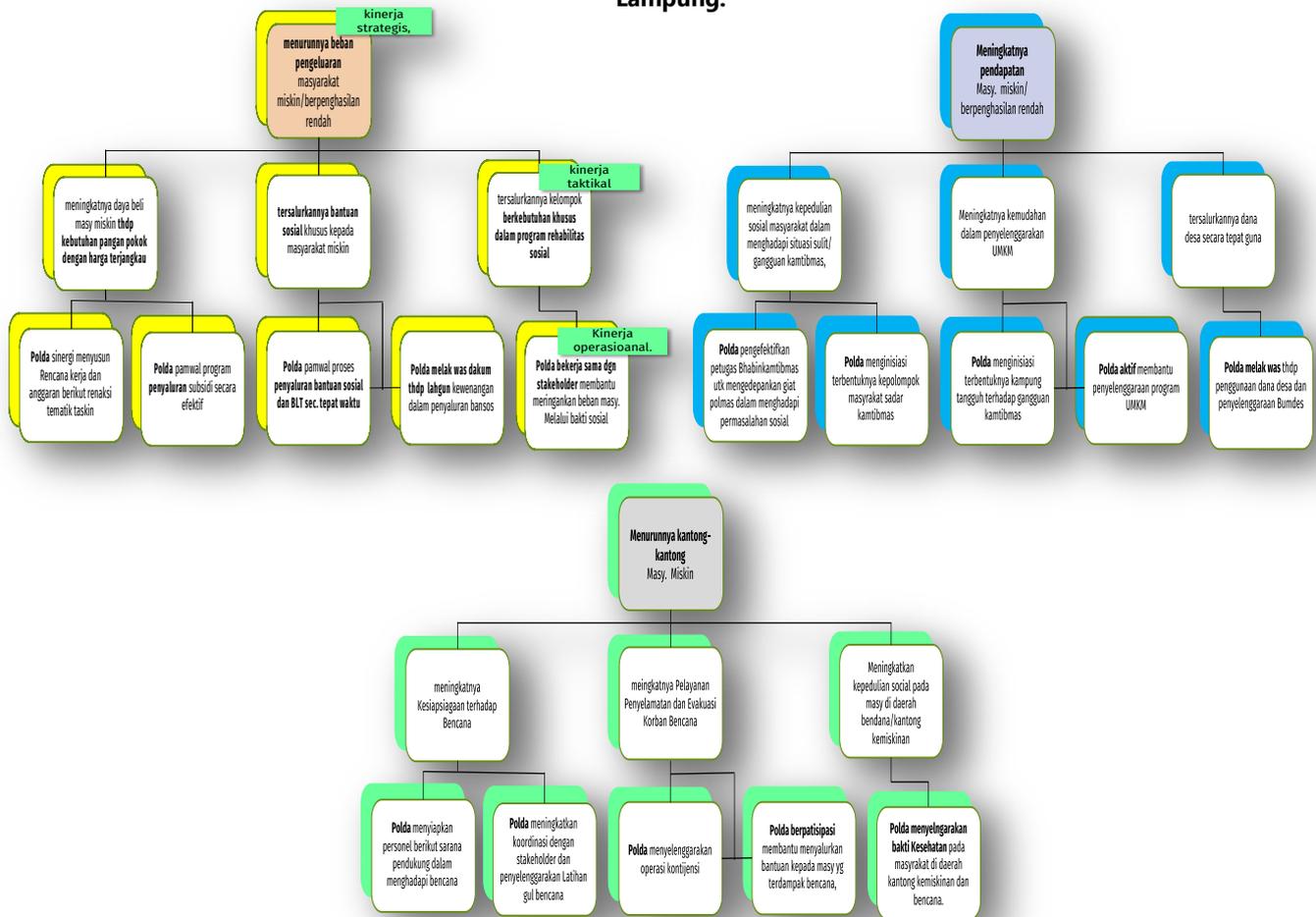
Gambar 22. Lensa kegiatan suport program pemerintah, 2023



dan ketertiban, guna mendukung dan mengamankan program nasional, mulai dari tematik pengelolaan kemiskinan, ekonomi, pengangguran, pembangunan manusia, dengan kegiatan berpartisipasi dalam pengamanan pemberian bantuan tunai, pelibata personel dalam program menurunkan stunting, program keluarga harapan, program bantuan

rumah tidak layak huni/bedah rumah, pengendalian inflasi, monitoring ketersediaan bahan pokok, pengamanan proyek infrastruktur, program indonesia pintar dan indonesia sehat. Termasuk implementasi dari inpres 4 tahun 2022 tentang mengetaskan kemiskinan ekstrim, dimana Polda Lampung mendukung dalam program mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapat, dan menurunkan kantong kemiskinan. Pada tahun 2023 berhasil menyusun kegiatan kepolisian yang mengacu pada kerangka berfikir logis (logical framework) pengentasan kemiskinan ekstrim, diantaranya skema *logical framework* (LFA) sebagai berikut:

Gambar 23. Konsepsi LFA pengentasan kemiskinan ekstrim Polda Lampung.



Logframe yang telah disusun ini setiap periode perlu ditajamkan kembali dengan terus digali dan diiringi dengan melakukan koordinasi, kolaborasi, sinkronisasi dengan pemerintahan provinsi maupun kabupaten-Kota, dalam upaya mengoptimalkan prinsip pembangunan tematik holistik, integratif dan spasial dengan menyelaraskan visi-misi, sasaran prioritas, kebijakan, sasaran strategis dan indikator kinerja berikut program anggaran dan kegiatan.

2. Sasaran Strategis (SS₂) Penegakan Hukum yang berkeadilan.

Sasaran Strategis (SS₁) Harkamtibmas yang partisipatif, memiliki satu IKU yaitu Indeks penegakan hukum, sasaran kinerja ini merupakan sasaran yang ingin dihasilkan oleh Polda Lampung dalam menciptakan kondusivitas daerah hukumnya melalui penegakan hukum yang partisipatif sepanjang Renstra 2020-2024 melalui pendekatan penyelesaian tindak pidana umum (konvensional), tindak pidana khusus (kekayaan negara), tindak pidana narkoba, tindak pidana kontijensi, tindak pidana perairan dan tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya hasil capaian kinerja pada indikator kinerja pada sasaran strategis ini dijelaskan sebagai berikut

IKU₂ Indeks penegakan hukum.

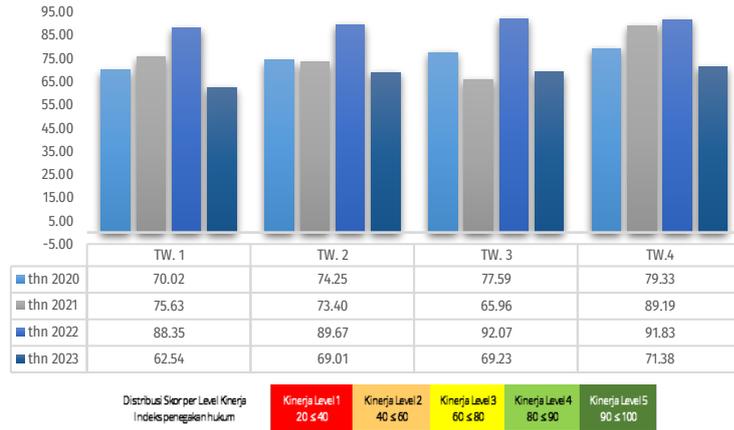
Pada indikator kinerja ini penilaian didasari pada penyelesaian tindak pidana pada setiap jenis tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polda Lampung (konvensional, transnasional, kekayaan negara dan tindak pidana yang berimplikasi kontijensi, penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dan tindak pidana perairan pada setiap TAB. Adapun hasil capaian kinerjanya sebagai berikut :

Tabel 10. Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKU Indeks penegakan hukum.

SS ₂ Penegakan hukum yang berkeadilan											
IKU ₂ Indeks penegakan hukum											
Triwulan	Realisasi 2020-2022			Tahun 2023			Renstra Polda Lampung 2020-2024				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	realisasi	target	% capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2024	% capaian target 2024	Target nasional	% capaian target nasional
I	70,02	75,63	88,35	62,54	69	90,64%	-29,21%	70	89,35%	65	96,22%
II	74,25	73,40	89,67	69,01	69	100,02%	-23,03%	70	98,59%	65	106,18%
III	65,96	77,59	92,07	69,23	69	100,34%	-24,80%	70	98,90%	65	106,51%
IV	79,33	89,19	91,83	71,38	69	103,45%	-22,27%	70	101,98%	65	109,82%

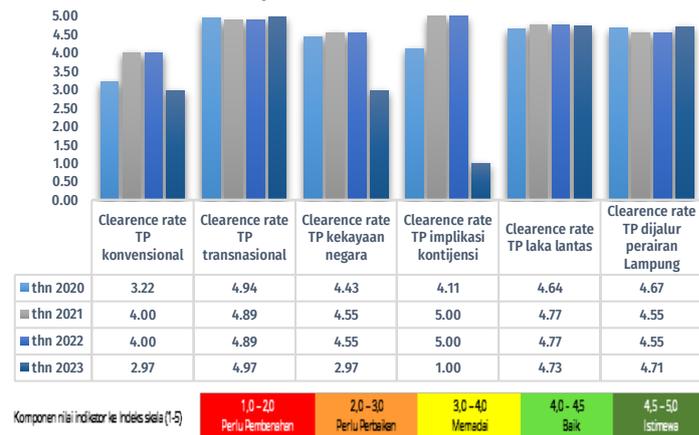
Apabila dilihat dari realisasi TAB 2023, maka capaian indeks penegakan hukum pada target TAB 2023 tercapai 103,45%, mengalami penurunan kinerja sebesar 22,27% dari TAB-1. Sedangkan **apabila dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 dan target nasional, maka capaiannya masih di atas 100%**. Artinya level kinerja penegakan hukum pada TAB+1 tetap perlu terus dipertahankan, guna menghadapi kinerja pada Renstra 2025-2029. Secara umum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kinerja Indeks penegakan hukum yang menunjukkan fakta, bahwa sepanjang tahun 2023, kegiatan penyelesaian tindak pidana; mulai dari penyelesaian tindak pidana konvensional, transnasional, kekayaan negara, laka lintas dan penyelesaian tindak pidana perairan yang diselenggarakan fungsi reskrim, reskrimsus, resnarkoba, gakkum lintas dan fungsi gakkum polairud, secara komplementer berkontribusi menyelesaikan tindak pidana yang terjadi di Polda Lampung dan jajaran sesuai dengan target yang telah ditentukan dalam Renstra Polda Lampung 2020-2024. Berikut ini gambaran dinamika kinerja indeks penegakan hukum per-triwulan dalam empat tahun terakhir berdasarkan skala likert 1-5 sebagai berikut:

Gambar 24. Dinamika indeks penegakan hukum empat tahun terakhir.



Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan indeks penegakan hukum setiap triwulan dalam empat tahun terakhir ini, berada pada level kinerja 60-90, yaitu pada rentang level kinerja 3-5 pada skala likert. Pada tahun 2020 dan 2022 menunjukkan dinamika kinerja penegakan hukum terus mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2023 terjadi penurunan kinerja dari triwulan I – IV, walaupun masih dalam kategori aman, karena target kinerja tercapai. Demikian juga dibandingkan dengan target 2024 dan target nasional, capaiannya masih di atas 100%. Secara umum keberhasilan dari kinerja ini, menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023, kegiatan penegakan hukum yang diselenggarakan fungsi reserse baik reskrimum, reskrimsus, resnarkoba, gakkum lantass maupun gakkum polairud secara komplementer memberikan kontribusi terhadap terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan. Selanjutnya untuk mengetahui lebih detailnya, sampai sejauh mana kontribusi enam komponen penyusun IKU2 indeks penegakan hukum pada empat tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini:

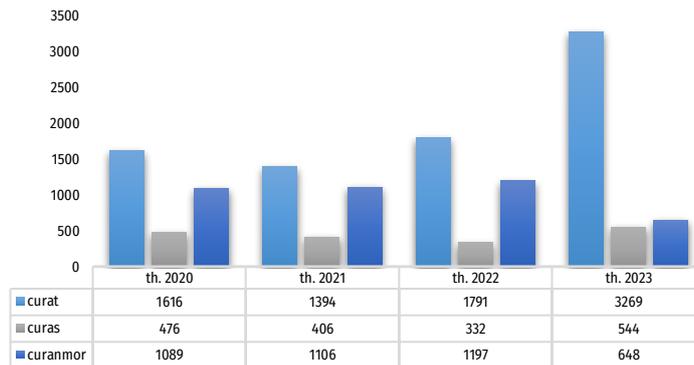
Gambar 25. Perkembangan kontribusi 6 komponen kinerja indeks gakkum dalam empat tahun terakhir



Sepanjang tahun 2023 terdapat kinerja enam komponen penyusun penegakan hukum pada komponen penyelesaian TP kontijensi dengan nilai indeksnya konversinya 1 karena pada tahun 2023 tidak terjadi TP kontijensi, akan tetapi enam komponen penyusun indeks gakkum tetap dapat mencapai target. Terhadap semua komponen kinerja penyelesaian tindak pidana secara umum dapat mencapai target yang telah disepakati pada Renstra 2020-2024. Adapun faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan kinerja penegakan hukum

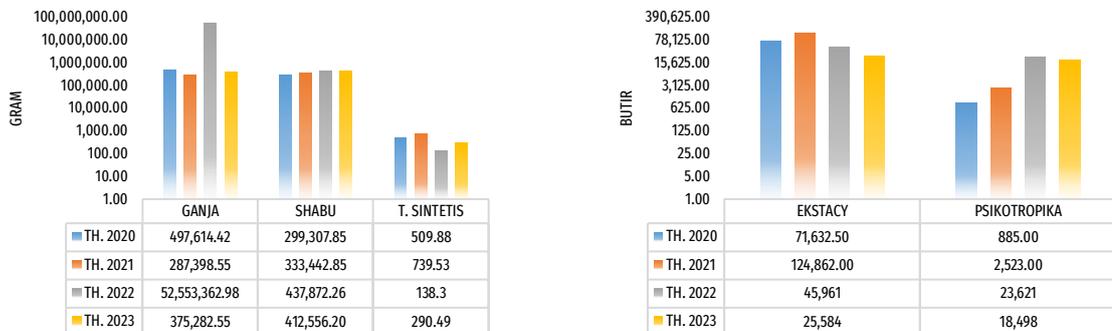
sampai dengan saat ini, adalah upaya kerja keras dari jajaran fungsi reskrim, lalu lintas dan kepolisian perairan baik di Polda maupun Polres dan Polsek yang berupaya meningkatkan kegiatan pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana, guna memenuhi harapan akan rasa adil serta meraih kepercayaan dan ekspektasi khususnya masyarakat/pelapor yang menjadi korban atas perbuatan jahat/tindak pidana yang dilakukan pelaku. Sebagai *evidence* kinerja pada TAB 2023 Polda Lampung berhasil mengungkap kasus yang menjadi perhatian publik atau kasus menonjol mulai dari curat curas dan curanmor sebagai berikut:

Gambar 26. Dinamika kasus menonjol empat tahun terakhir.



Dari kasus menonjol ini kasus pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan mengalami kenaikan masing-masing sebesar 82,52% dan kasus curas menurun sebesar 18,23% dan 63,86%, sedangkan kasus pencurian kendaraan bermotor turun sebesar 45,86%. Berlanjut pada penanggulangan narkoba perkembangan tahun 2023 sebagai berikut:

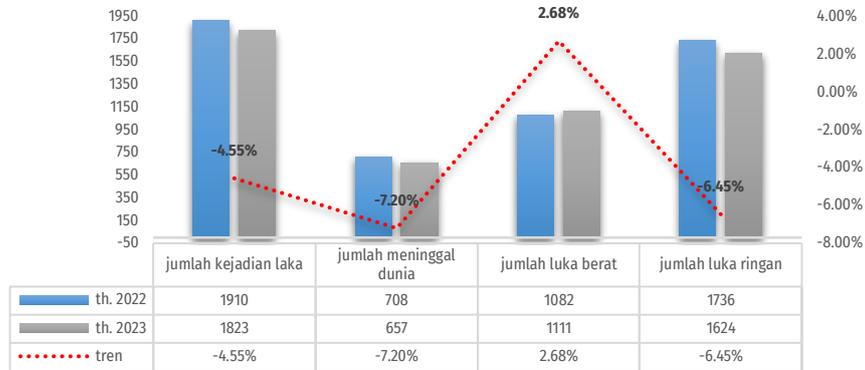
Gambar 27. Dinamika kasus penyalahgunaan narkoba empat tahun terakhir.



Barang bukti hasil pengungkapan kasus ganja, shabu dan tembakau sintetis menurun, dibanding tahun 2022. Sedangkan untuk barang bukti ekstasi dan psikotropika juga menurun dibanding tahun 2022. Selanjutnya mengenai dukungan terhadap proyek strategis nasional yang berada di Provinsi Lampung, yaitu pengungkapan kasus tindak pidana korupsi pada pembangunan bendungan Marga Tiga Kec.Sekampung Kabupaten Lampung Timur, dengan objek dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan genangan bendungan pada 299 bidang lahan yang terdiri atas tanam tumbuh, bangunan, kolam dan ikan senilai Rp.79.546.673.464,- tepatnya di Desa Trimulyo dengan status ada yang sudah dan akan dilakukan pembayaran ganti kerugian yang dalam prosesnya terdapat *mark up* harga dan/atau harga fiktif, yang dalam proses dan setelah penetapan lokasi dengan jumlah, terdapat selisih pembayaran ganti

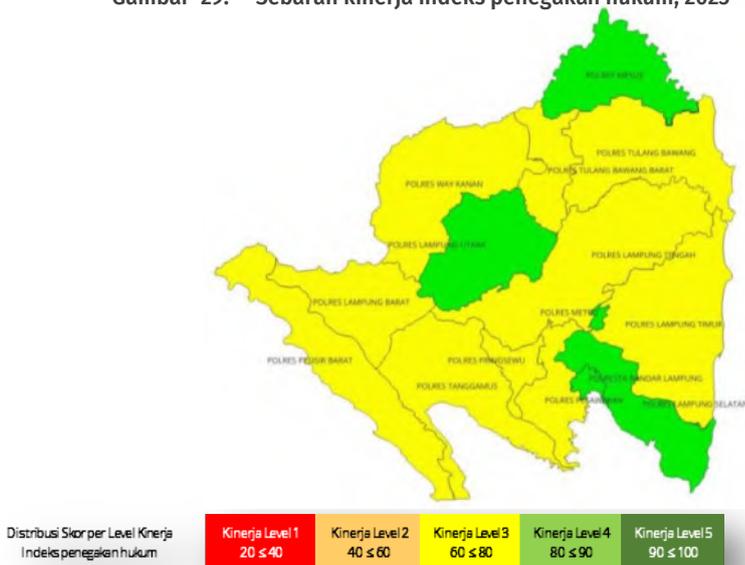
kerugian yang berpotensi pada kerugian negara sebesar Rp.50.411.095.236,-. Posisi kasus tersebut telah dilimpahkan ke JPU. Kemudian kembali ke skema dinamika penanganan kasus kecelakaan lalu lintas selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 28. Dinamika penanganan kasus laka lintas, 2023



Dalam penanganan kasus laka lintas terdapat informasi bahwa pada tahun 2023 tren jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas menurun sebesar 4,55%, dan diikuti pula dengan menurunnya korban meninggal dunia sebesar 7,20% serta luka ringan sebesar 6,45%, sedangkan korban luka berat naik sebesar 2,68%. Secara keseluruhan upaya kegiatan fungsi lalu lintas dalam mengelola keamanan dan keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dapat menunjukkan hasil yang signifikan dengan menurunnya kejadian laka maupun korban laka, terutama korban meninggal dunia, karena hal ini akan berdampak pada kinerja komponen **IKU, indeks harkamtibmas, yaitu road safety index**. Poin penting lainnya adalah mengenai sebaran kinerja penegakan hukum yang berkeadilan, dapat tergambar dengan spektrum warna indikator kinerja Indeks penegakan hukum mulai dari spektrum warna merah, nila, kuning hijau muda dan hijau, seperti gambar peta daerah hukum Lampung berikut ini.

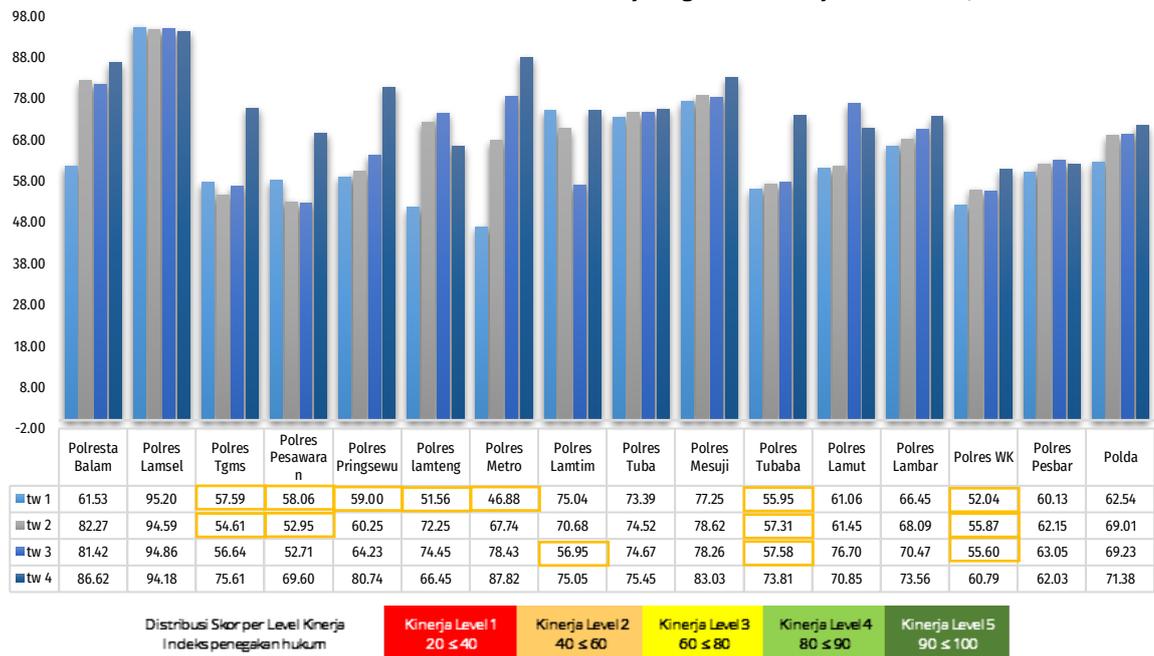
Gambar 29. Sebaran kinerja indeks penegakan hukum, 2023



Terlihat daerah hukum Polda Lampung didominasi oleh warna kuning, hal ini menunjukkan bahwa kinerja penegakan hukum berada pada kinerja level 3, artinya ekspektasi indeks gakkum pada hampir semua kewilayahan Polres jajaran Polda Lampung rata-rata berada pada interval angka indeks 60-80. Kecuali daerah hukum Polresta Bandar Lampung, Polres Lampung Selatan, Lampung Utara dan Mesuji berwarna hijau muda, hal ini menunjukkan level kinerja 4 dengan internal angka indeks pada 80-90. Kinerja ini berhubungan dengan pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana/laka lintas yang dilakukan oleh fungsi Reskrim, Polairud dan Lintas pada 15 Polres jajaran Polda Lampung.

Secara umum faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan terhadap pengelolaan penegakan hukum ini adalah adanya upaya fungsi reskrim jajaran Polda Lampung yang berusaha untuk mengakselerasi pengungkapan, di samping adanya keterpaduan dari penyelenggaraan dinamika operasional kepolisian; mulai dari pengelolaan komponen indeks harkamtibmas yang meliputi delapan komponen pendukung mulai dari pengelolaan kamseltibcar lantas, pengelolaan kegiatan *community policing*, pengelolaan kegiatan patroli pada daerah rawan, pengelolaan antisipasi terhadap potensi gangguan, pengelolaan harkamtibmas perairan, pengelolaan pelayanan pengamanan obvit dan objek tertentu, pengelolaan kualitas kekuatan Brimob dan pengelolaan operasi kepolisian serta pengelolaan dimensi penegakan hukum, yang berupaya untuk mewujudkan transparansi penyidikan yang berkeadilan. Di samping itu peran aktif penyelenggaraan kerjasama harkamtibmas guna menumbuhkan kesadaran, kepedulian dan wawasan masyarakat terhadap kamtibmas setempat. Kemudian konsisten dan secara berkelanjutan mendukung untuk mengoptimalkan sinergitas Polda Lampung dengan program-program pembangunan baik pemerintahan pusat maupun daerah. Melalui peningkatan kualitas terhadap harmonisasi kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan masyarakat di provinsi Lampung. Selanjutnya untuk mengetahui dan analisis terhadap pendukung IKU₁ ini, dapat dijelaskan pada dinamika kinerja indeks penegakan hukum pada 15 Polres setiap triwulan, seperti pada gambar berikut ini:

Gambar 30. Dinamika Indeks penegakan hukum pada 15 Polres, 2023



Dari 15 satuan Polres yang ada, pada triwulan I terdapat tujuh daerah hukum Polres yang berada pada kinerja level 2 yakni Polres Tanggamus, Pesawaran, Pringsewu, Lamteng, Metro, Tulang Bawang Barat dan Polres Way Kanan, sedangkan Polres lainnya berada pada kinerja level 3-4. Memasuki triwulan II kinerja level 2 terdapat pada empat Polres yaitu Polres Tanggamus, Pesawaran, Tulang Bawang Barat dan Polres Way Kanan, sedangkan Polres lainnya berada pada kinerja level 3-4 dan 5. Pada triwulan III kinerja level 2 terdapat pada Polres Lampung Timur dan Tulang Bawang Barat, sedang Polres lainnya pada kinerja level 3-4 dan 5. Memasuki kinerja triwulan IV semua

Polres sudah berada pada level kinerja 3-5. Secara umum mengakhiri tahun 2023 kinerja penegakan hukum memberikan kontribusi positif baik pada pencapaian indeks penegakan hukum Polda Lampung maupun institusi Polri.

Learn and growth perspective.

3. Sasaran Strategis (SS3). Sumber daya manusia yang profesional.

Sasaran ini memberikan gambaran tentang profesionalitas kinerja yang ingin diwujudkan melalui peningkatan kompetensi/kemampuan, yang tidak hanya sebatas memiliki keterampilan (*skill*) tetapi lebih dari pemahaman tupoksi secara mendetail, sehingga sumber daya manusia yang dimiliki Polda Lampung secara berkelanjutan dapat menguasai proses bisnis dan mampu mengetahui titik kelemahan organisasi dan cara mengatasinya. Hal ini ditujukan agar Polda Lampung secara optimal, efektif dan efisien memanfaatkan segenap sumber daya, terutama personel yang terbaik dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan serta sasaran strategis organisasi. Selanjutnya terhadap capaian indikator kinerja pendukung dapat dijelaskan sebagai berikut:

IKP₃ Indeks profesionalitas personel.

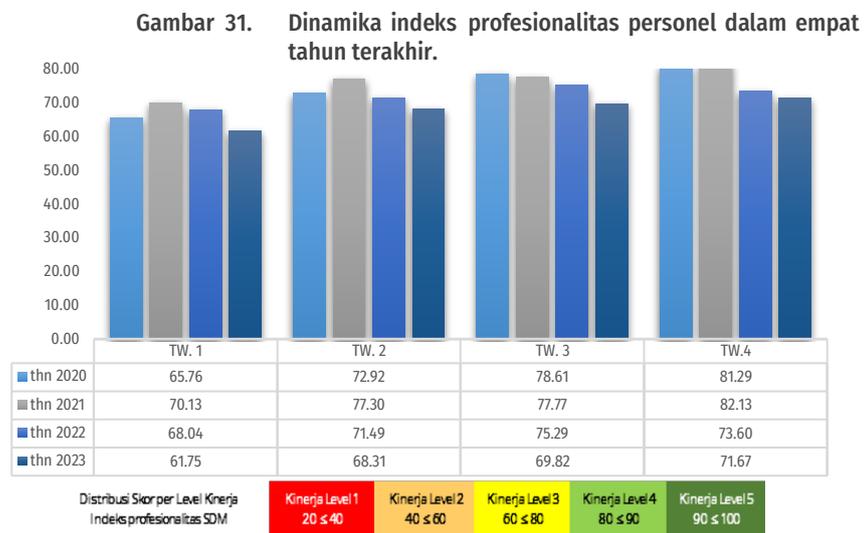
Pada indikator kinerja pendukung ini penilaian didasari pada dimensi pemenuhan kebutuhan personel, dimensi manajemen kompetensi yang dipersyaratkan untuk mengisi kompetensi jabatan yang dibutuhkan pada struktur organisasi melalui penyelenggaraan assessment center, dimensi peningkatan kompetensi melalui diklat, dimensi pencapaian kinerja personel dan dimensi prestasi yang capai melalui pemberian penghargaan. Hal yang diharapkan dari indikator kinerja pendukung ini adalah adanya peningkatan kualitas kemampuan personel Polda Lampung dalam mengelola manajemen pengetahuan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Adapun capaian dari indikator kinerja ini sebagai berikut:

Tabel 11. Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP Indeks profesionalitas personel.

SS₃ Sumber daya manusia yang profesional											
IKP₃ Indeks profesionalitas personel											
Triwulan	Realisasi 2020-2022			Tahun 2023			Renstra Polda Lampung 2020-2024				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	realisasi	target	% capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2024	% capaian target 2024	Target nasional	% capaian target nasional
I	65,76	70,13	68,04	61,75	73,00	84,59%	-9,25%	75,00	82,33%	68,00	90,81%
II	72,92	77,30	71,49	68,31	73,00	93,58%	-4,44%	75,00	91,08%	68,00	100,46%
III	78,61	77,77	75,29	69,82	73,00	95,64%	-7,27%	75,00	93,09%	68,00	102,67%
IV	81,29	82,13	73,60	71,67	73,00	98,18%	-2,62%	75,00	95,56%	68,00	105,40%

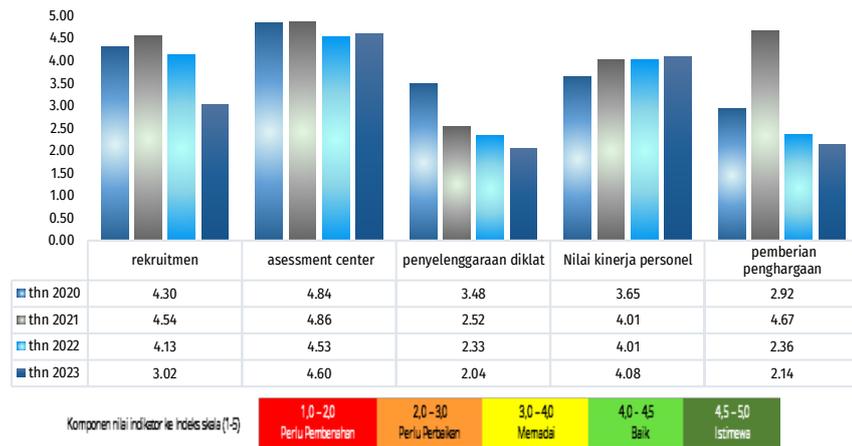
Apabila dilihat dari realisasi TAB 2023, maka capaian dari target indeks profesionalitas personel, sebesar 98,18%, dan apabila dibandingkan dengan realisasi TAB-1, maka mengalami penurunan sebesar 2,62%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 tercapai 95,56%. **Sedangkan apabila dibandingkan dengan target nasional dengan angka 68,00 maka capaiannya sebesar 105,40%.** Artinya level kinerja profesionalitas personel pada TAB+1 harus terus berupaya untuk meningkatkan dan mengakselerasi kegiatan pendukung dari indikator kinerja profesionalitas personel, mengingat target kinerja untuk tahun 2023 tidak tercapai, terlebih akan mendekati akhir

Renstra 2020-2024 terdapat kecenderungan menurun, ataupun mempersiapkan diri dengan merumuskan indikator kinerja baru, untuk keberlanjutan perencanaan kinerja lima tahun yang akan datang dengan menjalin koordinasi pembina fungsi SSDM Polri dan Lemdiklat Polri, melalui peninjauan terhadap target kinerjanya pada Renstra 2025-2029. Secara umum beberapa **faktor yang mempengaruhi terhadap kegagalan dari kinerja Indeks profesionalitas personel ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023, dari ke-lima komponen penyusun IKP ini mulai** kegiatan penerimaan personel sudah berjalan dengan baik, dibarengi dengan penyediaan personel untuk menduduki jabatan dalam SOTK, baik di Polda, Polres dan Polsek melalui kegiatan *assessmen center*, penyelenggaraan diklat Di SPN sesuai indikasi kebutuhan organisasi serta terakomodirnya personel yang berprestasi melalui pemberian penghargaan, mulai menunjukkan penurunan kinerja sehingga secara komplementer berdampak pada pencapaian target indeks profesionalitas personel. Berikut ini gambaran dinamika kinerja indeks profesionalitas personel per-triwulan dalam empat tahun terakhir berdasarkan *skala likert 1-5* sebagai berikut:



Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan indeks profesionalitas personel setiap triwulan dalam empat tahun ini, berada pada level kinerja 60-90 yaitu pada rentang level kinerja 3-4 pada skala *likert*. Pada tahun 2023 dinamika kinerja profesionalitas personel menunjukkan kecenderungan menurun dibanding tahun 2021-2022. Terlihat dari realisasi kinerja setiap triwulannya, terus menurun dibanding tahun 2022, walaupun masih dalam kinerja level 3. Secara umum penurunan kinerja ini akan berdampak pada pencapaian target tahun 2023, fakta ini menunjukkan kegiatan pembinaan sumber daya manusia yang diselenggarakan Biro SDM dan SPN Polda Lampung, mulai dari proses penyediaan personel, pembinaan personel, peningkatan kompetensi, perawatan baik jasmani, rohani dan mental mengalami penurunan dibanding dengan kegiatan tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk lebih detail mengenai sampai sejauh mana kontribusi **lima komponen penyusun IKU3 indeks profesionalitas personel** dalam empat tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 32. Kontribusi 5 komponen kinerja indeks profesionalitas personel periode empat tahun terakhir.



Sepanjang tahun 2023 terdapat kinerja lima komponen penyusun kinerja profesionalisme personel dapat dikategorikan beragam mulai dari perlu perbaikan; memadai; baik dan istimewa. Berdasarkan data tersebut di atas

diperoleh fakta bahwa kinerja penyelenggaraan diklat nilai kinerjanya pada tahun 2022-2023 ini berada pada kinerja level 2, atau perlu perbaikan.

Hasil analisis data pendukung kinerja ini, diperoleh informasi bahwa yang menjadi faktor penyebab menurunnya realisasi kinerja Indeks profesionalitas personel adalah tidak ada

penambahan atau alokasi peserta pelatihan dan peserta pendidikan



Gambar 33. informasi alokasi peserta pelatihan dan dikbangspes dalam empat tahun

pengembangan spesialis (dikbangspes) adalah tetap dikarenakan anggaran yang diterima masih tetap sama dengan tahun 2022. Karena alokasi yang diturunkan Lemdiklat Polri selaku penanggungjawab program ke Polda Lampung melalui SPN Polda Lampung dalam tiga tahun terakhir ini terus mengalami penyusutan, sementara itu SPN sudah mengusulkan pemabahan anggaran pelatihan dan dikbangspes tetapi belum mendapat realisasi dari Mabes Polri, demikian juga dengan pengajuan anggaran tambahan melalui hibah juga belum terpenuhi. Sehingga hal ini berpengaruh pada realisasi pencapaian target pada TAB 2023 walaupun untuk target sudah diturunkan dalam Renstra perubahan 2020-2024. Oleh karena itu menjadi catatan tersendiri untuk pencapaian pada target pada tahun 2024. Selanjutnya **upaya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan diklat ini**, di samping nilai kinerja ini diperoleh secara komposit bersama komponen kinerja profesionalitas personel lainnya, **maka untuk komponen penyelenggaraan diklat pada tahun berikutnya SPN harus melakukan pemetaan kebutuhan dan mengusulkan penambahan alokasi peserta pelatihan dan dikbangspes ke Mabes Polri dan Rorena mengusulkan penambahan anggaran, ataupun SPN bersama dengan Rorena berinisiatif mengusulkan tambahan anggaran pelatihan yang dibiayai dari pendapatan hibah dari pemerintah daerah, yang sebelumnya menyusun**

analisa kebutuhan pelatihan fungsi kepolisian berdasarkan masukan dari satker dan Polres jajaran. Selanjutnya memberikan **atensi terhadap menurunnya pemberian penghargaan bagi personel yang berprestasi, melalui upaya para kasatker secara konsisten dan berkesinambungan selalu memberikan dorongan kepada personel melalui membangun kerja sama dan menjalin hubungan yang harmonis dalam rangka merangsang personel untuk berprestasi.** Konsep pemberian penghargaan adalah merupakan bentuk stimulan pemimpin kepada personel, agar bekerja dengan baik, bersemangat, berdedikasi dan terpeliharanya loyalitas serta kecintaan terhadap pekerjaan yang digeluti. Untuk dimensi profesionalitas personel yang lainnya, cukup memadai dan performa kinerjanya patut untuk dipertahankan.

Secara umum pencapaian kinerja dari Indeks profesionalitas personel tahun 2023 ini perlu dilakukan revitalisasi komitmen dari segenap sumber daya Polda Lampung dalam melakukan transformasi organisasi menuju SDM Polri yang siap menghadapi tantangan tugas di masa yang akan datang. Poin penting lainnya adalah kegiatan penyelenggaraan diklat di SPN memang sangat vital, mengingat kebutuhan kompetensi dan pengetahuan untuk menghadapi tantangan tugas dan lingkungan strategis yang terus berkembang. Sehingga upaya ke depan, perbaikan peningkatan kebutuhan peserta pelatihan dan pendidikan pengembangan spesialis menjadi suatu keharusan untuk dilakukan penguatan, di samping peningkatan kapasitas dan kapabilitas Gadik dan Gadikan. Kegiatan *assessment center* secara umum dapat memberikan masukan pada penempatan personel terhadap jabatan yang tepat. Kendala dan hambatan yang dihadapi selama penyelenggaraan *assessment center* ini, adalah masalah teknis mengenai jadwal kegiatan para assessor dengan tugas rutin yang ada. Karena hal ini berhubungan dengan analisa beban kerja masing-masing assessor. Hal lain yang dapat menjadi kendala lainnya, adalah berupa *update tools* yang perlu disiapkan secara tepat dengan jabatan yang akan dilakukan *assessment*. Upaya yang pernah dilakukan agar terus ditingkatkan dengan mengefektifkan proses bisnis pembinaan karier personel yang tepat, diantaranya melalui forum komunikasi *assessor* dengan admin, guna memastikan waktu yang tepat pelaksanaan *assessment*. Karena semangat terbitnya Perpol Nomor 14 Tahun 2018, adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan kegiatan *assessment center* pada tingkat Polda.

4. Sasaran strategis (SS4) Modernisasi pelayanan kepolisian yang berkelanjutan.

Sasaran ini memberikan gambaran tentang kapasitas dan kondisi fasilitas gedung dan sarana angkut sebagai bagian yang sangat vital dalam penyelenggaraan kegiatan tupoksi kepolisian yang dimiliki Polda Lampung sebagai komponen dasar dalam menentukan keberhasilan tugas. Adapun lingkup kinerja dalam indikator kinerja pendukung ini adalah menyangkut dimensi kondisi gedung layak pakai, dimensi kondisi alat angkut layak pakai, dimensi penambahan fasilitas gedung hasil rehab dan usulan pengadaan baru dan dimensi penambahan alat angkut dan usulan pengadaan baru.

Dengan pengembangan modernisasi sarpras dan peralatan kepolisian yang berkelanjutan diharapkan diperoleh kuantitas dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas. Seiring dengan itu kesiapan sarana

prasarana dan peralatan kepolisian dapat selaras dengan tantangan dalam dinamika lingkungan strategis, sehingga memerlukan sistem modernisasi sebagai dukungan fasilitas sarana dan prasarana yang harus dimiliki Polda Lampung dan jajaran. Selanjutnya terhadap hasil capaian kinerja Indeks dukungan sarpras dan peralatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

IKP-4. Indeks dukungan sarpras dan peralatan.

Pada indikator kinerja ini penilaian didasari pada dukungan sarana dan prasarana berupa fasilitas barang tidak bergerak berupa gedung (perkantoran dan rumah dinas) dan alat angkut berupa kendaraan, karena dengan penambahan jumlah fasilitas sarana prasarana barang tidak bergerak (BTB) dan penambahan alat angkut sangat menunjang bagi keberhasilan pelaksanaan tugas kepolisian. Maka dengan indikator ini menjadi alat ukur untuk mengetahui sejauh mana dukungan fasilitas baik gedung perkantoran / rumah dinas dan alat angkut menunjang terhadap keberhasilan tupoksi. Adapun capaian dari indikator kinerja ini sebagai berikut:

Tabel 12. Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP Indeks dukungan Sarpras dan peralatan.

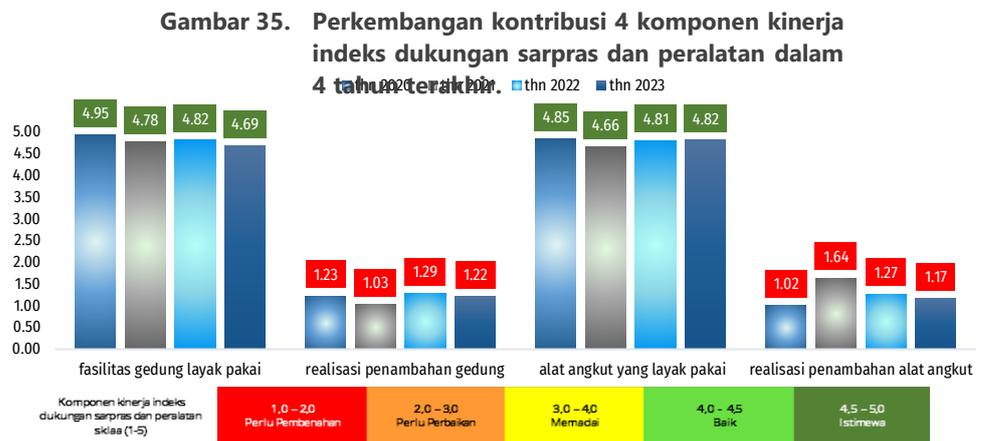
SS. Modernisasi pelayanan kepolisian yang berkelanjutan									
IKP, Indeks dukungan sarpras dan peralatan									
Realisasi 2020-2022				Tahun 2023			Renstra Polda Lampung 2020-2024		
Triwulan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	realisasi	target	% capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2024	% capaian target 2024
I	85,48	71,27	84,51	82,59	70	117,99%	-2,27%	70,5	117,15%
II	85,35	83,38	84,75	82,59	70	117,99%	-2,54%	70,5	117,15%
III	85,35	80,32	84,87	83,25	70	118,93%	-1,91%	70,5	118,08%
IV	84,90	82,27	83,70	81,97	70	117,11%	-2,06%	70,5	116,28%

Apabila melihat realisasi TAB, maka target dukungan sarpras dan peralatan tercapai 117,11%, dan apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja TAB-1, maka mengalami penurunan sebesar 1,06%. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 maka capaian kinerjanya masih tetap di atas 100%. Artinya kinerja yang telah dilaksanakan pada TAB berhasil mencapai target, dan tentunya apabila memandang tantangan tugas untuk masa yang akan datang yang penuh dengan dinamika, maka masih tetap perlu kewaspadaan mengingat pertama daerah Lampung merupakan *ring of fire* di Indonesia terdapat kerawanan dari bencana alam yang sewaktu-waktu terjadi yang akan berpengaruh pada kondisi bangunan. Demikian juga sarana angkutan apabila tidak dipelihara dengan baik, maka akan menurunkan fungsi dan nilai guna kendaraan itu sendiri. Berikut ini gambaran dinamika indeks dukungan sarpras dan peralatan per triwulan dalam empat tahun terakhir sebagai berikut:

Gambar 34. Dinamika indeks dukungan sarpras dan peralatan empat tahun terakhir.



Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan indeks dukungan sarpras dan peralatan setiap triwulan berada pada level kinerja 71-84 yaitu pada rentang level kinerja 3-4 skala likert. Keberhasilan dari kinerja modernisasi pelayanan kepolisian yang berkelanjutan ini adalah konsistensinya pelaksanaan kegiatan pembinaan siklus logistik yang secara komplementer berkontribusi dalam penguatan modernisasi sarpras dan peralatan yang berupaya harus dimiliki Polda Lampung. Secara umum beberapa **faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan ini fungsi logistik dan perencanaan berupaya untuk selalu mengkaji kebutuhan logistik yang disesuaikan dengan tantangan dinamika lingkungan strategis** sebagaimana yang telah ditargetkan dalam Renstra Polda Lampung 2020-2024. **Faktor pendukung lainnya adalah harmonisasi dengan stakeholder dalam pengelolaan harkamtibmas, sehingga bantuan hibah dimanfaatkan dan diawasi secara optimal untuk memenuhi kebutuhan sarana bangunan dan sarana angkut.** Kemudian juga di samping itu tetap idealnya memetakan kebutuhan dan pengusulan ke Mabes Polri. Selanjutnya untuk lebih detail analisis terhadap seberapa besar kontribusi kinerja yang diberikan dari **empat komponen penyusun IKU₁ indeks dukungan sarpras dan peralatan** dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sepanjang **tahun 2023 empat komponen penyusun kinerja dukungan sarpras dan peralatan diperoleh informasi bahwa realisasi penambahan gedung dan realisasi penambahan alat angkut tahun 2020-2023 perlu pembinaan**, Berdasarkan data di atas tahun 2023 terdapat penambahan gedung dan alat angkut, sebagai berikut:

Tabel 13. Perkembangan penambahan gedung/rumdin, 2023

No.	Satker	Penambahan Gedung	Jumlah Unit	Nilai (Rp)	Sumber
1.	Rolog	Gedung Rumkit Bhayangkara	1	21.784.663.148	BLU
2.	Polres Lamut	Gedung Bangunan Masjid	1	800.000.000	Hibah Pemkab Lamut
3.	Polres Lamteng	Gedung Sat Narkoba	1	325.954.000	Hibah Pemkab Lamteng
4.	Polres Metro	Gedung Sipropam	1	214.000.000	Hibah Pemkot Metro
		pagar samping	1	200.000.000	Hibah Pemkot Metro
		Gedung judo/GSG	1	426.000.000	Hibah Pemkot Metro
5.	Polres Tanggamus	Gedung Sat Reskrim	1	1.790.000.000	Hibah Pemkab Tanggamus
6.	Polres Pringsewu	Gedung Rusun asrama	1	8.860.989.754	SBSN
7.	Polres Waykanan	Gedung SPKT	1	1.076.797.599	Hibah Pemkab W. Kanan
8.	Polres Tubaba	Aula Polres Tuba Barat	1	3.715.131.000	Hibah Pemkab Tubaba
		Gudang Logistik	1	196.177.000	Hibah Pemkab Tubaba
9.	Polres Mesuji	Gedung Kantor Permanen	3	2.152.200.000	Hibah Pemkab Mesuji
		Rumas dinas jabatan	1	1.850.000.000	Hibah Pemkab Mesuji
10.	Polres Pesawaran	Gedung / Bangunan	1	200.000.000	Hibah Pemkab Pesawaran
jumlah			15	43.591.912.501	

Untuk gedung terdapat pembangunan gedung kantor dan rumah dinas, yang teralisasi pada sembilan Polres yaitu Polres Lampung Utara, Lampung Tengah, Metro, Tanggamus, Pringsewu, Way Kanan, Tulang Bawang Barat, Mesuji dan Polres Pesawaran, baik yang bersumber dari DIPA 2023 (SBSN) maupun hibah dari Pemkab serta terdapat pula pembangunan gedung layanan utama rumkit Bhayangkara, yang merupakan fasilitas untuk mendukung tupksi kepolisian dan pemeliharaan kesehatan keluarga Polri dan melayani masyarakat umum. Kemudian untuk penambahan alat angkut yang terealisasi pada empat Polres yaitu Polres Pringsewu, Pesawaran, Lampung Tengah dan Polres Tulang Bawang Barat. Selanjutnya untuk penambahan alat angkut pada TAB 2023, merupakan hasil hasil pengadaan Mabes Polri yang didistribusi ke Polda Lampung berupa kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua ditambah hibah dari pemerintah kabupaten seperti data dibawah ini.

Tabel 14. Perkembangan penambahan alat angkut, 2023

No.	Satker	Penambahan alat angkut	Jumlah Unit	Nilai (Rp)	Sumber
1.	Rolog				
2.	Polres Lamsel	Ran Bus Merk Isuzu	1	1.401.139.391	Polda Lampung
		Ran R.2 Yamaha Wr 155	2	70.000.000	Polda Lampung
3.	Polres Lamut	Ran R.2 Yamaha Wr 55	2	70.000.000	Polda Lampung
4.	Polres Lamteng	Ran R.2 Yamaha Wr 55	2	70.000.000	Polda Lampung
5.	Polres Metro	Ran R.2 Yamaha Wr 55	2	70.000.000	Polda Lampung
		Ran R.4 Lantas Kijang Pick Up	1	75.000.000	Hibah Pemkot Metro
		Ran R.4 Toyota Hilux	1	120.000.000	Hibah Pemkot Metro
		Toyota Kijang Innova Type E	1	167.906.000	Hibah Pemkot Metro
		Golf Car-48 Volt Battery	1	120.000.000	Hibah Bri Cab. Metro
		Daihatsu Grand Max	1	695.827.200	Polda Lampung
		Ran R.2 Trail	2	70.000.000	Polda Lampung
6.	Polres Pringsewu	Ran R.4 Daihatsu Terios	1	245.542.420	Polda Lampung
		Ran R.2 Yamaha Wr 55	15	525.000.000	Polda Lampung
7.	Polres Tuba	Ran R.2 Yamaha Wr 55	2	70.000.000	Polda Lampung
jumlah			32	3.700.415.011	

Keberhasilan dari Indeks dukungan sarpras dan alat angkut adalah merupakan komitmen bersama Polda Lampung dalam mengimplementasikan transformasi organisasi menuju peralatan kepolisian yang modern, siap menghadapi tantangan tugas pada masa yang akan datang. **Adapun kendala dan hambatan** yang dihadapi pemenuhan dukungan fasilitas barang tidak bergerak, adalah pada kebutuhan yang mendesak dan prioritas, proses usulan yang harus lengkap dan memenuhi kriteria untuk dibangun, mulai dari status lahan, kondisi lahan dan dukungan satuan tingkat atas. Masalah minimnya realisasi dari setiap usulan pengadaan baik pembangunan gedung/rumdin dan alat angkut, hal ini bergantung dari kebijakan Mabes Polri dalam prioritas pembangunan sesuai dengan tema dari rencana kerja yang ada setiap tahunnya. Oleh karena itu **upaya Polda Lampung dalam meningkatkan indeks dukungan sarpras**, setiap tahunnya mengoptimalkan forum komunikasi pimpinan daerah dan menjalin koordinasi lintas sektoral dengan *stakeholder* lainnya, dalam menjalan proses bisnis pengelolaan harkamtibmas melalui penyelenggaraan hubungan kerja sama. Sehingga permasalahan kekurangan sarana gedung dan alat angkut walaupun dalam persentase kecil setiap tahunnya secara prioritas terpenuhi. Selanjut **upaya lain** untuk meningkatkan kinerja dukungan sarpras dan peralatan adalah dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas organisasi dalam pengetahuan tata cara hibah sebagai mana yang diatur dalam Perkap 11 Tahun 2013 tentang mekanisme hibah di lingkungan Polri dan sertifikasi

penjabat pengadaan barang dan jasa, yang dilaksanakan oleh fungsi Logistik Polda Lampung. Kemudian secara rutin asistensi terhadap proses siklus logistik dalam rangka memelihara nilai guna dan masa pakai dari pada gedung/rumdin dan alat angkut.

IKP₅ Indeks sistem Pemerintahan berbasis eletronik.

Pada indikator kinerja pendukung ini penilaian didasari pada tata kelola yang meliputi: kelembagaan, strategi dan perencanaan, teknologi informasi dan komunikasi, layanan yang meliputi, administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, dan kebijakan yang meliputi: tata kelola dan layanan. Adapun konsep tingkat kematangan SPBE meliputi tingkat kematangan kapabilitas proses yang terdiri dari lima tingkat yaitu rintisan, terkelola, terstandarisasi, terintegrasi dan terukur, optimum, selanjutnya tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi teknis terdiri dari lima tingkat yaitu informasi, interaksi, transaksi, kolaborasi dan optimalisasi.

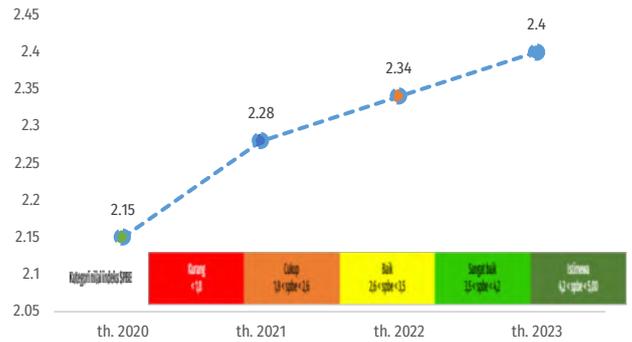
Untuk mendapat nilai dari SPBE berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada proses penilaian terdiri dari empat domain yaitu kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE dan layanan SPBE, dengan delapan aspek dan empat puluh tujuh indikator. Adapun capaian dari indikator kinerja ini sebagai berikut:

Tabel 15. Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP Indeks sistem Pemerintahan berbasis eletronik.

SS₄ Modernisasi pelayanan kepolisian yang berkelanjutan							
IKP₅ Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)							
Realisasi 2020-2022		Tahun 2023			Renstra Polda Lampung 2020-2024		
		realisasi	target	% capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2024	% capaian thdp target 2024
2020	2,15	2,40	2,40	100,00%	2,56%	2,50	96,00%
2021	2,29						
2022	2,34						

Apabila melihat **realisasi tahun 2023, maka target SPBE tercapai 100,00%, dan apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja TAB-1, maka mengalami kenaikan sebesar 2,56%. Selanjutnya dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024, maka capaian kinerjanya mulai menurun berada pada 96,00%**. Artinya kinerja yang telah dilaksanakan pada TAB berhasil mencapai target, dan tentunya apabila memandang realisasi dibandingkan dengan target tahun 2024, maka perlu akselerasi performa kinerja yang diiringi dengan usaha dan kreativitas untuk mempertahankan dan menjaga kualitas dan kuantitas dari implementasi SPBE sebagai suatu sistem yang harus dimiliki dan dikuasai serta dimanfaatkan, dalam hal ini teknologi informasi dan komunikasi menjadi hal krusial untuk digunakan dalam pengelolaan tupoksi kepolisian. Secara umum beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dalam pengelolaan SPBE di Polda Lampung adalah fungsi TIK harus menjadi terdepan dalam memberikan pembinaan mengenai tata kelola, manajemen dan layanan SPBE. Sedangkan Satker Rorena harus melakukan pembinaan menyangkut kebijakan internal SPBE. Berikut ini gambaran dinamika kinerja indeks SPBE dalam empat tahun terakhir:

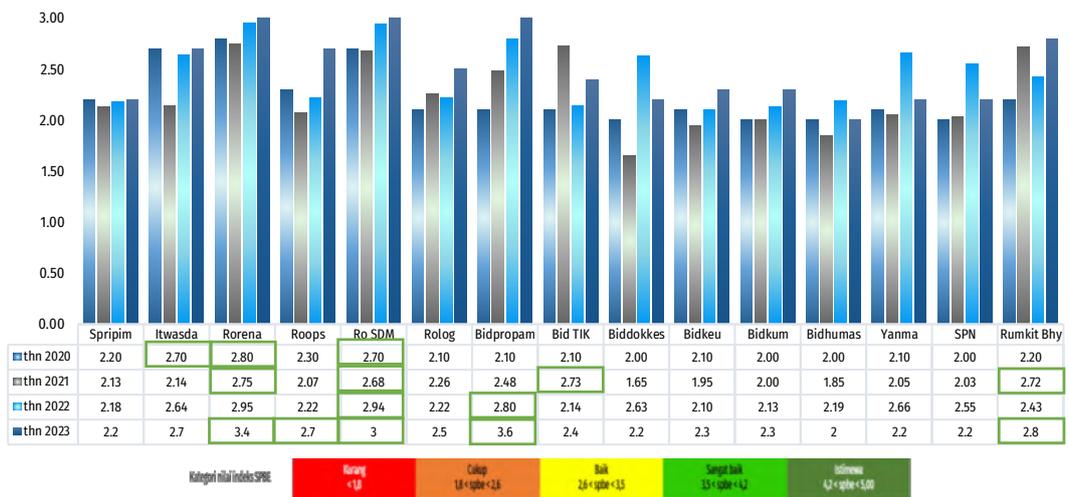
Dari **Gambar 36** dapat dijelaskan bahwa perkembangan indeks SPBE setiap tahunnya berada pada kategori cukup yaitu pada internal nilai 12,15-2,4, penilaian ini berdasarkan dari evaluasi internal Polda Lampung yang dibentuk berdasarkan surat perintah Kapolda Lampung Nomor: Sprin/2279/XI/OTL.2.2./2023



Gambar 36. Dinamika indeks SPBE Polda Lampung dalam empat tahun terakhir.

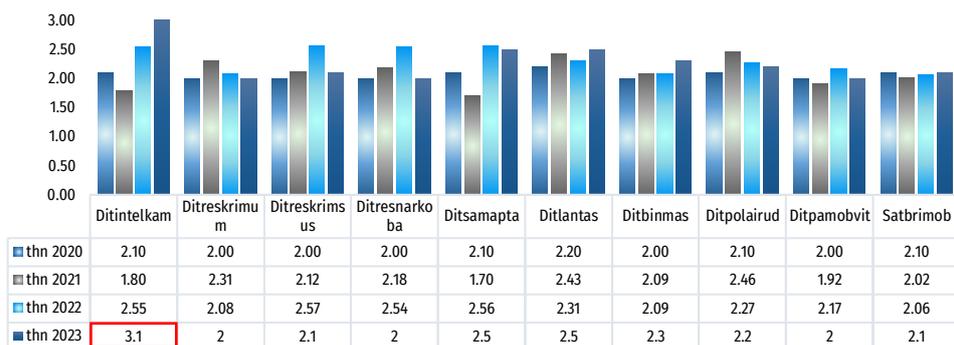
tanggal 14 Nopember 2023 tentang Tim Pokja evaluasi SPBE di lingkungan Polda Lampung T.A. 2023). Selanjutnya untuk lebih detail analisis terhadap hasil evaluasi mandiri SPBE satker di Polda Lampung, maka hasil penilaian dibagi dalam tiga klaster, masing-masing kelompok satker unsur pengawas dan pembantu pimpinan, kelompok satker pelaksana tugas pokok dan kelompok satwil yaitu Polres jajaran Polda Lampung, sbagai berikut:

Gambar 37. Hasil evaluasi SPBE satker unsur pengawas dan pembantu pimpinan.



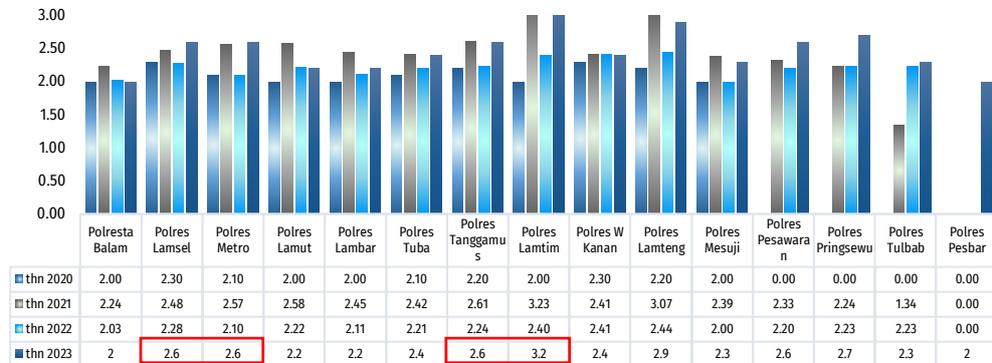
Dari 15 satker unsur pengawas/pembantu/pendukung pada tahun 2023 terdapat lima satker yakni Rorena, Roops, ro SDM dan Bidpropam serta rumkit Bhayangkara yang nilai SPBEnya berada pada kategori baik, sementara 10 satker lainnya pada posisi kategori cukup. Kemudian nilai SPBE pada satker unsur pelaksana tugas pokok hasilnya sebagai berikut:

Gambar 38. Hasil evaluasi SPBE satker unsur pelaksana tugas pokok.



Untuk satker pelaksana tugas pokok pada tahun 2023 terdapat sebanyak satu satker berada pada posisi nilai SPBE kategori baik, sementara yang lainnya cukup dari nilai 2 - 2,5. Untuk hasil penilaian mandiri terhadap SPBE satuan Polres sebagai berikut:

Gambar 39. Hasil evaluasi mandiri SPBE Polres, 2023.



dan Lamtim. Sedangkan hasil penilaian SPBE TAB-1, semua Polres berada pada kategori cukup. Secara umum dengan tercapainya target tahun ini dengan kategori cukup, maka harapan Polda Lampung secara bertahap satker-satker dapat berupaya untuk mengerti, memahami dan mengimplementasikan program SPBE sebagai suatu keniscayaan merupakan tuntutan Polri dalam sistem pemerintahan. **Kendala umum** dari penerapan kebijakan SPBE adalah proses yang belum terintegrasi, ditandai masih rendahnya budaya berbagi data dan informasi antar satker terlebih antar satker; infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) belum menjangkau seluruh satker dan pengelolaan keamanan informasi dan masih lemah serta pemahaman satker maupun instansi pemerintah. **Kedala lainnya** berupa Sumber daya manusia yang mumpuni dalam upaya penerapan digitalisasi pemerintahan, masih menjadi persoalan pelik yang dialami satker. Terutama langkanya SDM yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi. Saat ini Polda Lampung sedang berupaya memecahkan masalah tentang bagaimana penerapan SPBE ini diharapkan meningkatkan kinerja, dengan adanya Perkap 9 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan SPBE di Polri, guna menunjang satu data Polri sebagaimana amanat dari Perkap 4 Tahun 2022. Adapun upaya yang telah sedang dan akan dilakukan Polda Lampung adalah tetap secara berkelanjutan melakukan pembinaan penguatan SPBE, kegiatan asistensi, bimbingan teknis, koordinasi, ataupun kegiatan *benchmark* dengan instansi pemerintah di daerah Lampung atau dengan kesatuan kewilayahan lainnya.

IKP-6 Nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan.

Pada indikator kinerja ini merupakan indikator dalam mengelola media informasi sebagai evidence/bukti pendukung dalam mengetahui outcome/hasil dari pelaksanaan tupoksi Polda Lampung yang terdokumentasikan baik di internal dan di masyarakat melalui media online, sehingga menjadi alat ukur dari ekspektasi masyarakat atas kepercayaan atas aktualisasi Polda Lampung dari kegiatan legalitas menjadi sebuah legitimasi dari masyarakat. Adapun penilaian didasari pada dimensi kegiatan intelijen media management, dimensi produksi rilis berita dan ekspos serta dimensi kegiatan peliputan, dokumentasi dan monitoring pemberitaan media

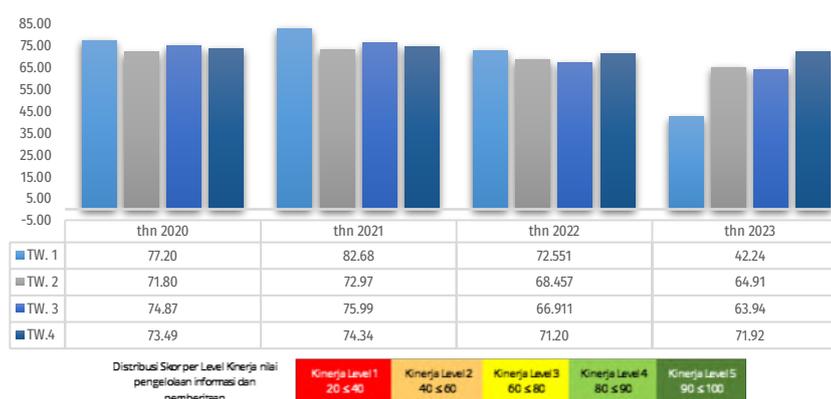
pemberitaan. Adapun capaian dari indikator kinerja pendukung ini sebagai berikut:

Tabel 16. Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP Nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan.

SS. Modernisasi pelayanan kepolisian yang berkelanjutan									
IKP. Nilai pengelolaan informasi pemberitaan									
Realisasi 2020-2022				Tahun 2023			Renstra Polda Lampung 2020-2024		
Triwulan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	realisasi	target	% capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2024	% capaian target 2024
I	77,20	82,68	72,551	42,24	70	60,35%	-41,77%	72	58,67%
II	71,80	72,97	68,457	64,91	70	92,73%	-5,18%	72	90,15%
III	74,87	75,99	66,911	63,94	70	91,34%	-4,44%	72	88,81%
IV	73,49	74,34	71,202	71,92	70	102,74%	1,00%	72	99,88%

Apabila melihat **realisasi tahun 2023**, maka **target kinerja pengelolaan informasi pemberitaan tercapai 102,74%**, dan apabila dibandingkan dengan **realisasi kinerja TAB-1**, maka mengalami kenaikan sebesar **1,00%**. Selanjutnya dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024, maka capaian kinerjanya kurang dari 100%. Artinya kinerja yang telah dilaksanakan pada TAB perlu ditingkatkan untuk mencapai target tahun 2024, dan tentunya apabila memandang tantangan tugas untuk masa yang akan datang yang penuh dengan dinamika, maka harus mengakselerasi performa kinerja yang diiringi dengan usaha dan kreativitas untuk mempertahankan dan menjaga kualitas dan kuantitas pelaksanaan tupoksi mulai dari pengelolaan informasi dan dokumentasi, penerangan masyarakat serta pengelolaan konten multimedia, yang menyajikan kinerja Polda Lampung dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Secara umum beberapa **faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan** dalam pengelolaan informasi pemberitaan saat ini adalah akselerasi dalam penyusunan, penyajian dan menyebarluaskan berita serta *counter* opini yang efektif. Demikian juga pengelolaan media dan media sosial yang berkelanjutan. Berikut ini gambaran dinamika kinerja nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan per triwulan dalam empat tahun terakhir:

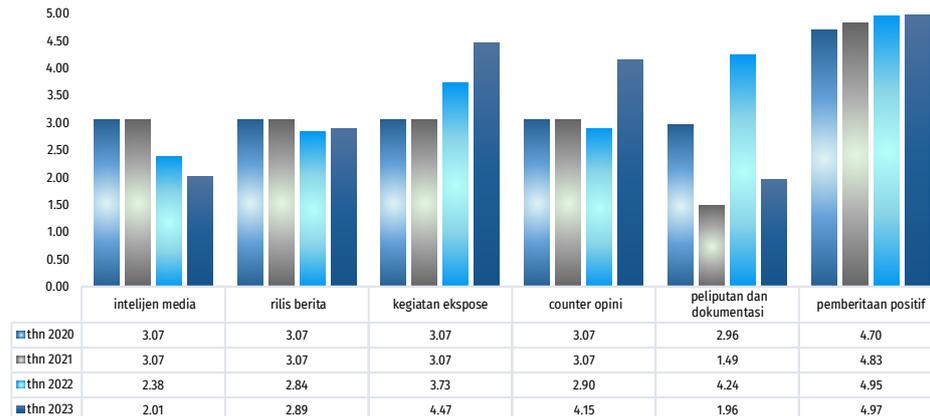
Gambar 40. Dinamika nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan empat tahun terakhir.



Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa **perkembangan nilai pengelolaan informasi pemberitaan setiap triwulan berada pada level kinerja 40-80**, yaitu pada rentang kinerja level 2-4 pada skala likert. Pada tahun 2023 menunjukkan dinamika kinerja pengelolaan informasi dan pemberitaan terus mengalami kenaikan secara linier setiap triwulan, yang apabila dibandingkan dengan tahun 2022. Walaupun demikian capaian target kinerja tahun 2023 ini perlu ditingkatkan untuk meraih target tahun 2024 yang telah disepakati pada Resnra

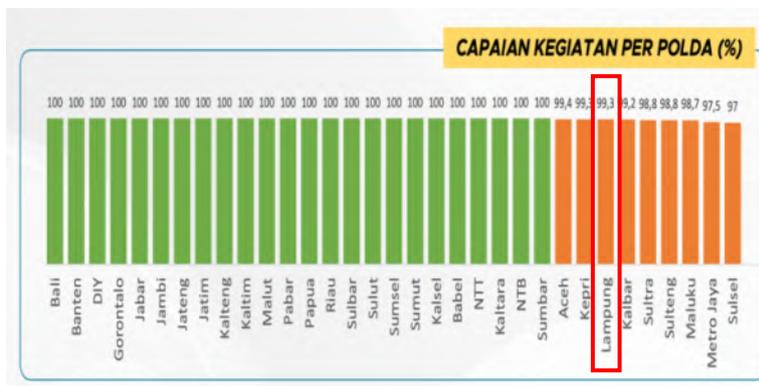
2020-2024. Tetapi secara umum keberhasilan dari kinerja ini, menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023, kegiatan pengelolaan informasi pemberitaan yang dilaksanakan fungsi humas Polda Lampung dan jajaran secara komplementer memberikan kontribusi terhadap terwujudnya manajemen media yang mendukung terhadap tupoksi Polda Lampung. Selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut dari pada kontribusi **enam komponen penyusun IKP Nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan** pada empat tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 41. Kontribusi kinerja komponen nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan.



Sepanjang **tahun 2023** terdapat **tiga komponen penyusun Nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan yang memerlukan upaya perbaikan**. Adapun komponen tersebut adalah kegiatan pada komponen **intelijen media, rilis berita dan peliputan** yang menunjukkan nilai kinerja pada interval 2,0-3,0. Adapun faktor penyebabnya adalah sedikitnya berita yang diproduksi karena sedikitnya pimpinan tampil pada media ataupun kegiatan kepolisian yang diterbitkan pada media, ditambah lagi pemberitaan sentimen negatif sehingga fungsi humas terkonsentrasi fokus dengan membuat berita counter opini, juga dapat berhubungan secara paralel peristiwa pada institusi Polri, yang berimbas pada satuan di kewilayahan, walaupun kita ketahui bersama **selama tahun 2023 menurut hasil survey kepercayaan publik oleh indikator politika, bahwa, "tingkat kepercayaan publik terhadap Polri terus membaik, kini angkanya mencapai 76,4 persen,"** (6/11/2023), yang dilansir pada laman Humas Polri (<https://humas.polri.go.id/2023/11/08/kepercayaan-polri-capai-764-berdasarkan-survei-indikator-politika/>), belum memberikan dampak pada kesatuan kewilayahan. Oleh karena itu tingkat kepercayaan publik ini apabila tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi preseden buruk bagi manajemen citra Polri.. **Upaya yang dilakukan Polda Lampung untuk meningkatkan nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan, dengan memanfaatkan momentum digelarnya program Quick Wins presisi Polri 2023.** Kapolda Lampung telah menerbitkan direktif melalui Surat Perintah Kapolda Lampung No: Sprin/ 2368 /XI/REN.5.2./2023 tanggal 27 November 2023 tentang tim Pokja pelaksana program Quick Wins Presisi Polda Lampung 2023. Dimana dalam program ini adalah untuk mengakselerasi kepercayaan publik terhadap Polri yang dalam pelaksanaan terdapat serangkaian aksi kegiatan yang harus dilaksanakan berikut dengan melampirkan bukti pendukung hasil kegiatan tersebut yang diupload pada aplikasi quick wins presisi yang poskonya dikelola

oleh Divtik Polri. Selanjut korelasi dari kegiatan quick wins ini diharapkan terdapat korelasi peningkatan kepercayaan masyarakat. Maka diperoleh nilai keterkaitan Polda melalui satker dan Polres melalui media online dan media sosial. Yang dalam sehari-hari dilakukan monitoring oleh fungsi Humas melalui aplikasi berbagi pakai intelijen media yang berbasis website, yang diinisiasi Dihumas Polri dan digunakan oleh seluruh Bidhumas pada setiap Polda. Disamping itu Bidhumas melakukan pembinaan terhadap personel satker yang ditunjuk sebagai pejabat pengelola informasi publik, sehingga setiap personel tersebut dan setiap satker harus memiliki akun resmi media sosial ataupun jika ada mempunyai media online, serta aktif melakukan interaksi dengan akun resmi Bidhumas Polda Lampung. mengoptimalkan pembuatan artikel/berita sentiment positif dan counter opini untuk berita sentiment negatif. Kemudian membuat konten dan narasi berita/artikel yang didesain lebih variatif dan menarik, baik secara visual dan audio. Unggahan konten yang positif dan menarik diposting secara masif setiap hari. Penggunaan kata kunci setiap konten pada *platform* media sosial, disertai identitas kesatuan baik Polda maupun Polres/ta. Demikian juga penyampaian kasus internal, dengan berupaya melokalisir dan melakukan mitigasi pada proses penyelesaian pelanggaran dan secara elegan, yang selanjutnya dipublikasikan pada media dengan porsi tepat, tidak menjadi *issue* yang blunder, disertai dengan membangun kerja sama dengan media dan influencer dengan mengangkat tema yang kreatif dan menarik.



Selanjutnya hasil akhir pelaksanaan program Quick Wins presisi walaupun tahun 2023. Diperoleh data bahwa kegiatan quick wins yang telah dilaksanakan belum dapat memberikan hasil yang signifikan. Diperoleh informasi hasil Program *Quick Wins* presisi periode triwulan IV 2023 yang terdiri dari delapan program mulai dari;

membangun budaya integritas organisasi; menerapkan sistem pemolisian berbasis digital; mengembangkan sdm unggul; menciptakan suasana kondusif di masyarakat; memantapkan pemeliharaan kamtibmas; mengoptimalkan penegakan hukum; meningkatkan pelayanan publik; dan mengoptimalkan pengawasan. Adapun hasil yang diperoleh Polda Lampung secara nilai rata-rata kegiatan yang telah dilaksanakan dan dilaporkan, belum mencapai target 100% bersama dengan delapan Polda lainnya. Hal ini dikarenakan masih terdapat kegiatan belum sempat dilaporkan sesuai alokasi waktu pelaporan program *Quick Wins* yang telah disepakati, diantaranya laporan **kegiatan mendukung operasi lilin dalam rangka menyambut natal dan tahun baru dan kegiatan mendukung kegiatan KRYD nusantara cooling system 2023-2024.**

Adapun program *Quick Wins* yang menjadi tanggung jawab fungsi humas yakni program menerapkan sistem pemolisian berbasis digital pada **kegiatan melaksanakan manajemen citra, segera melakukan akselerasi dengan indikator terlaksananya penyebaran konten positif dan pengalihan isu negatif Polri yang dilakukan oleh akun Sobat Kamtibmas.**

Seiring dengan pelaksanaan **program Quick Wins Presisi** selama tahun 2023, maka untuk melihat sejauh mana terikatannya kegiatan *Quick wins* dengan performa satker terhadap media online dan media sosial, maka secara mandiri, Polda Lampung melalui bidhumas menghimpun data hasil ekpos dia media online, ekpos pada media sosial, menghimpun mentimen positif dan negatif pada media online, berikut sentimen positif dan negatif pada medsos, dan menghimpun jumlah kerkaitan dengan media online dan medsos. Kemudian materi raw data tersebut direkap dengan hasil sebagai berikut:

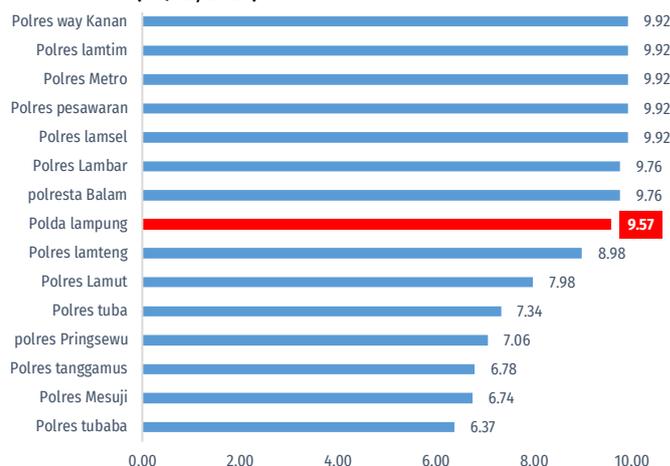


Tabel 17. Data mentah penyusun nilai performa satker pada media dan media sosial (31/12, 2023)

RAW DATA INDEKS PERFORMA MEDIA DN MEDSOS								
NO.	SATKER	EKPOS MEDIA (IEM)	EKPOS MEDSOS (IES)	SENTIMEN MEDIA +	SENTIMEN MEDIA -	SENTIMEN MEDSOS +	SENTIMEN MEDSOS -	JUMLAH KETERIKATAN DGN MEDSOS
1	Polda Lampung	765	937	748	17	935	2	2.469.680
2	Polresta Balam	594	712	589	5	710	2	1.068.356
3	Polres Lamsel	477	572	477	0	571	1	858.286
4	Polres Tanggamus	102	122	87	15	122	0	183.061
5	Polres Pesawaran	366	439	366	0	439	1	658.720
6	Polres Pringsewu	127	152	126	1	152	0	228.076
7	Polres Lamteng	333	399	333	0	398	1	598.699
8	Polres Metro	469	478	469	0	477	1	717.239
9	Polres Lamtim	360	432	360	0	431	1	648.216
10	Polres Tuba	180	216	179	1	216	0	324.108
11	Polres Mesuji	131	157	131	0	157	0	235.579
12	Polres Tubaba	113	135	92	21	135	0	202.568
13	Polres Lamut	240	288	240	0	288	0	432.144
14	Polres Lambar	536	643	531	5	641	2	964.822
15	Polres Way Kanan	468	561	468	0	560	1	841.781

Selanjutnya data tersebut dilakukan perhitungan dan pengolahan menjadi nilai **indeks performa satker pada media dan medsos**, yang terdiri dari indeks ekpos media (IEM), indeks ekpos medsos (IES), indeks sentimen positif media, indeks sentimen negatif media; indeks sentimen positif medsos, indeks sentimen negatif medsos dan indeks *engagement*/keterikatan medsos (ENS). Selanjutnya diperoleh nilai perhitungan **indek performa satker terhadap media online dan media sosial** sebagai berikut:

Gambar 42. Data nilai performa satker pada media dan medsos (31/12, 2023)



Dari data tersebut di atas, diperoleh nilai performa satker pada media dan medsos yang tertinggi nilai pada interval angka 9-10, terdapat pada tujuh Polres; yaitu Polres Way Kanan, Lampung Timur, Metro, Pesawaran, Lampung Selatan, Lampung Barat dan Polresta Bandar Lampung. Kemudian terdapat tujuh Polres yang lainnya berada pada rentang nilai interval 6-8.

Dengan melihat hasil penilaian performa satker terhadap media online dan medsos, dapat menjadi

bahan masukan bagi satker dan Polres di lingkungan Polda Lampung, untuk terus meningkatkan aktualisasi kegiatan dan dinamika operasional yang selalu diekspos dan *diengagement* melalui media dan medsos, sebagai upaya manajemen citra, dan juga tetap dibarengi dengan peningkatan kualitas kegiatan peliputan, penyusunan rilis berita, ekspos di media dan medsos, melalui peningkatan kemampuan kapasitas dan kapabilitas personel dalam berliterasi, tidak hanya untuk personel fungsi kehumasan, tetapi juga untuk semua personel Polda Lampung, agar dapat memanfaatkan media *online* dan media sosial yang efektif.

5. Sasaran Strategis (SS₅) Manajemen pengawasan kepolisian yang akuntabel.

Sasaran ini memberikan gambaran tentang sejauh mana kegiatan proses bisnis yang harus dimiliki oleh Polda Lampung secara manajerial pengawasan kepolisian guna memanfaatkan sumberdaya secara efektif untuk mengimplementasikan tupoksi organisasi dalam mengelola kebijakan pimpinan Polri, melalui peningkatan kapabilitas dan kapasitas organisasi; tata kelola kepolisian; memperhatikan kepuasan masyarakat atas layanan kepolisian; penanganan dumas, penyelesaian pelanggaran personel dan penanganan masalah hukum serta mengelola kinerja anggaran, sehingga dapat diketahui faktor keunggulan dan potensi kelemahan serta berupaya untuk merumuskan bagaimana cara mengatasi dan memperbaikinya.

Kegiatan proses bisnis ini berupa internalisasi pembelajaran pertumbuhan yang dilaksanakan oleh Satker pembina fungsi dalam SOTK mulai unsur pengawas dan pembantu pimpinan (Inspektorat, Biro dan Bidang) dan unsur pelaksana tugas pokok (Direktorat dan Satuan Brimob). Sehingga manajerial pengawasan kepolisian ini dapat meningkatkan kinerja, yang dalam implementasinya berorientasi pada keberhasilan pencapaian apa yang harus dikerjakan (*internal process business perspective*) dan ekspektasi masyarakat (*stakeholder perspective*) sebagai suatu langkah konstruktif untuk meningkatkan kemampuan individu, unit, organisasi serta menganalisa objek tupoksi, mengidentifikasi masalah-masalah, kebutuhan-kebutuhan, kendala,

hambatan, kesempatan dan peluang-peluang yang diformulasikan menjadi langkah/usaha/strategi-strategi untuk mengatasi masalah-masalah, kebutuhan-kebutuhan, serta memanfaatkan peluang dan kesempatan yang relevan, merancang ide/gagasan dan rencana aksi untuk digunakan secara efektif atas dasar sumber daya yang berkesinambungan yang diimplementasikan secara nyata, dimonitor dan dievaluasi serta memanfaatkan umpan balik sebagai pelajaran.

IKP₇ Indeks penguatan implementasi kebijakan.

Pada indikator kinerja pendukung ini, penilaiannya didasari pada penguatan organisasi melalui implementasi kemampuan dalam memberikan petunjuk arahan dan daya kemampuan organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan pimpinan Polri, sebagai suatu yang harus dimiliki dan dijalankan satker pembina fungsi kepolisian mulai dari unsur pengawas dan pembantu pimpinan (Inspektorat, Biro dan Bidang), unsur pelaksana tugas Pokok (Direktorat dan Satuan Brimob), agar kapabilitas dan kapasitas organisasi menjadi efektif dan optimal, melalui rekapitulasi jumlah kegiatan kapabilitas dan kapasitas organisasi yang efektif selama TAB. Adapun pendekatan yang digunakan adalah dimensi penguatan kapabilitas dan dimensi penguatan kapasitas organisasi. Ruang lingkup dalam penguatan kapabilitas menyangkut kemampuan satker pembina fungsi memberikan petunjuk dan arahan dalam bentuk surat, surat telegram, aturan dalam bentuk keputusan, peraturan dan penyelenggaraan MoU untuk meningkatkan kemampuan. Sedangkan penguatan kapasitas organisasi menyangkut peningkatan daya tampung kemampuan organisasi melalui sosialisasi, asistensi, supervisi, bimbingan teknis dan rapat teknis. Adapun capaian dari indikator kinerja ini sebagai berikut :

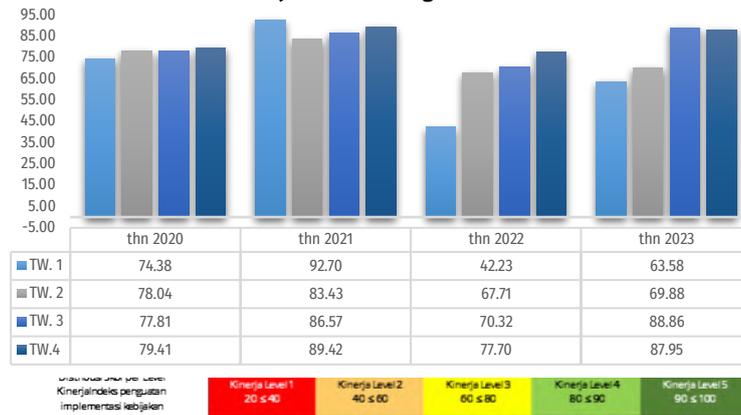
Tabel 18. Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP Indeks penguatan implementasi kebijakan.

SS₅ Manajemen pengawasan Kepolisian yang akuntabel									
IKP₇ Indeks penguatan implementasi kebijakan									
Realisasi 2020-2022				Realisasi 2020-2022			Realisasi 2020-2022		
Triwulan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	realisasi	target	% capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2024	% capaian target 2024
I	74,38	92,7	42,23	63,58	74,00	85,92%	50,56%	75,00	84,78%
II	78,04	83,43	67,71	69,88	74,00	94,43%	3,20%	75,00	93,17%
III	77,81	86,57	70,32	88,86	74,00	120,00%	26,36%	75,00	118,48%
IV	79,41	89,42	77,7	87,95	74,00	118,85%	13,19%	75,00	117,27%

Apabila melihat **realisasi tahun 2023**, maka **target kinerja Indeks penguatan implementasi kebijakan tercapai 118,85%**, dan apabila dibandingkan dengan **realisasi kinerja TAB-1**, maka mengalami kenaikan sebesar **13,19%**. **Selanjutnya dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024**, maka **capaian kerjanya masih di atas 100%**. Artinya kinerja yang telah dilaksanakan pada TAB berhasil mencapai target, dan tentunya apabila memandang tantangan tugas masa yang akan datang yang penuh dengan dinamika, maka masih tetap perlu dilakukan akselerasi performa kinerja yang diiringi dengan usaha dan kreativitas untuk mempertahankan dan menjaga kualitas dan kuantitas implementasi kebijakan kepolisian dalam mendukung kinerja sasaran strategis manajemen pengawasan kepolisian yang akuntabel. Secara umum terdapat beberapa **hal-hal yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dalam penguatan implementasi kebijakan Polri** di lingkungan Polda Lampung dan

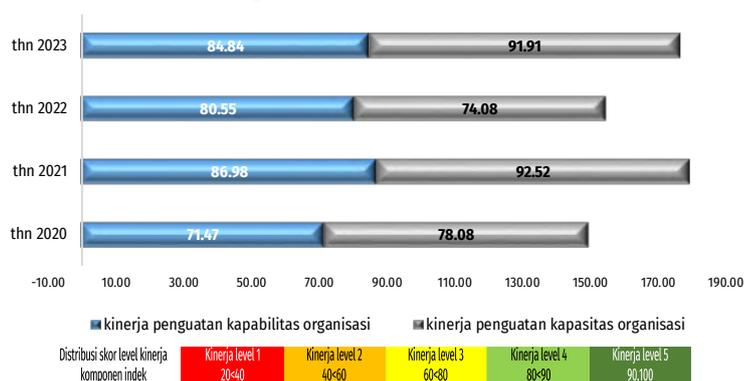
jajaran adalah akselerasi monitoring terhadap kegiatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas yang dilakukan satker pembina, baik unsur pengawas/pembantu pimpinan maupun unsur pelaksana tugas pokok di tingkat Polda, bagaimana agar aturan, kebijakan program pimpinan, dapat diimplementasi oleh semua satker di lingkungan Polda Lampung. Berikut ini gambaran dinamika indeks penguatan implementasi kebijakan per-triwulan dalam empat tahun terakhir berdasarkan skala *likert 1-5* sebagai berikut.

Gambar 43. Dinamika kinerja indeks penguatan implementasi kebijakan dalam tiga tahun terakhir.



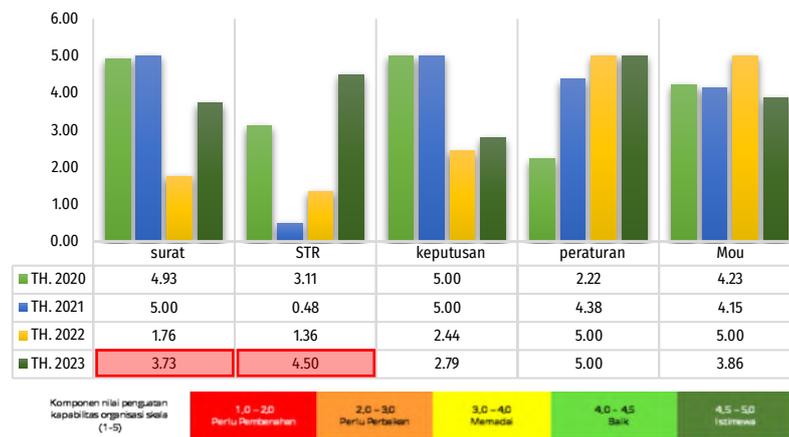
Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan penguatan implementasi kebijakan, dalam setiap triwulan selama empat tahun terakhir ini, berada pada kinerja level 2-5, yaitu pada rentang kinerja 40–95 pada skala likert. Pada tahun 2023 perbandingan kinerja pada triwulan I dan II diawali pada kinerja level 3, kemudian pada triwulan III dan IV berada pada kinerja level 4. Pada tahun ke empat Renstra ini kinerja penguatan implementasi kebijakan setiap triwulannya kinerjanya berada di bawah 2021 dan di atas kinerja tahun 2022, tetapi tetap realisasi kinerjanya masih dapat mencapai target. Secara umum keberhasilan dari kinerja ini, menunjukkan bahwa sampai akhir tahun 2023, kinerja penguatan kapabilitas dan kapasitas organisasi yang diselenggarakan unsur baik fungsi pengawas/pembantu pimpinan maupun unsur pelaksana tugas pokok secara komplementer memberikan kontribusi terhadap terwujudnya penguatan implementasi kebijakan, yang patut diapresiasi. Selanjutnya untuk mengetahui lebih detailnya, sampai sejauh mana kontribusi **dua komponen penyusun IKP → Indeks penguatan implementasi kebijakan** pada tiga tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 44. Perkembangan kontribusi 2 komponen kinerja indeks penguatan implementasi kebijakan.



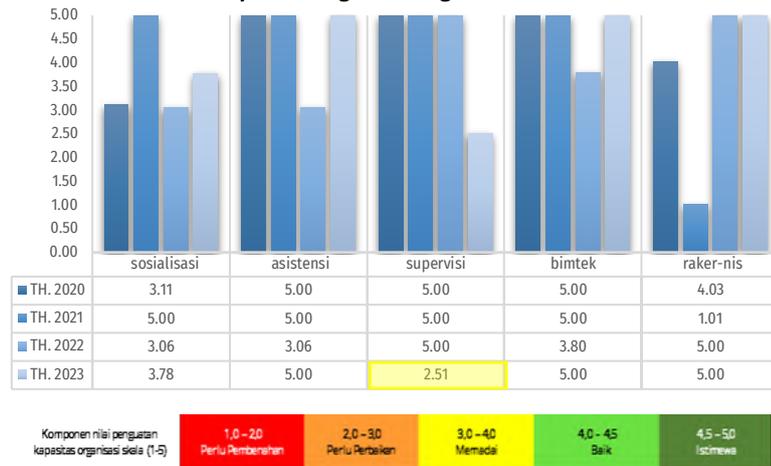
Sepanjang **tahun 2023 terhadap kinerja dua komponen penyusun kinerja penguatan implementasi kebijakan berada pada kinerja level 4** Semua komponen kinerja penguatan implementasi kebijakan baik penguatan kapabilitas organisasi maupun penguatan kapasitas organisasi. Terlihat kinerja komponen tahun 2023 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, hal ini secara umum dapat mendukung terhadap pencapaian target pada angka indeks yang telah disepakati pada Renstra 2020-2024 pada nilai indeks 87,95. Adapun **faktor yang mempengaruhi terhadap pencapaian kinerja** komponen indikator IKP-7 Indeks penguatan implementasi kebijakan sampai dengan saat ini, adalah berkaitan dengan upaya pelaksanaan kegiatan penguatan kapabilitas dan kapasitas yang lebih selektif prioritas, sehingga kegiatannya lebih pada kualitas, disesuaikan dengan kebutuhan fungsi pada satker yang dibinanya, disamping memperbanyak kegiatan monitoring dan evaluasi oleh setiap satker pembina fungsi. Selanjutnya untuk melihat sejauh mana kontribusi kinerja sub komponen dari masing-masing komponen nilai penguatan kapabilitas dan penguatan kapasitas organisasi selama empat tahun terakhir sebagai berikut:

Gambar 45. Kontribusi kinerja subkomponen nilai penguatan kapabilitas organisasi empat tahun terakhir



Pada tahun 2023 kinerja Nilai penguatan kapabilitas organisasi yang terdiri lima subkomponen, masing-masing penerbitan direktif baik melalui surat dan surat telegram, penetapan aturan melalui surat keputusan Kapolda dan Peraturan Kapolda serta penyelenggaraan MoU. Terlihat kinerja penerbitan direktif surat, direktif melalui surat telegram dan keputusan mengalami kenaikan dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya. Untuk penerbitan peraturan terlihat kinerjanya stabil dan untuk MoU mengalami penurunan, karena ada beberapa MoU dan Perjanjian Kerja sama habis masa berlakunya. Kinerja penguatan kapabilitas dan kapasitas organisasi pada TAB 2023 ini disesuaikan dengan kemampuan dan situasi yang berkembang dalam mendukung pencapaian target perspektif di atasnya pada peta strategi Polda Lampung. Kemudian apabila melihat kinerja Nilai penguatan kapasitas organisasi yang terdiri dari lima subkomponen mulai dari penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, aisitensi, supervisi, bimbingan teknis/TOT dan rapat-rapat teknis mulai dari kegiatan rapat staf, rapat kerja dan gelar operasional dan pembinaan sebagai berikut:

Gambar 46. Kontribusi kinerja subkomponen nilai penguatan kapasitas organisasi tiga tahun terakhir.



Terlihat kinerja subkomponen Nilai penguatan kapasitas organisasi pada tahun 2023 kegiatan sosialisasi, asistensi dan bimtek nilainya cukup memadai dan

PENGUATAN KAPABILITAS ORGANISASI					
UNSUR DALAM SOTK POLDA	SURAT	TR/STR	KEP	PERKAPOLDA	MoU
Unsur Pengawas/Pembantu Pimp.	3033	911	232	0	32
Unsur Pelaks Tupoksi	946	468	26	15	63
Unsur Pendukung	309	107	16	0	24

PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI					
UNSUR DALAM SOTK POLDA	SOSIALISASI	ASISTENSI	SUPERVISI	LATNIS/BINTEK/ TOT	RAPAT STAF RAKERNIS, GO
Unsur Pengawas/Pembantu Pimp.	83	38	16	51	69
Unsur Pelaks Tupoksi	83	47	37	139	67
Unsur Pendukung	45	5	7	50	35

Tabel 19. Kegiatan penguatan kapabilitas dan kapasitas organisasi, 2023

terdapat subkomponen sosialisasi dan supervisi mengalami penurunan dibanding tahun 2022, sedangkan kegiatan asistensi, bimtek dan rakernis berada pada nilai 5, menunjukkan pelaksanaan kegiatan yang istimewa. Secara keseluruhan kegiatan penguatan kapasitas organisasi tahun 2023 tidak terdapat nilai kinerja yang perlu diperbaiki, tetapi perlu ditingkatkan dengan menggali bagian-bagian dari tupoksi pada SOTK Polda yang dirasakan perlu dikuatkan kembali. Selanjutnya banyaknya kegiatan penguatan kapabilitas dan kapasitas organisasi berdasarkan SOTK Polda Lampung, mulai dari unsur pengawas/pembantu pimpinan terdiri dari 10 satker (Itwasda, Roops, Rorena, Rolog, Ro SDM, Bidpropam, Bidkum, Yanma, Spripim, Bidhumas); unsur pelaksana tugas pokok yang terdiri dari 11 satker (Ditintelkam, Ditbinmas, Ditsamapta, Ditpolairud, Ditlantas, Ditpamobvit, Satbrimob, Ditreskrim, Ditreskrimsus, Ditresnarkoba, Dittahti) serta 4 satker unsur pendukung (Biddokkes, Bidkeu, Bid TIK dan SPN), hasil rekapitulasi kegiatan tersebut, menunjukkan bahwa baik kegiatan penguatan kapabilitas maupun kapasitas organisasi yang dilakukan satker unsur pengawas/pembantu pimpinan adalah yang terbanyak, kemudian disusul unsur pelaksana tugas tugas pokok dan satker pada unsur pendukung.

IKP-8 Indeks Tatakelola Kepolisian

Pada indikator kinerja ini penilaian didasari pada Instrumen untuk mengukur kinerja dalam mendukung program reformasi birokrasi Polri. ITK menjadi landasan bagi pengambilan kebijakan berdasarkan bukti dan alat perbandingan kinerja yang objektif, adil dan akurat, berdasarkan tujuh prinsip *good governance* setiap tahun anggaran berjalan.

Gambar 47. tujuh prinsip dalam penilaian ITK.



> Diadopsi dari Prinsip Good Governance kemudian diturunkan serangkaian **actionable indicators**
 > Terdapat kurang lebih 900 indikator pada Satker Polda dan 350 indikator pada Satker Polres

Adapun yang menjadi dasar dalam perhitungan ini adalah Perkap Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengukuran Tata Kelola Polri. Terdapat total lebih dari 900 indikator pertanyaan yang harus dijawab dan dilengkapi data dukung yang selanjutnya diunggah ke dalam kertas kerja yang sebelumnya telah disiapkan dalam microsite yang berisi worksheet dalam googlespreadsheet berikut upload data dukung dari masing pertanyaan, yang kemudian dilakukan verifikasi oleh Rorena Polda Lampung selaku pembina fungsi reformasi birokrasi Polri di Polda Lampung. Selanjutnya tim pokja melakukan penilaian mandiri terhadap data jawaban dari setiap pertanyaan indikator ITK tersebut. Kemudian secara virtual perwakilan 12 Polres menerima hasil evaluasi pada akhir TAB. Berikut ini *timeline* kegiatan penilaian ITK Polda Lampung sebagai berikut:

Tabel 20. *Timeline* kegiatan penilaian mandiri ITK.

No.	Kegiatan	Bulan												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Penerbitan sprin Pokja ITK satker	■	■											
2.	Rapat internal Pokja ITK satker		■	■										
3.	Melaksanakan rengiat tatakelola satker			■	■	■	■	■	■	■	■			
4.	Pemutahiran data dukung ITK satker				■	■	■	■	■	■	■	■		
5.	Pembinaan RBP di Satker													
6.	Pengumpulan data dukung ITK satker									■	■	■		
7.	Upload pengisian ITK mandiri oleh satker berikut data dukungnya										■	■	■	
8.	Evaluasi penilaian mandiri oleh Rorena												■	■
9.	Penyampaian hasil penilaian ITK mandiri Polda Lampung													■

Untuk jenis indikator dalam penilaian ITK ini masing-masing terdapat indikator umum, yang merupakan indikator yang ada pada semua satker, dan digunakan untuk mengukur seluruh satker dan terdapat 25 indikator generik pada satker Polda yang dalam hal ini sepakat dari tahun 2020 yang dilakukan penilaian ITK Polda Lampung yaitu padan 12 Polres. Sedangkan indikator penilaian lainnya yang spesifik yaitu yang hanya berlaku pada satker/satfung tertentu saja sesuai tupoksi. Adapun untuk penilaian ITK TAB 2022 merupakan penilaian mandiri yang dilakukan khususnya pada 12 Polres di Polda Lampung. Selanjutnya hasil capaian dari indikator kinerja pendukung ini sebagai berikut:

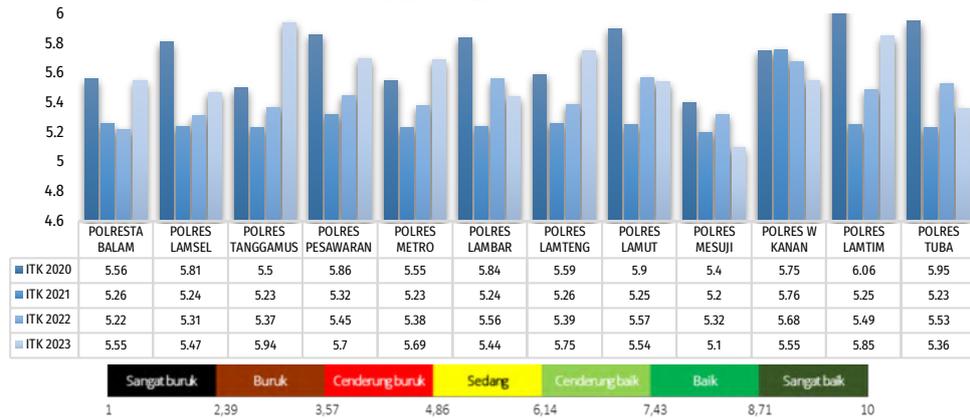
Tabel 21. Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP Indeks tatakelola Kepolisian TAB 2023.

SS ₅ Manajemen pengawasan Kepolisian yang akuntabel							
IKP ₈ Indeks tata kelola Kepolisian (ITK)							
Realisasi 2020-2022		Tahun 2023			Renstra Polda Lampung 2020-2024		
		realisasi	target	% capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2024	% capaian terhadap target 2024
2020	5,73	5,58	5,4	103,33%	2,57%	5,5	101,45%
2021	5,25						
2022	5,44						

Apabila melihat **realisasi tahun 2023**, maka **target kinerja indeks Tata Kelola Kepolisian tercapai 103,33%**, dan apabila dibandingkan dengan **realisasi kinerja TAB-1**, maka mengalami kenaikan sebesar **2,57%**. Selanjutnya dibandingkan dengan **target jangka menengah tahun 2024** masih dapat **tercapai 101,45%**. Artinya kinerja tata kelola kepolisian yang telah dilaksanakan selama TAB berhasil mencapai target, dan tentunya apabila memandang tantangan tugas pelayanan publik dasar pada masa yang akan datang, yang penuh dengan dinamika, maka masih perlu untuk ditingkatkan performa kinerja yang diiringi dengan usaha perbaikan dalam penatakelolaan fungsi kepolisian yang ada sesuai dengan indikator penilaian sebagai mana amanat dari Perkap Nomor 5 Tahun 2018. Hasil dari realisasi kinerja indeks tata kelola kepolisian Polda Lampung samapai dengan saat ini berdasarkan penilaian terhadap 12 Polres yang dijadikan role model dalam penatakelolaan fungsi kepolisian sebagai mana yang telah disepakati dalam Renstra 2020-2024.

Keberhasilan kinerja ini tentunya merupakan upaya bersama baik dari pembina fungsi Rorena maupun 12 Polres yang ditunjuk dalam meningkatkan pemahaman bersama terhadap implementasi indeks tatakelola kepolisian sebagai fondasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Polri. Fungsi RBP Rorena Polda Lampung perlu terus meningkatkan penguatan dalam implementasi reformasi birokrasi pada satker di lingkungan Polda Lampung. Karena dalam penilaian ITK ini, terdapat pertanyaan indikator-indikator yang harus detail yang disertai dengan jawaban yang lengkap dengan bukti pendukungnya, hal ini guna menambah skor nilai yang sesuai dengan ekspektasi sebagai mana metodologi AHP (analitical Hierarchy process). Metodologi AHP merupakan metode yang digunakan untuk melakukan analisis dengan pemilihan-pemilihan sebagai alternatif dalam penilaiannya. Hal ini menyangkut tujuh prinsip (kompetensi, keadilan, perilaku, transparansi, efektivitas, responsif dan akuntabilitas), yang harus ada pada satker yang dinilai, kemudian masing-masing prinsip tersebut terdapat indikator lengkap dengan pengukurannya menyangkut isu pada delapan area perubahan reformasi birokrasi, (indikator tentang SDM, sarpras, anggaran, pengawasan, sistem dan metode, inovasi dan sistem pelaporan). Berikut ini disajikan gambar sebaran skor hasil penilaian ITK TAB 2022 sebagai berikut:

Gambar 48 Dinamika skor ITK pada 12 Polres Polda Lampung empat tahun terakhir.



Terlihat hasil skor penilaian ITK pada dua belas Polres yang ditunjuk berada kisaran skor 5 dengan kategori sedang dalam sistem penilaian indeks tatakelola kepolisian. Selanjutnya upaya untuk meningkatkan nilai indeks tata kelola kepolisian ini; pertama bahwa dalam mengimplementasikan tatakelola kepolisian ini diperlukan komitmen bersama baik dari unsur pimpinan maupun seluruh personel, untuk bersama-sama memperbaiki pelaksanaan tugas melalui tujuh prinsip tata kelola; kedua harus selalu siap siaga melakukan penguatan melalui langkah konstruktif dengan ekspektasi yang jelas, sudah jelas terjalin komunikasi mengenai harapan dari setiap anggota Satker dengan hasil yang diinginkan; ketiga setiap anggota satker menyadari dan memahami mengapa berpartisipasi dalam tata kelola kepolisian keempat setiap personel satker memiliki kompetensi untuk berpartisipasi dan mengambil area tanggung jawab yang diberikan dan menyusun strategi dalam penyelesaian tugasnya; kelima setiap personel satker memahami batasan-batasan yang jelas, seberapa jauh anggota boleh memberikan solusi; keenam setiap personel satker bersedia berkolaborasi dalam bekerja yang efektif; tujuh jalin komunikasi yang baik antar personel satker disertai dengan kreativitas, bertanggung jawab, fokus dan terarah menuju budaya kerja yang harmonis.

IKP., Indek kepuasan pelayanan kepolisian

Indikator kinerja ini memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan administrasi kepolisian di lingkungan Polda Lampung dan jajaran, dalam mengakomodir layanan dasar publik (pelayanan yang umumnya dibutuhkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Personel Polri yang profesional dan kepuasan masyarakat merupakan pondasi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian secara umum. Personel Polri yang prediktif, responsibilitas, transparan berkeadilan yang didukung dengan sarana prasarana yang memadai menjadi harapan masyarakat yang mendapatkan pelayanan yang paripurna. Hal ini sejalan dengan program Kapolri transformasi menuju Polri yang presisi, program yang keempat yaitu transformasi pelayanan publik. Hal yang diharapkan dari IKU ini adalah adanya ekspektasi yang baik dan positif dari masyarakat atas pelayanan administrasi kepolisian, khususnya pelayanan pada fungsi SPKT, satpas SKCK, satpas SIM dan pelayanan satu atap terhadap STNK dan BPKB. Indikator kinerja ini diukur melalui penyebaran kuisiner Indeks Kepuasan Masyarakat secara online pada 54 sentra pelayanan administrasi Kepolisian, yang meliputi SPKT, Satpas SKCK, Satpas SIM dan

Samsat. Berikut ini tabel analisa dan evaluasi capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi kepolisian sebagai berikut:

Tabel 22. Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi kepolisian.

SS ₅ Manajemen pengawasan Kepolisian yang akuntabel									
IKP, Indeks kepuasan layanan kepolisian									
Realisasi 2020-2022		Tahun 2023			Renstra Polda Lampung 2020-2024				
		realisasi	target	% capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2024	% capaian target 2024	Target nasional	% capaian target nasional
2020	96,19	84,05	82,00	102,50%	3,77%	83	101,27%	79	106,39%
2021	87,40								
2022	81,00								

Apabila melihat **realisasi tahun 2023**, maka **target kinerja indeks kepuasan masyarakat tercapai 102,50%**, dan apabila dibandingkan dengan **realisasi kinerja TAB-1**, maka mengalami kenaikan sebesar **3,77%**. Selanjutnya dibandingkan dengan **target jangka menengah tahun 2024**, maka **capaian kerjanya masih di atas 100%**, demikian juga apabila dibandingkan dengan **target nasional pada poin 79** maka **capainya juga masih di atas 100%**. Keberhasilan ini dimungkinkan terjadi dikarenakan, pertama perbedaan metode yang digunakan Polda Lampung dalam memperoleh nilai IKM dengan mengadopsi Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik, sedangkan Mabes Polri menggunakan metode tersendiri melalui Puslitbang Polri. Akan tetapi dalam kenyataan realisasinya tidak menunjukkan perbedaan realisasi hasil penelitian berada pada kategori baik.

Artinya kinerja pelayanan administrasi kepolisian melalui pencatatan registrasi yang telah dilaksanakan pada TAB berhasil mencapai target, dan tentunya apabila memandang tantangan tugas pelayanan publik dasar pada masa yang akan datang, yang penuh dengan dinamika, maka masih tetap perlu untuk menjaga performa kinerja yang diiringi dengan usaha dan kreativitas dalam melakukan pelayanan dasar publik secara lebih kompleks dan integral dengan pelayanan publik pemerintahan daerah. Secara umum beberapa **hal yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dalam pelayanan dasar publik yang diselenggarakan di lingkungan Polda Lampung dan jajaran adalah tetap konsentrasi pada sentra-sentra layanan publik dasar kepolisian yang ditujukan kepada masyarakat Provinsi Lampung dan sekitarnya yang tergelar pada satuan Polres jajaran dan terus melakukan melakukan inovasi, guna meningkatkan pelayanan dengan memperhatikan mekanisme proses bisnis yang sesuai dengan amanat UU no. 25 Tahun 2009 yang dijalankan melalui Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012**. Terutama menyangkut implemtnasi Pasal 21 UU RI Nomor 25 Tahun 2009. Dimana pada Pasal tersebut diterangkan, bahwa yang menjadi komponen dasar dalam standar pelayanan publik sekurang-kurangnya memuat tentang dasar, persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana dan prasarana/fasilitas, kompetensi petugas, pengawas internal, penanganan pengaduan/saran dan masukan, jumlah petugas, jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan prosedur, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko dari keragu-raguan, dan terdapat evaluasi kinerja terhadap petugas pelaksana pelayanan. Ditambah lagi aspek

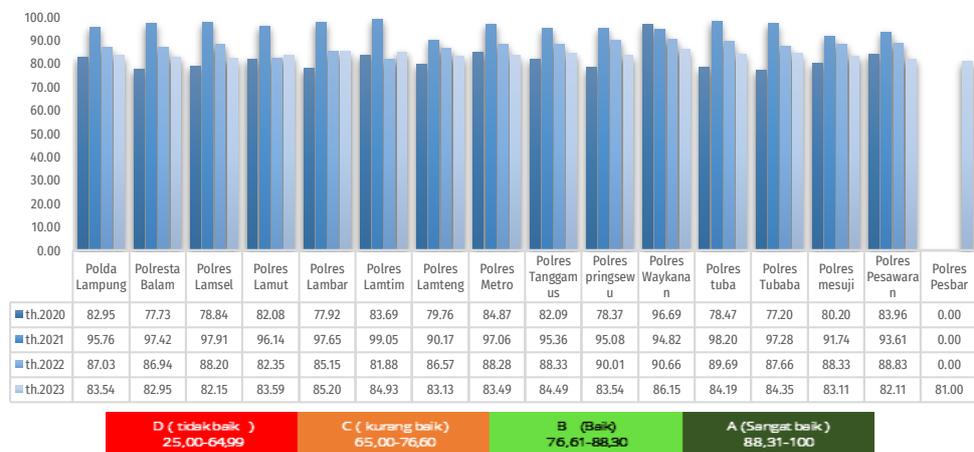
ruangan/tempat dan petugas berikut kelengkapan dalam pelayanan menjadi penentu dari kualitas pelayanan, sehingga memberikan kesan positif bagi masyarakat pengguna layanan dasar kepolisian, demikian juga memberikan kontribusi bagi kepercayaan publik terhadap kepolisian. Demikian juga fungsi reformasi birokrasi terus melakukan pembinaan yanlik guna mendukung pembangunan zona integritas guna meraih legitimasi sosial dan legitimasi hukum, sebagai mana amanat dari kebijakan Kapolda Lampung saat ini. Berikut ini gambaran dinamika kinerja kepuasan layanan kepolisian per-triwulan dalam empat tahun terakhir berdasarkan skala likert 1-5 sebagai berikut.

Gambar 49. Dinamika kinerja komponen indeks kepuasan layanan kepolisian dalam empat tahun terakhir.



Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan dasar kepolisian setiap tahunnya terus berada pada kategori baik, pada tahun 2023 mengalami penurunan nilai indeks dari tahun 2021, walaupun masih di atas nilai target. Secara umum keberhasilan dari kinerja ini, menunjukkan bahwa sampai akhir tahun 2023, kinerja kepuasan layanan kepolisian yang diselenggarakan 54 unit layanan dasar publik di jajaran Polda Lampung memberikan kontribusi terhadap terwujudnya sasaran strategis manajemen pengawasan yang akutabel. Selanjutnya untuk mengetahui lebih detailnya, sampai sejauh mana kontribusi satker pada **kinerja IKP-9, Indeks kepuasan layanan kepolisian** pada empat tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 50. Dinamika kontribusi satker pada Indeks kepuasan layanan kepolisian empat tahun terakhir.



Sepanjang tahun 2023 terhadap kinerja satker terhadap pencapaian target IKP-9, indeks kepuasan layanan kepolisian berada pada kategori B (baik). Semua komponen kinerja indeks kepuasan layanan kepolisian, secara umum realisasi kinerjanya melebihi dari target pada angka indeks yang telah

Tabel 23. Hasil Kajian IKM Polda Lampung, 2023

NO.	SATKER	NILAI IKM				NILAI IKM SATKER	NILAI MUTU IKM (kinerja unit pelayanan)
		SPKT	SKCK	SIM	STNK/BPKB		
1	SPKT Polda Lampung	86,50				86,50	BAIK
2	Ditintelkam		82,14			82,14	BAIK
3	Ditlantas			91,95	87,66	89,81	BAIK
4	Polresta Balam	81,73	82,32	84,80		82,95	BAIK
5	Polres Lamsel	77,09	84,90	84,98	81,63	82,15	BAIK
6	Polres Lamtim	76,53	84,84	85,31	93,05	84,93	BAIK
7	Polres Metro	82,03	82,20	85,28	84,44	83,49	BAIK
8	Polres Lamteng	81,09	84,19	84,45	82,78	83,13	BAIK
9	Polres Tuba	84,76	84,61	82,57	84,80	84,19	BAIK
10	Polres Mesuji	83,44	80,99	75,69	92,32	83,11	BAIK
11	Polres Lamut	84,12	81,79	85,27	83,16	83,59	BAIK
12	Polres Waykanan	84,26	84,38	87,26	88,68	86,15	BAIK
13	Polres Lambar	77,56	85,33	89,64	88,25	85,20	BAIK
14	Polres Tanggamus	82,31	89,64	82,77	83,25	84,49	BAIK
15	Polres Pesawaran	71,13	83,14	92,81	81,37	82,11	BAIK
16	Polres Pringsewu	84,27	81,14	85,31	83,44	83,54	BAIK
17	Polres Tubaba	82,36	86,21	83,87	84,97	84,35	BAIK
18	Polres Pesbar	78,66	78,68	85,91	80,73	81,00	BAIK
	Nilai IKM per jenis yan	BAIK	83,53	85,49	85,37	83,88	BAIK
Nilai IKM Polda Lampung 2023						84,05	BAIK

disepakati pada Renstra 2020-2024 pada nilai indeks 82. Adapun faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan kinerja IKP-9 indeks kepuasan layanan kepolisian sampai dengan saat ini, adalah upaya kerja keras dari jajaran yang menjalankan tupoksi pelayanan langsung kepada masyarakat mampu mengimplementasikan dari kriteria dan persyaratan

pelayanan dasar publik kepolisian. Hal ini dilakukan guna mewujudkan ekspektasi kepercayaan dan harapan masyarakat akan layanan dasar publik kepolisian. Hal ini karena terdapat upaya perbaikan dan peningkatan yang berkelanjutan, mulai aspek personel; menyangkut kompetensi, responsif dan perilaku, kemudian aspek sarpras menyangkut ruang kerja dan almatsus pendukung pelayanan. Sedangkan aspek sistem dan metode menyangkut efektivitas, transparansi, keadilan dan akuntabilitas. Dari *evidence* ini nyata telah ada upaya peningkatan dalam mengimplementasikan standar pelayanan yang jelas, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU pelayanan publik.

IKP-10 Persentase penanganan pengaduan masyarakat.

Pada indikator kinerja pendukung ini, penilaian kinerja didasari pada penanganan pengaduan masyarakat atas kinerja satuan kerja di lingkungan Polda Lampung dan jajaran dalam melaksanakan tupoksi kepada masyarakat selama TAB, yang dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Apip, dalam hal ini Itwasda Polda Lampung sebagaimana amanat dalam Perkap 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggara sistem pengendalian instansi pemerintahan (SPIP) di lingkungan Polri. Oleh karena itu Polda Lampung berupaya mengukur sampai sejauh mana penanganan dumas dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja tupoksi Polda Lampung dan jajaran. Adapun capaian dari indikator kinerja ini sebagai berikut:

Tabel 24. Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP Persentase penanganan pengaduan masyarakat.

SS ₅ Manajemen pengawasan Kepolisian yang akuntabel											
IKP ₁₀ Persentase penanganan pengaduan masyarakat											
Triwulan	Realisasi 2020-2022			Realisasi 2020-2023			Realisasi 2020-2022				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	realisasi	target	% capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2024	% capaian target 2024	Target nasional	% capaian target nasional
I	100%	84,62%	95,45%	96,77%	75,00%	120,00%	1,38%	78,00%	120,00%	79,00%	120,00%
II	97,92%	89,13%	97,50%	100%	75,00%	120,00%	2,56%	78,00%	120,00%	79,00%	120,00%
III	93,98%	78,08%	98,59%	100%	75,00%	120,00%	1,43%	78,00%	120,00%	79,00%	120,00%
IV	93,98%	78,82%	99,08%	100%	75,00%	120,00%	0,93%	78,00%	120,00%	79,00%	120,00%

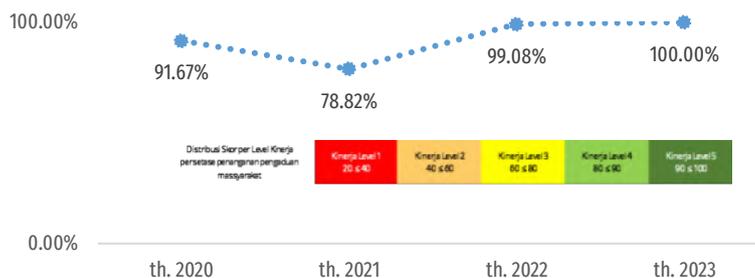
Apabila melihat **realisasi tahun 2023**, maka **target kinerja persentase penanganan pengaduan masyarakat tercapai 120,00%**, dan apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja TAB-1, maka mengalami kenaikan sebesar **0,93%**. Selanjutnya dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024, maka **capaian kinerjanya masih di atas 100%**, demikian juga dengan **target nasional 79,00%**, **capainnya tetap di atas 120,00%**. Artinya kinerja yang telah dilaksanakan pada TAB berhasil gemilang mencapai target, dan tentunya apabila memandang tantangan tugas masa yang akan datang yang penuh dengan dinamika, maka masih tetap perlu untuk menjaga performa kinerja yang diiringi dengan usaha dan kreativitas untuk tetap mempertahankan kinerja tupoksi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pada internal Polda Lampung. Secara umum beberapa **hal yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dalam penanganan dumas di lingkungan Polda Lampung dan jajaran adalah tetap konsentrasi melakukan pengawasan terhadap adanya dumas yang ditujukan kepada satker di lingkungan Polda Lampung dan jajaran dan terus melakukan monitoring sampai mekanisme manajemen risiko terhadap proses bisnis yang dijalankan satker apakah tetap konsisten berjalan sesuai dengan alur pekerjaannya. Faktor keaktifan fungsi Itwasda melakukan monev yang optimal, sehingga memberikan kepastian terbukti atau tidak terhadap tuduhan dumas tersebut, demikian memberi jaminan solusi yang akuntabel dan objektif dalam pelaksanaan tupoksi.** Berikut ini gambaran dinamika kinerja penanganan dumas per-triwulan dalam tiga tahun terakhir berdasarkan skala likert 1-5 sebagai berikut.

Gambar 51. Dinamika kinerja persentase penanganan dumas dalam empat tahun terakhir.



Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan penanganan dumas setiap triwulan selama empat tahun terakhir ini, berada pada kinerja level 3-5, yaitu pada rentang kinerja 60–100 pada skala likert. Pada tahun 2023 perbandingan kinerja mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan IV menunjukkan dinamika kinerja yang stabil dibanding tahun 2022. Secara umum keberhasilan dari kinerja ini, menunjukkan bahwa sampai akhir tahun 2023, kinerja penanganan dumas yang diselenggarakan fungsi Itwasda dengan kontribusi dari satker yang mendapat pengaduan, secara komplementer memberikan kontribusi terhadap terwujudnya manajemen pengawasan yang akuntabel. Selanjutnya untuk mengetahui lebih detailnya, sampai sejauh mana kontribusi **kinerja IKP-10 Persentase penanganan dumas** pada empat tahun terakhir pada skala likert 1-5 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 52. Perbandingan kinerja penanganan dumas empat tahun terakhir.



Sepanjang **tahun 2023 terhadap kinerja kinerja penanganan dumas dikategorikan istimewa**. Semua komponen kinerja penanganan dumas, secara umum realisasi kinerja melebihi dari target pada angka indeks yang telah disepakati pada Renstra 2020-2024 pada nilai indeks 100%. Adapun **faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan kinerja IKP₋₁₀ persentase penanganan dumas** sampai dengan saat ini, adalah upaya kerja keras dari jajaran fungsi Itwasda dan satker yang diadakan untuk bergerak cepat melakukan upaya memberikan penjelasan yang akuntabel dan objektif, mulai dari kegiatan verifikasi, audit kinerja, reviu, sampai pada pendalaman pengawasan khusus dan rekomendasi terjadinya penyimpangan untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh fungsi Propam dan fungsi Reskrim. Hal ini dilakukan guna mewujudkan ekspektasi kepercayaan dan harapan masyarakat kepada institusi sebagai tempat untuk menjamin kualitas kinerja tupoksi kepolisian yang diselenggarakan Polda Lampung dan jajaran. Bersama ini disajikan perkembangan dumas dalam tiga tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 25. Perkembangan jumlah dumas dalam empat tahun terakhir.

No.	Kesatuan	Dumas			
		th. 2020	th. 2021	th. 2022	th. 2023
1.	Satker mapolda Lampung	33	90	58	67
2.	Polresta Balam	22	59	16	19
3.	Polres Lamsel	6	6	3	4
4.	Polres Tanggamus	-	7	1	4
5.	Polres Pesawaran	-	-	1	-
6.	Polres Pringsewu	-	1	-	1
7.	Polres Lamteng	5	2	8	-
8.	Polres Metro	2	4	-	2
9.	Polres Lamtim	7	2	5	6
10.	Polres Tuba	7	1	6	7
11.	Polres Mesuji	2	1	2	6
12.	Polres Tubaba	-	-	1	1
13.	Polres Lamut	7	1	3	8
14.	Polres Lambar	1	4	1	2
15.	Polres Pesbar	-	-	-	1
16.	Polres WKanan	3	4	3	-
	jumlah	95	182	108	128

Data jumlah dumas empat tahun terakhir, secara umum dari tahun 2022 terus mengalami kenaikan, yakni pada satker di Mapolda dan pada 10 Polres di jajaran. Sementara itu terdapat tiga Polres yang tidak mendapat dumas yaitu Polres Pesawaran, Lampung Tengah dan Polres Way Kanan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa faktor meningkatnya dumas, dikarenakan makin kritisnya masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kepolisian dan satu sisi lainnya menunjukkan kinerja akuntabilitas satuan kerja di lingkungan Polda Lampung perlu perbaikan kinerja yang lebih konkrit. **Selanjutnya realisasi kinerja persentase penyelesaian dumas Polda Lampung tahun 2023 yang sebesar**

100%, apabila dibanding dengan target nasional tahun 2022 yang sebesar 79%, maka capaiannya lebih dari 100%. Melihat hal ini maka **upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kinerja penanganan dumas adalah** di samping peningkatan kapasitas dan kapabilitas fungsi itwasda, juga peningkatan komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi dalam dari pada Apip

Tabel 26. Data dumas TAB 2023.

No.	satuan kerja	jumlah sisa dumas tab-1	jumlah dumas baru	jumlah terbukti	jumlah tidak terbukti	sisa dumas/dalam proses	Persentase penanganan dumas TAB
1	Satker di mapolda	0	67	5	62	0	100,00%
2	Polresta Balam	0	19	0	19	0	100,00%
3	Polres Lamsel	0	4	2	2	0	100,00%
4	Polres Tanggamus	0	4	0	4	0	100,00%
5	Polres Pesawaran	0	0	0	0	0	0,00%
6	Polres Pringsewu	0	1	0	1	0	100,00%
7	Polres Lamteng	0	0	0	0	0	0,00%
8	Polres Metro	0	2	0	2	0	100,00%
9	Polres Lamtim	0	6	0	6	0	100,00%
10	Polres Tuba	0	7	0	7	0	100,00%
11	Polres Mesuji	0	6	0	6	0	100,00%
12	Polres Tubaba	0	1	0	1	0	0,00%
13	Polres Lamut	0	8	1	7	0	100,00%
14	Polres Lambar	0	2	0	2	0	100,00%
15	Polres Pesbar	0	1	0	1	0	100,00%
16	Polres W. Kanan	0	0	0	0	0	0,00%
	jumlah	0	128	8	120	0	100,00%

dengan satker yang diadukannya terjalin harmonis dan sinergi untuk bersama-sama memberikan penjelasan yang akuntabel terhadap objek yang diadukannya, sehingga menjadi objektif dan akuntabel. Peningkatan kemampuan tersebut juga didukung dengan

optimalisasi proses bisnis dalam pengawasan dan pengendalian organisasi di lingkungan Polda Lampung. Fungsi Itwasda selaku Apip juga melakukan analisa dan evaluasi terhadap dumas baik yang terbukti maupun tidak terbukti, untuk dijadikan atensi bagi satker agar tetap menjaga kualitas tupoksi yang menjadi tanggung jawabnya.

Hasil monev maka dapat dilokalisir daerah hukum Polda Lampung yang mendapat dumas tahun 2023 berada pada 12 Polres (**Gambar 49**) kecuali Polres Pesawaran, Lampung Tengah dan Pesisir Barat. Selanjutnya adapun data pengaduan masyarakat tahun 2023 secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Dari data tersebut diatas dapat dianalisa, bahwa sepanjang tahun 2023 jumlah dumas yang ditangani sebanyak 128 dari total 128 dumas. Sehingga realisasi persentase penanganan dumas adalah sebesar 100%. Sementara dumas yang tidak terbukti sebanyak 120 dumas. Data-data di atas menjadi atensi bagi penguatan kapasitas dan kapabilitas pada tahun berikutnya. Terutama sekali bagi satker-satker yang mendapat pengaduan masyarakat, agar dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tupoksinya, untuk memberikan pelayanan yang paripurna, objektif dan akuntabel, sambil terus membenahi proses bisnis organisasi, apabila ditemukan kelemahan.

Kendala umum yang terjadi selama ini terjadinya dumas adalah menyangkut transparansi dalam

Gambar 53. Daerah hukum Polda yang terdapat dumas, 2023



proses penyidikan fungsi reskrim, sehingga terkesan dari yang berperkara merasa dirugikan sehingga menimbulkan ketidakpuasan yang dimanifestasikan masyarakat dengan mengirim surat pengaduan kepada lembaga Kopolnas, Kemenkopolhukam, Sekretaris Negara, atau LSM maupun lembaga lainnya dan perorangan. Oleh karena itu pengawasan dan pengendalian yang antisipatif mutlak diperlukan dengan mengedepankan transformasi menuju Polri yang presisi; selalu prediktif dalam menangani perkara, resposibilitas terhadap perkara yang disedang dihadapi dan mengedepankan transparansi yang berkeadilan. Sebagai mana arahan kebijakan Kapolda Lampung saat ini Irjen Pol Helmy Santika, S,IK, M.Si. bahwa setiap personel baik sebagai individu maupun kesatuan harus meraih legitimasi sosial dan legitimasi hukum.

IKP-11 Persentase penyelesaian pelanggaran personel.

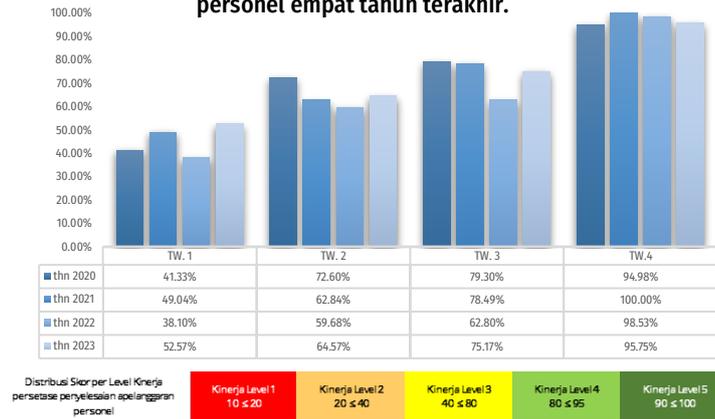
Pada indikator kinerja ini penilaian didasari pada penyelesaian pelanggaran personel di lingkungan Polda Lampung yaitu pelanggaran disiplin dan Kode Etik Profesi Polri pada setiap TAB, guna menjamin kepastian hukum dan terpeliharanya etos kerja, dedikasi dan loyalitas terhadap organisasi. Adapun capaian dari indikator kinerja ini sebagai berikut:

Tabel 27. Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP Persentase pelanggaran personel.

SS: Manajemen pengawasan Kepolisian yang akuntabel									
IKP-11 Persentase penyelesaian pelanggaran personel									
Realisasi 2020-2022			Tahun 2023			Renstra Polda Lampung 2020-2024			
Triwulan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	realisasi	target	% capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2024	% capaian target 2024
I	41,33%	49,04%	38,10%	52,57%	86%	61,13%	37,98%	88%	59,74%
II	72,60%	62,84%	59,68%	64,57%	86%	75,08%	8,19%	88%	73,38%
III	79,30%	78,49%	62,80%	75,17%	86%	87,41%	19,70%	88%	85,42%
IV	94,98%	100,%	98,53%	95,75%	86%	111,34%	-2,82%	88%	108,81%

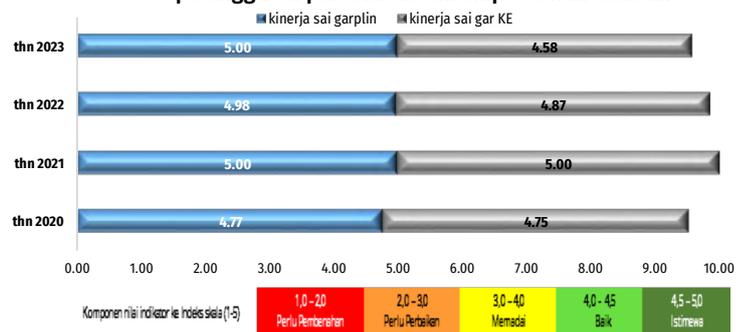
Apabila melihat **realisasi tahun 2023**, maka **target kinerja persentase penyelesaian pelanggaran personel tercapai 111,34%**, dan apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja TAB-1, maka mengalami penurunan sebesar **2,82%**. Selanjutnya dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024, maka **capaian kinerjanya masih di atas 100%**. Artinya kinerja yang telah dilaksanakan pada TAB berhasil mencapai target, dan tentunya apabila memandang tantangan tugas masa yang akan datang yang penuh dengan dinamika, maka masih tetap perlu melakukan akselerasi performa kinerja yang diiringi dengan usaha dan kreativitas untuk mempertahankan dan menjaga kualitas dan kuantitas pelaksanaan tupoksi dalam mendukung kinerja penyelesaian pelanggaran personel. Secara umum beberapa **faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dalam penyelesaian pelanggaran personel** di lingkungan Polda Lampung dan jajaran adalah akselerasi mitigasi terhadap pelanggaran personel yang dilakukan oleh fungsi Propam. Faktor keaktifan fungsi Propam memproses penyelesaian dan harmonisasi peran optimal dari atasan pemberi hukuman (ankum) untuk memberikan kepastian hukuman, serta pemberian bantuan hukum dalam upaya memperoleh hukuman yang objektif bagi personel yang melanggar. Berikut ini gambaran dinamika kinerja penyelesaian pelanggaran personel per-triwulan dalam tiga tahun terakhir berdasarkan skala likert 1-5 sebagai berikut.

Gambar 54. Dinamika kinerja persentase penyelesaian pelanggaran personel empat tahun terakhir.



Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan penyelesaian pelanggaran personel setiap triwulan selama empat tahun terakhir ini, berada pada kinerja level 2-5, yaitu pada rentang kinerja 30–100 pada skala likert. Pada tahun 2023 perbandingan kinerja mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan III menunjukkan dinamika kinerja yang menaik dibanding tahun 2022, tapi untuk triwulan IV 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2023, walaupun target tercapai. Secara umum keberhasilan dari kinerja ini, menunjukkan bahwa sampai akhir tahun 2023, kinerja penyelesaian pelanggaran personel yang diselenggarakan fungsi Propam dan jajaran secara komplementer memberikan kontribusi terhadap terwujudnya penyelesaian pelanggaran personel yang patut dibanggakan. Selanjutnya untuk mengetahui lebih detailnya, sampai sejauh mana kontribusi **dua komponen penyusun IKP-11 Persentase penyelesaian personel** pada empat tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini:

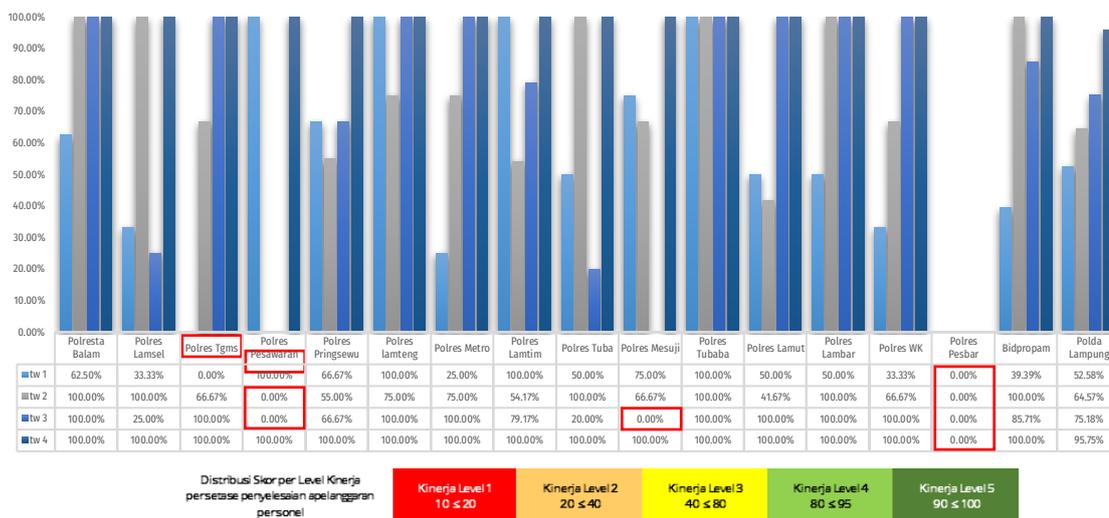
Gambar 55. Perkembangan kontribusi 2 komponen kinerja penyelesaian pelanggaran personel dalam empat tahun terakhir.



Sepanjang **tahun 2023 terhadap kinerja dua komponen penyusun kinerja penyelesaian pelanggaran personel dikategorikan istimewa.** Semua komponen kinerja penyelesaian pelanggaran personel baik penyelesaian pelanggaran disiplin maupun penyelesaian pelanggaran kode etik Polri, secara umum dapat diselesaikan melebihi target pada angka indeks yang telah disepakati pada Renstra 2020-2024 pada nilai indeks 95,75. Adapun **faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan kinerja** komponen indikator IKP-11 persentase penyelesaian pelanggaran personel sampai dengan saat ini, adalah upaya kerja keras dari jajaran fungsi Propam Polda Lampung untuk bergerak cepat melakukan upaya pengungkapan pelanggaran yang dilakukan personel Polda Lampung dan jajaran, mulai dari kegiatan pengamanan, penyelidikan,

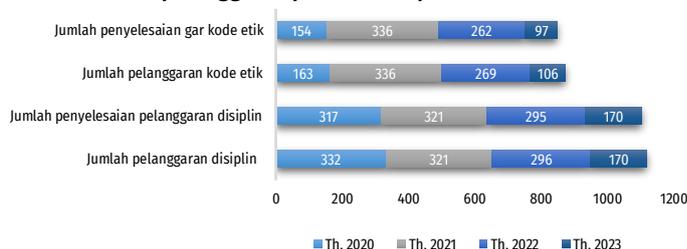
penyelesaian pelanggaran, pencatatan dan penelitian personel, rehabilitasi sampai pada pembinaan disiplin dan pembinaan etika profesi. Hal ini dilakukan guna mewujudkan ekspektasi kepercayaan dan harapan masyarakat kepada institusi sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan hakiki sebagai manusia akan rasa aman, tertib dan rasa adil. Bersama ini disajikan kinerja penyelesaian pelanggaran personel pada TAB 2023 pada satuan Polres jajaran Polda Lampung sebagai berikut:

Gambar 56. Dinamika kinerja penyelesaian pelanggaran personel pada 15 Polres T.A. 2023.



Dari 15 satuan Polres yang ada, pada **triwulan I** terdapat dua daerah hukum Polres yang belum ada sama sekali pelanggaran personel, tetapi 13 Polres lainnya kinerja penyelesaian pelanggaran personel antara 25-100. Memasuki **triwulan II** masih terdapat dua satuan Polres yang belum ada pelanggaran personel dan kinerja penyelesaian pada triwulan II ini berkisar kinerja 41-100. Kinerja pada **triwulan III** terdapat tiga Polres yang tidak ada pelanggaran personelnnya. Yaitu Polres Pesawaran, Mesuji dan Pesisir Barat, adapun kinerja penyelesaian pelanggaran berkisar antara 25-100. Memasuki kinerja **triwulan IV** tinggal Polres Pesisir Barat yang tidak ada pelanggaran personelnnya, adapun kinerja penyelesaian pelanggaran personelnnya yang diselenggarakan Polres berada pada level kinerja 5. Keadaan ini memberikan kontribusi positif bagi kesehatan organisasi guna mendukung pencapaian target kinerja dampak yaitu indeks kamtibmas. Terlihat dalam grafik dinamika realisasi kinerja penyelesaian Polda Lampung terus meningkat setiap triwulannya. Adanya kecenderungan meningkat ini diharapkan terus dipertahankan melalui konsolidasi kapasitas dan kapabilitas fungsi propam. Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana **evidence yang diperoleh dari kinerja fungsi Propam selama empat tahun terakhir** dapat dianalisis dari data jumlah pelanggaran dan penyelesaian pelanggaran personel sebagai berikut:

Gambar 57. Perbandingan kuantitas pelanggaran dan penyelesaian pelanggaran personel empat tahun terakhir.



Perbandingan kuantitas pelanggaran disiplin dan Kode Etik Polri dan penyelesaian selama empat tahun terakhir, terlihat pada tahun 2023 kuantitas pelanggaran disiplin mengalami tren penurunan sebesar 42,57% dan penurunan penyelesaiannya sebesar 42,37%. Sedangkan untuk kuantitas pelanggaran kode etik Polri juga mengalami tren penurunan yaitu sebesar 42,37% dan tren penurunan penyelesaiannya sebesar 62,98%. Dari data ini menunjukkan bahwa kegiatan mitigasi terhadap pelanggaran personel yang dijalankan oleh fungsi propam berdampak pada kualitas disiplin dan etika profesi yang dijalankan personel Polda Lampung.

Dari tabel tersebut **apabila diklasifikasikan berdasarkan pelanggaran disiplin dan Kode Etik Polri lebih dari 20 perkara dalam satu tahun** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 28. Perbandingan kuantitas pelanggaran personel pada empat tahun terakhir.

Satker	tahun 2020				tahun 2021				tahun 2022				tahun 2023			
	garplin	sai garplin	gar KEP	sai KEP	garplin	sai garplin	gar KEP	sai KEP	garplin	sai garplin	gar KEP	sai KEP	garplin	sai garplin	gar KEP	sai KEP
Polresta Balam	21	20	10	9	23	23	32	32	14	14	15	15	6	6	11	9
Polres Lamsel	32	32	11	11	28	28	15	15	13	13	8	8	12	12	5	3
Polres Tgms	15	9	16	15	25	25	11	11	18	18	7	7	12	12	2	2
Polres Pesawaran	18	18	6	10	6	6	6	6	8	8	6	6	2	2	5	5
Polres Pringsewu	20	20	3	5	12	12	13	13	9	9	10	10	13	13	2	2
Polres lamteng	25	25	13	9	17	17	22	22	14	14	24	24	12	12	4	4
Polres Metro	8	8	9	10	16	16	15	15	5	5	4	4	6	6	4	4
Polres Lamtim	40	39	10	10	22	22	26	26	21	21	22	21	10	10	12	11
Polres Tuba	18	18	8	8	6	6	9	9	20	20	35	35	12	12	3	3
Polres Mesuji	39	37	16	12	37	37	17	17	16	16	13	13	8	8	6	6
Polres Tubaba	11	11	6	6	15	15	11	11	18	18	11	11	13	13	5	5
Polres Lamut	14	14	5	5	25	25	23	23	33	33	18	18	17	17	6	5
Polres Lambar	15	14	6	7	16	16	17	17	42	42	32	31	8	8	3	2
Polres WK	12	12	17	14	14	14	29	29	29	29	19	18	12	12	5	5
Polres Pesbar													0	0	0	0
Bidpropam	34	31	21	18	49	49	58	58	30	30	37	35	17	17	26	26
Polda Lampung	332	317	163	154	321	321	336	336	296	295	269	262	170	170	106	97

Pada tahun **2023 jumlah pelanggaran yang lebih dari 20 pelanggaran terdapat pada Bidpropam, sedang di pelanggaran pada 15 Polres berada dibawah dua puluh perkara.** Hal ini menunjukkan bahwa kuantitas pelanggaran di daerah hukum Polda Lampung semakin menurun dengan bertambahnya kesatuan kewilayahan, keadaan ini menunjukkan rentang kendali kepala kesatuan sangat berpengaruh terhadap terjadinya pelanggaran disamping meningkatnya kegiatan mitigasi pelanggaran efektif menurunkan terjadinya pelanggaran. Dari data ini juga materi kinerja bagi fungsi propam dalam menentukan prioritas pembinaan disiplin dan pembinaan etika pada tahun berikutnya.

IKP₁₂ Persentase penyelesaian masalah hukum.

Pada indikator kinerja ini penilaiannya didasari pada permasalahan hukum yang berakibat terjadinya gugatan (pra peradilan/perdata/TUN) kepada Polda Lampung dan satuan kerja baik di Mapolda maupun Polres, atas kesalahan proses bisnis atau tindakan maladministrasi pada TAB 2023. Adapun komponen-komponen yang dibutuhkan dalam pengukuran **IKP₁₂ persentase penyelesaian masalah hukum** adalah rekapitulasi kegiatan pemberian bantuan hukum kepada satker dan personel Polda Lampung yang mendapat gugatan baik praperadilan, perdata maupun gugatan TUN baik dari masyarakat maupun dari gugatan TUN dari personel Polda Lampung. Perhitungan persentase gugatan baik yang dimenangkan Polri maupun yang kalah, dibatasi pada hasil putusan pengadilan pada TAB. Selanjutnya dari hasil kinerja ini, Polda Lampung hendak

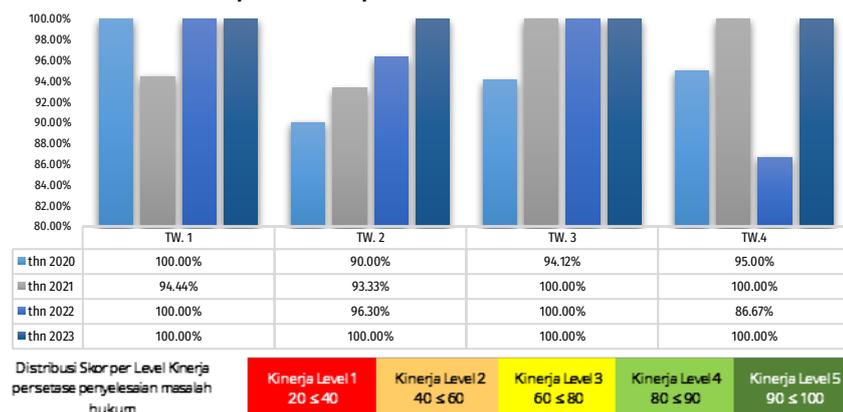
menunjukkan hasil pengawasan terhadap profesionalisme dan kompetensi yang dimiliki sumberdaya manusia Polda Lampung dalam melaksanakan transformasi menuju Polri yang prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan dalam setiap pelaksanaan tupoksi. Berikut ini capaian dari **IKP-12 persentase penyelesaian masalah hukum** sebagai berikut:

Tabel 29. Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP Persentase penyelesaian masalah hukum.

SS ₅ Manajemen pengawasan Kepolisian yang akuntabel											
IKP ₁₂ Persentase penyelesaian masalah hukum											
Realisasi 2020-2022				Tahun 2023			Renstra Polda Lampung 2020-2024				
Triwulan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	realisasi	target	% capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2024	% capaian target 2024	Target nasional	% capaian target nasional
I	100%	94,44%	100%	100%	91,00%	109,89%	stabil	91,20%	109,65%	79%	120,00%
II	90,00%	93,33%	96,30%	100%	91,00%	109,89%	3,84%	91,20%	109,65%	79%	120,00%
III	94,12%	100%	100%	100%	91,00%	109,89%	stabil	91,20%	109,65%	79%	120,00%
IV	95,00%	100%	86,67%	100%	91,00%	109,89%	15,38%	91,20%	109,65%	79%	120,00%

Apabila melihat **realisasi tahun 2023**, maka **target kinerja persentase penyelesaian masalah hukum tercapai 109,89%**, dan apabila dibandingkan dengan **realisasi kinerja TAB-1**, maka mengalami kenaikan sebesar **15,38%**. Demikian juga dibandingkan dengan **target jangka menengah tahun 2024**, maka **capaian masih di atas 100%**. Serta apabila dibanding dengan **target nasional pada angka 79%**, maka **capaiannya di atas 100%**. Untuk tahun ini **kinerja yang telah dilaksanakan, telah berhasil mencapai target**, dan tentunya apabila memandang tantangan tugas masa pada akhir masa Renstra 2020-2024 dan menyongsong Renstra berikutnya yang penuh dengan dinamika, maka masih perlu fungsi Bidkum untuk melakukan akselerasi performa kinerja yang diiringi dengan usaha dan kreativitas untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan tupoksi dalam mendukung kinerja penyelesaian masalah hukum, terutama dalam hal ini adalah fungsi reskrim yang mempunyai kerawanan terjadinya perlawanan hukum. Secara umum terdapat beberapa **hal-hal yang dapat mempengaruhi terhadap kegagalan dalam penyelesaian masalah hukum di lingkungan Polda Lampung dan jajaran adalah proses bisnis penyidikan tidak dijalankan dengan baik, tidak mengikuti perkembangan peraturan yang ada sehingga menjadi celah hukum bagi tersangka ataupun pihak yang berperkara dengan mengajukan gugatan peradilan karena proses penyidikan yang diselenggarakan kepolisian terjadi maladministrasi**. Berikut ini gambaran dinamika kinerja penyelesaian pelanggaran personel per-triwulan dalam empat tahun terakhir berdasarkan skala likert 1-5 sebagai berikut.

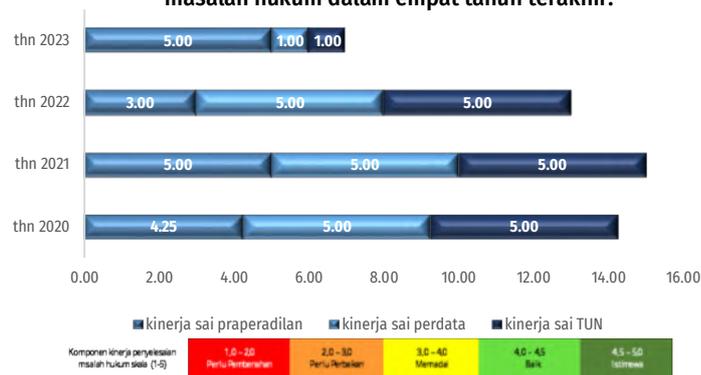
Gambar 58. Dinamika kinerja persentase penyelesaian pelanggaran personel empat tahun terakhir.



Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan penyelesaian pelanggaran personel setiap triwulan selama empat tahun terakhir ini, berada pada kinerja level 4-5, yaitu pada rentang kinerja 80–100 pada skala likert. Pada tahun 2023 perbandingan kinerja mulai dari triwulan I sampai triwulan IV

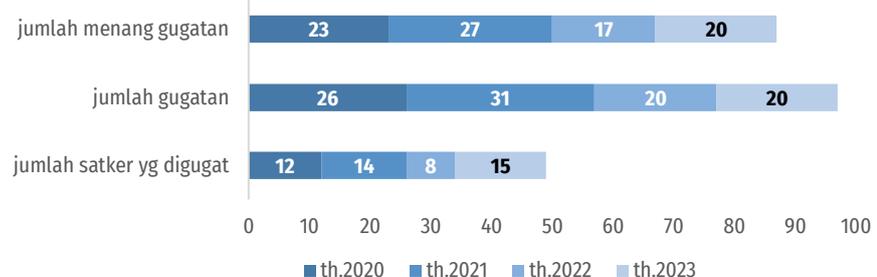
berada pada kinerja level 5. Hasil analisis, performa kinerja penyelesaian masalah hukum baik praperadilan, peradilan perdata dan peradilan TUN menunjukkan kemenangan. Selanjutnya untuk mengetahui secara terperinci, sampai sejauh mana kontribusi **tiga komponen penyusun IKP-12 Persentase penyelesaian masalah hukum** pada empat tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 59. Perkembangan kontribusi 3 komponen kinerja penyelesaian masalah hukum dalam empat tahun terakhir.



Sepanjang **tahun 2023 terdapat kinerja tiga komponen penyusun penyelesaian masalah hukum dapat dikategorikan memadai.** Sampai pada akhir triwulan IV performa kinerja penyelesaian masalah hukum praperadilan telah dimenangkan oleh Polda Lampung. Sedangkan masalah hukum keperdataan dan tata usaha negara pada akhir periode IV tidak ada pengaduan masalah hukum, sehingga hasil konversi kinerjanya menunjukkan angka skala 1. Masing-masing permasalahan hukum; pengaduan di peradilan keperdataan berlangsung dari triwulan I-III, peradilan TUN hanya terjadi pada triwulan I. Hal ini menunjukkan pelayanan administrasi yang berdampak hukum dapat dilaksanakan dengan baik, melalui perbaikan proses bisnis penyidikan dan pelayanan admistrasi penyelesaian pelanggaran kode etik Polri. Hasil analisis perkembangan gugatan selama empat tahun terakhir dipeoleh data sebagai berikut:

Gambar 60. Perkembangan jumlah gugatan peradilan selama empat tahun terakhir



Dari data kuantitas dari jumlah gugatan selama empat tahun terakhir terdapat kecenderungan untuk naik, sementara itu jumlah gugatan yang dimenangkan selama empat tahun relatif stabil. Kemudian jumlah satker yang digugat terus mengalami kenaikan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa permasalahan

hukum yang berujung pada gugatan peradilan baik praperadilan dan peradilan perdata, terutama terletak pada kelemahan pada melakukan penutahiran pelayanan administrasi proses bisnis penyidikan untuk mengikuti perkembangan aturan yang digunakan dalam penegakan hukum.

Sedangkan adanya permasalahan hukum yang berujung pada gugatan TUN,

Gambar 61. Pemetaan masalah hukum, 2023



adalah kecerobohan dan kekurangtelitian serta penguasaan pada proses bisnis administrasi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap personel Polda Lampung, baik pada proses pemeriksaan, persidangan kode etik, proses banding dan proses penerbitan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat. Selanjutnya **upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja penyelesaian masalah hukum adalah di samping peningkatan kapasitas dan kapabilitas dari para penyidik dan penyidik dalam memahami aturan yang berhubungan teknis penyidikan, disamping juga peningkatan kemampuan fungsi hukum.**

Peningkatan kemampuan tersebut didukung pula dengan optimalisasi dalam pengawasan penyidikan dan sertifikasi terhadap penyidik. Fungsi Bidkum selaku kuasa hukum institusi juga melakukan analisa dan evaluasi terhadap gugatan peradilan yang kalah, untuk dijadikan atensi bagi penyidik untuk tetap menjaga kualitas profesi yang menjadi tanggung jawabnya. Demikian juga apabila dilokalisir, maka permasalahan hukum tahun 2023 berada pada delapan Polres yaitu Polresta Bandar Lampung, Polres Lampung Utara, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Way Kanan, Tanggamus, Pesawaran dan Polres Pesisir Barat. Selanjutnya data permasalahan hukum tahun 2023 secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 30. Data jumlah masalah hukum pada satker yang terjadi TAB 2023.

No	Satker	Jumlah gugatan			Jumlah menang gugatan			Jumlah kalah gugatan			Persentase gugatan menang		
		pra peradilan	Perdata	TUN	pra peradilan	Perdata	TUN	pra peradilan	Perdata	TUN	pra peradilan	Perdata	TUN
1	Polda Lampung	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	100%
2	Ditreskrim	2	-	-	2	-	-	-	-	-	100%	-	-
3	Ditreskrimsus	1	-	-	1	-	-	-	-	-	100%	-	-
4	Ditresnarkoba	1	-	-	1	-	-	-	-	-	100%	-	-
5	Ditlantas	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	100%	-
6	Polresta Balam	2	-	-	2	-	-	-	-	-	100%	-	-
7	Polres Lamut	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	100%	-
8	Polres Lamteng	2	1	-	2	1	-	-	-	-	100%	100%	-
9	Polres Tuba	1	-	-	1	-	-	-	-	-	100%	-	-
10	Polres Way Kanan	1	-	-	1	-	-	-	-	-	100%	-	-
11	Polres Tanggamus	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	100%	-
12	Polres Pesawaran	1	-	-	1	-	-	-	-	-	100%	-	-
13	Polres Pesbar	2	-	-	2	-	-	-	-	-	100%	-	-
	jumlah	13	4	3	13	4	3	0	0	0	100%	100%	100%

Dari data tersebut di atas dapat dianalisa, bahwa sepanjang tahun 2023 semua gugatan mulai dari praperadilan, perdata dan TUN telah dimenangkan Polri

dengan total 20 gugatan dari 13 satker yang digugat. Data-data di atas menjadi atensi bagi penguatan kapasitas dan kapabilitas pada tahun berikutnya. Terutama sekali bagi penyidik dalam menangani kasus perlu diperhatikan mengenai proses bisnis penyidikan yang mengikuti perkembangan peraturan yang ada, dengan tidak henti-hentinya melakukan evaluasi dan koreksi apabila terdapat kelemahan dalam proses penyidikan. Untuk penanganan TUN di samping perlu dilakukan mitigasi terhadap pelanggaran kode etik Polri guna menghindari terjadinya pelanggaran. **optimalisasi** fungsi Bidkum selama ini dalam memberikan bantuan hukum bagi Satker yang digugat, adalah menyangkut koordinasi dengan termohon yang kurang terbuka/jujur dengan fungsi Bidkum selaku kuasa hukum sehingga menimbulkan kesulitan dalam melakukan pembelaan. Sehingga patut diperhatikan dalam upaya mengeliminir gugatan dengan mengedepankan transformasi menuju Polri yang presisi; selalu prediktif dalam menangani perkara, resposibilitas terhadap perkara yang sedang dihadapi dan mengedepankan transparansi yang berkeadilan.

IKP-13 Nilai Kinerja Anggaran.

Penilaian indikator kinerja pendukung ini didasari proses untuk menghasilkan suatu capaian kinerja anggaran pada setiap indikator kinerja pendukung, dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai kinerja anggaran ini diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan oleh 40 satker Polda Lampung ke dalam aplikasi **SMART** Kemenkeu yang berbasis *website*. Adapun capaian dari indikator kinerja ini sebagai berikut:

Tabel 31. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja IKP Nilai Kinerja Anggaran.

SS₅ Manajemen pengawasan Kepolisian yang akuntabel											
IKP₁₃ Nilai Kinerja anggaran (NKA)											
Triwulan	Realisasi 2020-2022			Tahun 2023			Renstra Polda Lampung 2020-2024				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	realisasi	target	% capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2024	% capaian target 2024	Target nasional	% capaian target nasional
I	50,45	53,29	25,30	33,12	78,00	42,46%	30,91%	80	41,40%	94,25	35,14%
II	56,52	55,99	58,78	51,90	78,00	66,54%	-11,70%	80	64,88%	94,25	55,07%
III	60,11	59,92	56,27	75,86	78,00	97,26%	34,81%	80	94,83%	94,25	80,49%
IV	87,10	85,1	85,32	85,98	78,00	110,23%	0,77%	80	107,48%	94,25	91,23%

Apabila melihat **realisasi tahun 2023**, maka **target kinerja Nilai kinerja anggaran tercapai 110,23%**, dan apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja TAB-1, maka mengalami kenaikan sebesar **0,77%**. Selanjutnya dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024, maka capaian kinerjanya di atas **100%**. Tetapi apabila dibanding dengan target nasional dengan angka **94,25** maka capaiannya masih dibawah **100% yaitu 91,23%**. Artinya kinerja yang telah dilaksanakan pada TAB berhasil mencapai target, dan tentunya apabila kontribusi kinerja anggaran untuk tingkat nasional, maka masih tetap perlu dilakukan akselerasi performa kinerja yang diiringi dengan usaha dan kreativitas untuk mempertahankan dan menjaga baik kualitas maupun kuantitas dalam mengelola implementasi kebijakan anggaran kepolisian guna mendukung kinerja sasaran strategis manajemen pengawasan kepolisian yang akuntabel. Secara umum terdapat beberapa **hal-hal yang terus menjadi konsentrasi terhadap keberhasilan dalam nilai kinerja anggaran** di lingkungan Polda Lampung dan jajaran adalah mengakselerasi dan monitoring terhadap

kegiatan peningkatan penilaian indikator ini sebagaimana direktif pada PMK No. 249/PMK/02/2011 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L dengan mengacu pada:

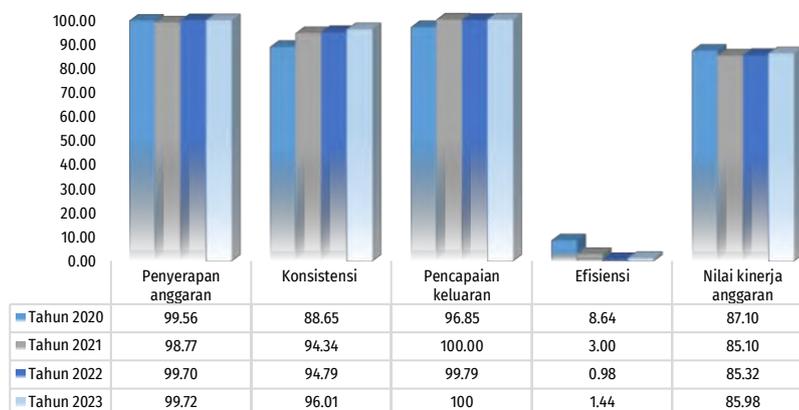
- Penyerapan Anggaran (P), dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker.
- Konsistensi (K) antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan.
- Pencapaian Keluaran (PK), dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran.
- Tingkat efisiensi (NE), dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran.

Adapun kategori nilai kinerja anggaran sebagai berikut:

- >90% - 100 % : Sangat baik
- > 80 % - 90 % : Baik
- > 60 % - 80 % : Cukup
- > 50 % - 60 % : Kurang
- ≤ 50 % : Sangat kurang

Selanjutnya dari hasil perhitungan aplikasi yang terakhir diakses pada tanggal 30 Januari 2023 **realisasi nilai kinerja anggaran Polda Lampung sebesar 85,98 termasuk dalam kategori baik**. Berikut ini disajikan gambar perbandingan nilai kinerja anggaran Polda Lampung selama empat tahun terakhir sebagai berikut:

Gambar 62. Perbandingan nilai kinerja anggaran Polda Lampung periode 2020-2023.



Berdasarkan gambar tersebut di atas, **nilai kinerja anggaran tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 0,77%,** adapun komponen penyusun nilai kinerja anggaran; penyerapan anggaran meningkat dari 99,70 poin menjadi 99,72 atau 0,02%; dan nilai konsistensi mengalami tren kenaikan dari 94,79 menjadi 96,01 atau dengan besaran kenaikan 1,29%; demikian juga

dengan komponen pencapaian keluaran naik dari 99,79 menjadi 1,44 atau naik sebesar 46,94%. Selanjutnya perbandingan nilai kinerja anggaran satker pada empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

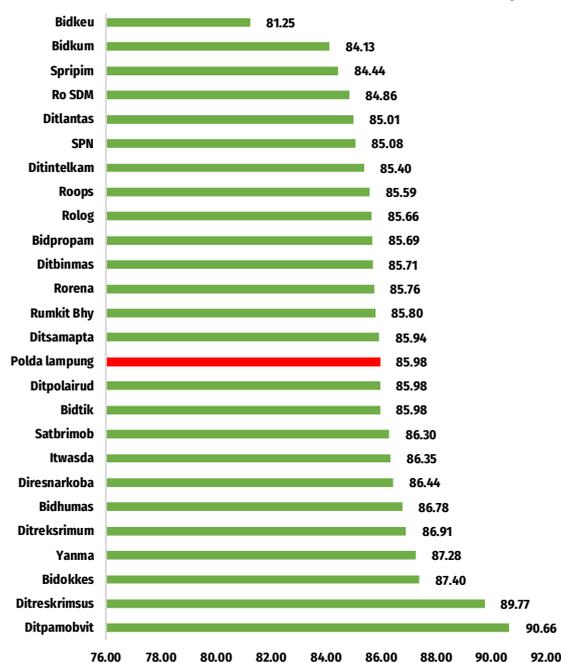
Tabel 32. Perbandingan nilai kinerja anggaran empat tahun terakhir.

NO.	SATKER	NILAI KINERJA ANGGARAN			
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	Sripim	99,81	60,79	85,36	86,35
2	Itwasda	73,08	73,61	86,50	85,59
3	Roops	88,80	65,74	85,12	84,13
4	Bidkum	92,01	41,29	84,94	86,78
5	Bidhumas	87,43	64,86	87,81	85,76
6	Rorena	95,77	78,98	85,59	84,86
7	Ro SDM	69,22	50,72	83,93	85,66
8	Rolog	91,88	65,00	88,19	85,69
9	Bidpropam	83,95	59,05	84,31	85,98
10	Bid TIK	70,47	59,05	86,72	87,40
11	Bidokkes	86,50	95,02	96,00	81,25
12	Bidkeu	84,35	57,81	84,92	84,44
13	Yanma	93,11	70,70	85,53	87,28
14	SPN	85,30	74,67	85,71	85,08
15	Ditintelkam	99,99	47,38	85,96	85,40
16	Ditreksrimum	92,78	73,31	83,42	86,91
17	Ditreskrimsus	89,52	50,47	84,49	89,77
18	Ditresnarkoba	93,77	66,02	84,68	86,44
19	Ditsamapta	83,12	49,64	85,88	85,94
20	Ditlantas	95,84	53,16	85,70	85,01
21	Ditbinmas	87,72	82,13	85,70	85,71
22	Ditpolairud	88,91	59,78	86,17	85,98
23	Ditpamobvit	97,68	68,06	84,02	90,66
24	Satbrimob	87,30	65,51	84,23	86,30
25	Rumkit Bhayangkara	93,05	85,57	84,14	85,80
26	Polresta Balam	85,03	85,39	86,87	85,41
27	Polres Lamsel	87,66	85,79	85,61	84,61
28	Polres Metro	85,77	86,14	86,58	86,97
29	Polres Lamut	86,23	85,61	82,30	85,60
30	Polres Lambar	86,11	85,36	84,91	85,13
31	Polres Tuba	90,92	84,30	84,22	85,70
32	Polres Tanggamus	84,78	89,49	88,05	85,48
33	Polres Lamtim	87,11	85,35	85,69	93,92
34	Polres Way Kanan	82,41	84,43	82,39	81,27
35	Polres Lamteng	91,29	85,03	87,77	85,19
36	Polres Mesuji	83,79	86,00	85,73	87,39
37	Polres Pesawaran	93,44	86,35	85,25	85,68
38	Polres Tubaba	67,90	81,37	83,38	89,49
39	Polres Pringsewu	73,08	50,33	84,58	85,76
40	Polres Pesbar	0,00	0,00	0,00	81,35
	Polda Lampung	87,10	85,10	85,32	85,98

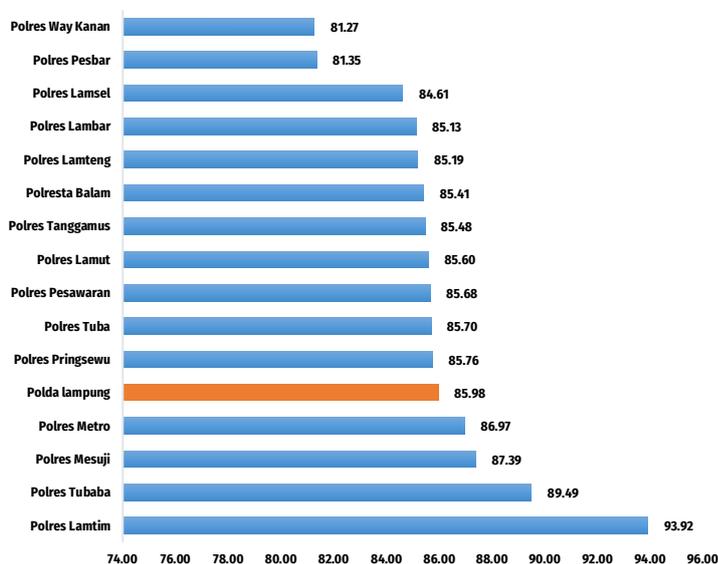
Untuk memudahkan melihat sebaran kontribusi NKA satker terhadap nilai kinerja anggaran Polda Lampung dapat dilihat pada **Gambar 61**. Terlihat bahwa tahun 2023 nilai kinerja anggaran satker telah dipenuhi oleh 40 satker yang ada di Polda Lampung, realisasinya melebihi target NKA 76 poin. Selanjutnya apabila nilai kinerja anggaran tahun 2023 dibandingkan dengan target nasional 95, maka capaian nilai kinerja anggaran Polda Lampung sebesar 91,23%. Kemudian untuk mengetahui sebaran kontribusi NKA satker kepada NKA Polda Lampung pada tahun 2023 ini dapat dijelaskan bahwa terdapat 14 (empat belas) NKA satker Mapolda berada dibawah NKA Polda dan terdapat 11 (sebelas) Satker

Mapolda berada di atas NKA Polda. Dari **Gambar 62**, di bawah ini terlihat bahwa terdapat 11 (sebelas) NKA Polres berada di bawah NKA Polda dan terdapat empat NKA Polres berada di atas NKA Polda yaitu Polres Metro, Mesuji, Tulang Bawang Barat dan Polres Lampung Timur. Fakta bahwa **keberhasilan pencapaian target nilai kinerja anggaran sepanjang TAB 2023**, menunjukkan pengelolaan anggaran sudah menjadi perhatian penuh semua satuan kerja, karena dengan hasil nilai kinerja anggaran 85,98% termasuk pada kategori baik. Secara umum satker dan Polres di lingkungan Polda Lampung telah mengikuti kaidah dalam pengelolaan anggaran, karena apabila tidak mengikuti kaidah dalam pengelolaan anggaran ditimbulkan proses penarikan anggaran yang tidak sesuai waktu, sehingga berpengaruh terhadap nilai kinerja; terdapat adanya salah satu output anggaran yang tidak diserap, sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja anggaran. Untuk tahun yang akan datang, Polda Lampung berusaha untuk memperbaiki pengelolaan program anggaran dengan memberi *stressing* pada program prioritas nasional, dengan

Gambar 63. Sebaran kontribusi NKA satker Mapolda



Gambar 64. Sebaran kontribusi NKA Polres



antar pengembalian fungsi perencanaan satker.

melakukan monev secara holistik, guna mendukung operasional kepolisian di lapangan. Adapun kendala dan hambatan dalam pengelolaan anggaran, umumnya menyangkut pengetahuan pengelolaan anggaran yang berbasis TIK (teknologi, informasi dan komunikasi), terus dilakukan peningkatan kapabilitas dan kapasitas dalam manajemen pengetahuan oleh pembina fungsi Rorena Polda Lampung. Kegiatan peningkatan tersebut mulai dari sosialisasi, asistensi, supervisi, bimbingan teknis, tutorial, di samping intensif menjalin sinergi

C. Realisasi Anggaran.

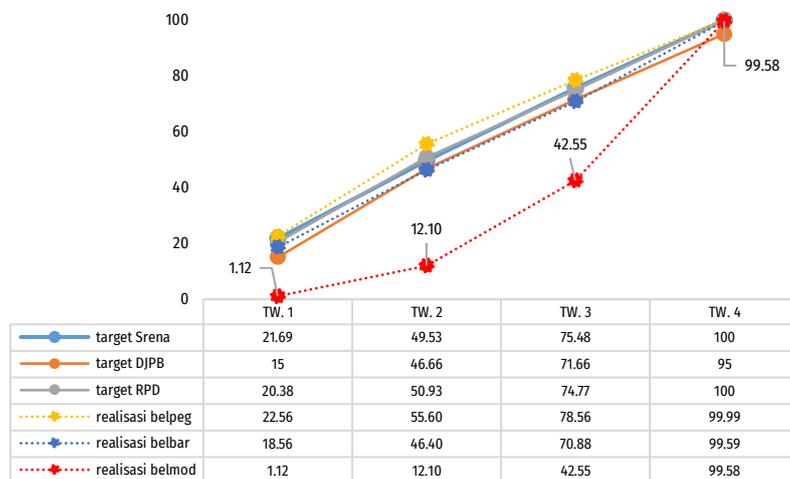
Perbandingan Dipa Polda Lampung selama empat tahun terakhir 2020-2023, dalam perkembangan pagu dan realisasi Polda Lampung sebagai berikut:

Tabel 33. Perbandingan pagu dan realisasi anggaran Polda Lampung 2020-2023.

DIPA POLDA LAMPUNG	TAHUN			
	2020	2021	2022	2023
Pagu awal (Rp.)	1.166.502.186.000	1.271.995.008.000	1.276.370.236.000	1.352.158.376.000
Pagu akhir (Rp.)	1.277.172.925.000	1.310.263.308.000	1.377.147.790.000	1.446.114.789.000
Realisasi (Rp.)	1.273.342.063.000	1.308.313.262.802	1.374.566.857.580	1.443.629.925.883
% realiasi	99,70%	99,85%	99,81%	99,83%

Dinamika persentase penyerapan anggaran T.A. 2023 dibanding 2022 menunjukkan tren kenaikan sebesar 0,02% yakni dari 99,81% naik menjadi 99,83%. Sebagai informasi untuk dinamika persentase penyerapan anggaran berdasarkan jenis belanja, maka diperoleh gambaran sebagai pada gambar berikut ini:

Gambar 65. Dinamika persentase penyerapan anggaran per-jenis belanja T.A. 2023



Terlihat persentase penyerapan anggaran belanja pegawai dari mulai triwulan I sampai dengan IV berada di atas target Srena, RPD maupun target DJPB. Sedangkan belanja barang setiap triwulannya berada diantara target Srena, RPD dan target DJPB. Sedangkan untuk persentase penyerapan anggaran belanja modal pada triwulan I-III berada di bawah target Srena, RPD dan DJPB, tetapi pada akhir TW IV berada di atas target RPD dan Target DJPB. Kesemuanya ini memberikan kontribusi pada pencapaian nilai IKPA Polda Lampung sebesar 97,34 pada akhir tahun 2023. Selanjutnya dari lima program anggaran yang menjadi tanggung jawab Polda Lampung, maka dibawah ini adalah rincian pelaksanaan realisasi anggaran T.A. 2023 sebagai berikut:

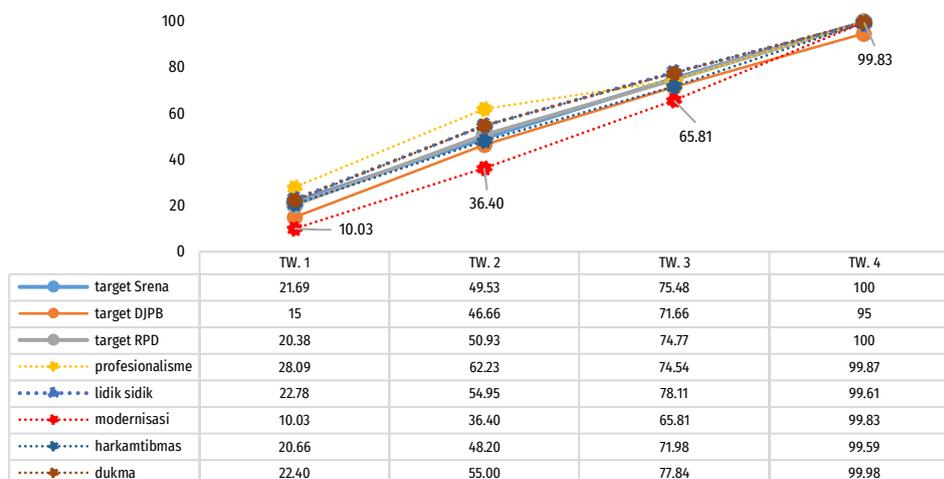
Tabel 34. Program Anggaran Polda Lampung T.A. 2023

No	Nama Program	Pagu Akhir	Realisasi	% Realisasi	Sisa	% Sisa
1.	Profesionalisme SDM	41.810.413.000,00	41.755.986.342,00	99,87%	54.426.658,00	0,13%
2.	Lidik sidik	112.396.017.000,00	111.955.469.664,00	99,61%	440.547.336,00	0,39%
3.	Modernisasi almatsus	205.362.062.000,00	205.019.187.085,00	99,83%	342.874.915,00	0,17%
4.	Harkamtibmas	372.796.036.000,00	371.260.940.279,00	99,59%	1.535.095.721,00	0,41%
5.	Dukungan manajemen	713.750.261.000,00	713.638.342.513,00	99,98%	111.918.487,00	0,02%
	JUMLAH	1.377.147.790.000,00	1.443.629.925.883,00	99,83%	2.484.863.117,00	0,17%

Sumber Data: Aplikasi OM SPAN Kemenkeu R.I. Per 31 Desember 2023

Untuk lebih jelas melihat perkembangan persentase realisasi anggaran pada masing-masing Program Anggaran setiap triwulan dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 66. Dinamika persentase penyerapan program anggaran T.A. 2023



Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa pada triwulan I, II dan III persentase penyerapan program profesionalisme SDM, modernisasi, lidik sidik, dukma dan harkamtibmas berada di antara target Srena, RPD dan target DJPB, sedangkan program modernisasi belum mencapai baik target Srena, RPD maupun DJPB. Selanjutnya pada triwulan IV semua program anggaran sudah berada diantara target Srena, RPD dan target DJPB. Selain dari hasil monitoring dan evaluasi pengendalian anggaran, Polda Lampung juga tetap konsisten berupaya untuk selalu mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan melakukan efisiensi anggaran dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. mulai dari total pagu awal Polda Lampung T.A. 2023 sebesar Rp. 1.352.158.376.000,-.
- b. Selanjutnya terdapat penambahan anggaran dari Sumber Hibah sebesar Rp. 39,098,700,000,- yang terdiri atas:
 - 1) Biro Log Polda Lampung sebesar Rp.10.100.000.000,- (Pengadaan meubelair gedung PPA & Alsintor, lampu kristal GSG, renovasi Rumdin Kapolda, pengadaan meubelair dan interior ruang kerja Kapolda, sarpras penunjang ruang Kapolda, Waka & Irwasda, sarpras dan alsintor Polda Lampung, pengadaan interior & renovasi *guest house*, Alsintor Polda, interior dan meubelair Spri Polda Lampung dan pengadaan interior dan renovasi *guest house*);
 - 2) Bidkeu Polda Lampung sebesar Rp.8.000.000.000,- (Pengadaan ran operasional, alsintor, renovasi rumah dinas, giat Rikkes berkala dan Pam giat masyarakat);
 - 3) Bid TIK Polda Lampung sebesar Rp.500.000.000,- (Pengadaan alat material gedung Command Center Polda Lampung);
 - 4) Satbrimob Polda Lampung sebesar Rp.150.000.000,- (Giat Harkamtibmas);
 - 5) Polresta Bandar Lampung sebesar Rp.2.750.000.000,- (Sewa peralatan jaringan CCTV dan giat operasional satker);

- 6) Polres Lampung Selatan sebesar Rp.800.000.000,- (Dukungan giat operasional dan Operasi Lilin Krakatau 2023);
 - 7) Polres Metro sebesar Rp.500.000.000,- (giat Harkamtibmas Polres Metro);
 - 8) Polres Lampung Utara sebesar Rp.2.000.000.000,- (giat Harkamtibmas, Giat Pam Pilkades serentak dan cipkon Pra Pemilu serentak 2024);
 - 9) Polres Lampung Barat sebesar Rp.420.000.000,- (giat Harkamtibmas, Giat Polisi Cilik Polres Lambar);
 - 10) Polres Tulang Bawang sebesar Rp.4.500.000.000,- (giat Harkamtibmas, giat Pilkakam serentak, Ops Ketupat Krakatau 2024, giat KRYD);
 - 11) Polres Tanggamus sebesar Rp.1.298.700.000,- (giat operasional Polres, pengadaan CCTV satpas SIM, videotron dan 10 unit Laptop);
 - 12) Polres Lampung Timur sebesar Rp.2.700.000.000,- (giat harkamtibmas Polres);
 - 13) Polres Way Kanan sebesar Rp.700.000.000,- (giat harkamtibmas dan Pilkakam serentak);
 - 14) Polres Lampung Tengah sebesar Rp.1.900.000.000,- (giat Harkamtibmas Polres);
 - 15) Polres Pesawaran sebesar Rp.1.000.000.000,- (Giat operasional dan pembangunan gapura masuk Polres);
 - 16) Polres Mesuji sebesar Rp.430.000.000,- (giat lidik sidik narkoba dan giat pam Pilkades);
 - 17) Polres Pringsewu sebesar Rp.200.000.000,- (Pengadaan sound system, AC, Gorden dan laptop);
 - 18) Polres Tulang Bawang Barat sebesar Rp.750.000.000,- (giat operasional Polres);
 - 19) Polres Pesisir Barat sebesar Rp.400.000.000,- (giat Polisi cilik dan PKS Polres).
- c. Kemudian pada TAB 2023 ini telah terlaksana revisi anggaran sebagai berikut:
- 1) Revisi Saldo awal BLU pada Satker Rumkit Bhayangkara Polda Lampung sebesar Rp.40.764.907.000,-.
 - 2) Revisi Penyesuaian Kebijakan Diklat pada satker SPN Polda Lampung Rp.310.760.000,-.
 - 3) Revisi anggaran giat 3107 dan anggaran RT-PCR untuk satker Biro SDM dan Biddokkes sebesar Rp.552.400.000,-.
 - 4) Revisi Pagu Minus menyebabkan penambahan anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp.13.332.621.000,-.
 - 5) Revisi anggaran Pamobvit pada satker Ditpamobvit dan seluruh Polres jajaran sebesar Rp.980.100.000,-.

- 6) Revisi dana Kapitasi pada satker Biddokkes sebesar Rp. 129.568.000,-.

Untuk rincian realisasi penyerapan anggaran pagu akhir pada 40 (empat puluh) satker di lingkungan Polda Lampung dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 35. Realisasi anggaran persatker Polda Lampung T.A. 2023.

NO	SATKER	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	% REALISASI	SISA
1	SPRIPIIM	7.968.650.000	7.933.776.000	7.933.707.680	100,00	68.320
2	DITINTELKAM	32.038.197.000	31.917.040.000	31.916.741.799	100,00	298.201
3	BIDHUMAS	6.084.645.000	5.588.645.000	5.588.562.922	100,00	82.078
4	ITWASDA	4.338.726.000	4.707.628.000	4.707.492.264	100,00	135.736
5	RORENA	5.332.039.000	5.119.216.000	5.119.051.021	100,00	164.979
6	DITRESNARKOBA	13.670.151.000	13.726.532.000	13.725.847.175	100,00	684.825
7	ROLOG	51.551.818.000	63.104.278.000	63.099.112.555	99,99	5.165.445
8	BIDDOKKES	17.247.149.000	16.974.219.000	16.972.703.430	99,99	1.515.570
9	SATBRIMOB	75.471.812.000	74.650.281.000	74.643.230.070	99,99	7.050.930
10	DITRESKRIMSUS	13.586.896.000	15.540.809.000	15.539.087.273	99,99	1.721.727
11	ROOPS	23.351.639.000	14.945.239.000	14.940.707.932	99,97	4.531.068
12	BIDPROPAM	10.056.291.000	10.399.367.000	10.395.101.048	99,96	4.265.952
13	DITLANTAS	25.025.776.000	26.455.489.000	26.436.094.058	99,93	19.394.942
14	BIDKUM	3.644.181.000	3.880.240.000	3.877.163.993	99,92	3.076.007
15	DITPAMOBVIT	12.226.874.000	13.649.153.000	13.637.716.399	99,92	11.436.601
16	DITBINMAS	7.282.499.000	5.545.325.000	5.540.289.780	99,91	5.035.220
17	RO SDM	12.263.819.000	16.198.446.000	16.183.300.235	99,91	15.145.765
18	RUMKIT	31.921.886.000	74.437.850.000	74.348.882.590	99,88	88.967.410
19	YANMA	9.111.772.000	9.911.455.000	9.899.536.206	99,88	11.918.794
20	DITRESKRIMUM	21.189.258.000	21.457.741.000	21.430.274.466	99,87	27.466.534
21	SPN	26.095.941.000	26.076.595.000	26.028.890.384	99,82	47.704.616
22	BID TIK	5.027.762.000	6.156.636.000	6.141.844.281	99,76	14.791.719
23	DITPOLAIRUD	22.491.583.000	22.582.076.000	22.490.007.479	99,59	92.068.521
24	DITSAMAPTA	21.746.525.000	32.045.743.000	31.856.900.359	99,41	188.842.641
25	BIDKEU	2.405.329.000	18.656.680.000	17.696.475.074	94,85	960.204.926
26	RES LAMTIM	87.680.367.000	95.889.411.000	95.889.331.410	100,00	79.590
27	RES METRO	56.723.784.000	57.512.448.000	57.512.374.623	100,00	73.377
28	RES LAMUT	70.360.642.000	73.024.830.000	73.024.543.826	100,00	286.174
29	RES LAMSEL	86.101.985.000	71.680.722.000	71.679.906.628	100,00	815.372
30	RES WAYKANAN	53.130.000.000	58.846.560.000	58.844.067.868	100,00	2.492.132
31	RES LAMTENG	85.304.374.000	83.979.959.000	83.959.082.268	99,98	20.876.732
32	RES PESAWARAN	44.944.551.000	46.012.032.000	45.989.808.458	99,95	22.223.542
33	RESTA BALAM	121.666.031.000	121.060.082.000	120.982.419.938	99,94	77.662.062
34	RES TUBA BARAT	36.175.846.000	36.760.359.000	36.728.133.865	99,91	32.225.135
35	RES LAMBAR	54.497.144.000	54.958.223.000	54.904.912.900	99,90	53.310.100
36	RES MESUJI	39.325.378.000	39.270.594.000	39.208.821.454	99,84	61.772.546
37	RES TANGGAMUS	53.852.215.000	53.161.288.000	52.975.180.335	99,65	186.107.665
38	RES TUBA	49.455.555.000	52.427.772.000	52.231.929.165	99,63	195.842.835
39	RES PRINGSEWU	51.809.286.000	52.509.887.000	52.311.261.690	99,62	198.625.310
40	RES PESIBAR	-	7.360.163.000	7.239.430.982	98,36	120.732.018
	JUMLAH TOTAL	1.352.158.376.000	1.446.114.789.000	1.443.629.925.883	99,83	2.484.863.117

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa selama TAB, total realisasi anggaran Satker jajaran Polda Lampung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 mencapai 99,83%. Sisa anggaran sebesar Rp. 2.484.863.117,- atau 0,17%, merupakan sisa belanja barang. Dari total Realisasi Anggaran pada 40 Satker jajaran Polda Lampung 99,83% tersebut, apabila dibandingkan dengan RPD Bulan Desember sebesar 100%, maka terdapat deviasi sebesar 0,17%, hal ini masih memenuhi untuk ditolerir, karena ambang batas deviasi RPD dan realisasi adalah sebesar 5% (+/-5%). Rata-rata realisasi anggaran di atas 98% terdapat pada 39 satker dan satu Satker di bawah 94,85% yaitu Bidkeu, karena terdapat anggaran belanja barang yang dapat diserap dengan ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam **Keputusan Kapolri No.: Kep/191/II/2023 tanggal 8 Februari 2023** perihal mekanisme penggunaan anggaran yang bersifat khusus, berdasarkan direktif Kepala Kepolisian Daerah. Sehingga anggaran tersebut dikembalikan ke negara.

Selanjutnya dalam upaya meningkatkan pengelolaan anggaran di lingkungan Polda Lampung pada tahun anggaran berikutnya, selain melakukan penguatan kapabilitas melalui petunjuk dan arahan, juga melakukan penguatan kapasitas dengan melakukan sosialisasi, asistensi supervisi, hal ini secara berkala dalam rangka percepatan realisasi anggaran, dengan penekanan sebagai berikut:

- a. Menetapkan pejabat perbendaharaan (PPK, PPSPM dan Bendahara) dan pejabat pengadaan barang dan jasa, serta menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP);
- b. Menyusun *disbursement plan* (rencana penyerapan) dari awal tahun anggaran secara sistematis berdasarkan *procurement plan* (rencana pengadaan barang dan jasa) dan kalender kegiatan sebagai dasar dalam pelaksanaan dan pengawasan realisasi penyerapan anggaran guna menghindari penumpukan;
- c. Memonitor kegiatan dan realisasi anggaran pada akhir tahun anggaran serta melakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan kalender kegiatan;
- d. Menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian antara kegiatan, KRO, RO, Komponen, Subkomponen dan detail kegiatan guna menghindari kekeliruan dalam pelaksanaannya, apabila terdapat ketidaksesuaian segera melakukan revisi RKA dan DIPA Satker T.A. 2024;
- e. Mengidentifikasi pelaksanaan kegiatan yang pengadaannya melalui proses lelang (tender), pengadaan/penunjukkan langsung atau swakelola sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f. Melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa mendasari pada alokasi anggaran sesuai dokumen RKA-K/L dan DIPA Petikan T.A. 2024 masing – masing satker;
- g. Khusus anggaran sumber RM agar menyelesaikan proses lelang dan penandatanganan pengadaan barang/jasa paling lambat bulan Februari 2024;
- h. Mengefektifkan peran pembina teknis pembangunan gedung negara dari Dinas PU dalam pelaksanaan pembangunan/renovasi gedung negara serta melibatkan pembina fungsi logistik dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- i. Segera menyelesaikan tagihan dengan tidak menunda proses pembayaran untuk pekerjaan yang telah selesai terminnya atau kegiatan yang telah selesai pelaksanaannya sesuai batas waktu penyelesaian tagihan dan melakukan pengawasan terhadap penyelesaian tagihan
- j. Segera menyelesaikan tagihan sesuai dengan progres pekerjaan (sesuai termin) dan melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan serta mengingatkan kepada pihak ke-2 yang terlambat mengajukan tagihan pembayaran sesuai jadwal yang tertuang dalam kontrak;
- k. Memberikan teguran kepada pihak kedua yang terlambat mengajukan tagihan pembayaran sesuai jadwal yang tertuang dalam kontrak;
- l. Berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat dalam rangka

- pelaksanaan anggaran sesuai RKA dan DIPA satker T.A. 2024;
- m. Berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mengatasi permasalahan pengadaan barang/jasa serta optimalisasi penggunaan e-procurement untuk pengadaan barang/jasa;
 - n. Satker yang alokasi anggarannya pada T.A. 2024 terdapat output cadangan atau diberi tanda bintang (diblokir), agar segera mengajukan revisi dengan melengkapi dokumen pendukung serta berkoordinasi dengan fungsi terkait;
 - o. Memedomani Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah disusun dan mengajukan SPM ke KPPN;
 - p. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - q. Pengelolaan anggaran wajib memedomani prinsip ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - r. Meningkatkan ketertiban penyampaian data supplier dan data kontrak termasuk addendum kontrak kepada KPPN;
 - s. Memedomani sasaran prioritas dalam Renstra, Renja serta target output dan outcome kinerja satker T.A. 2024 yang telah ditetapkan dalam RKA dan DIPA satker termasuk kegiatan prioritas Polri;
 - t. Menerapkan instrumen pencegahan penyimpangan (probity audit) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pendistribusian;
 - u. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, Kasatker selaku KPA wajib menggunakan produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 25%, dengan melampirkan surat pernyataan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
 - v. Satuan harga yang digunakan dalam RKA dan DIPA Satker T.A. 2024 merupakan alokasi anggaran sesuai dalam perencanaan, dan dalam pelaksanaannya tidak melampaui alokasi anggaran dalam RKA dan DIPA satker serta sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kasatker/KPA;
 - w. Lebih bijaksana dalam mengelola anggaran khusus berdasarkan direktif Kapolri/Kapolda melalui mekanisme hierarki anggaran dengan mengoptimalkan anggaran kegiatan rutin kepolisian atau Kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD), Dukops Polda/Satker serta anggaran operasi kewilayahan T.A. 2024;
 - x. Penanggungjawab Program agar melaksanakan monitoring, evaluasi, asistensi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana target kinerja secara berkala, sehingga penyerapan anggaran sesuai dengan RPD;
 - y. Pembina Fungsi Teknis agar melaksanakan monitoring, asistensi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan sesuai

dengan bidang masing – masing, guna menghasilkan output yang tepat, cepat dan berhasil guna;

- z. Kasatker selaku KPA agar mensosialisasikan direktif Kapolri kepada jajarannya, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaannya serta bertanggungjawab terhadap akibat hukum yang ditimbulkan.

D. Regulasi dan Kelembagaan.

- a. Bahwa dalam implementasi penguatan kelembagaan pada TAB telah berhasil mendapatkan persetujuan dari Kapolri melalui Kep Kapolri Nomor: Kep/1138/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang pembentukan Polres Pesisir Barat, yang selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2023 diresmikan oleh Kapolda Lampung;

Tabel 36. Penguatan kelembagaan TAB 2023.

NO.	SATUAN POLRES	POLSEK				JUMLAH			USULAN TUK DAN KAT			KAJIAN USULAN		DFADKF	KETERANGAN			
		TIPE A (POLSEK METRO)	TIPE B (POLSEK URBAN)	TIPE C (POLSEK RURAL)	TIPE D (POLSEK PRA RURAL)	JUMLAH	JUMLAH KEC.	% PEMENUHAN	POLSUB SEKTOR	SATPOL AIRUD	SATPAM OBVIT	TUK POLSUB SEKTOR HP I	TUK POLSEK (D) THP I	TUK POLSEK THP II		USUL KAT POLRES	TUK POLSEK THP III	TUK POLSUB SEKTOR THP II
1	POLRESTA BALAN (C)	-	8	1	2	11	20	50%	2	1	1	-	-	1	-	1	-	PROSES MABES
2	POLRES LAMSEL (D)	-	2	7	3	12	17	71%	1	1	-	1	-	-	1	-	-	PROSES KEMENPAN
3	POLRES TANGGAMUS (D)	-	-	7	3	10	20	50%	3	1	-	2	3	-	-	-	1	PROSES POLDA
4	POLRES PESAWARAN (D)	-	1	3	-	4	11	36%	2	1	-	-	1	-	-	-	-	
5	POLRES PRINGSEWU (D)	-	1	4	-	5	9	56%	4	-	-	-	1	1	-	1	-	
6	POLRES LAMTENG (D)	-	2	13	2	17	28	61%	1	-	-	3	-	-	-	1	-	
7	POLRES METRO (D)	-	-	5	-	5	5	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	POLRES LAMTIM (D)	-	2	20	2	24	24	100%	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
9	POLRES TUBA (D)	-	1	4	2	7	15	47%	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
10	POLRES MESUJI (D)	-	1	2	1	4	7	57%	2	-	-	1	1	-	-	-	-	
11	POLRES TUBABA (D)	-	1	3	-	4	9	44%	2	-	-	-	-	1	-	-	-	
12	POLRES LAMUT (D)	-	2	8	5	15	23	65%	7	-	-	-	-	2	-	1	-	
13	POLRES LAMBAR (D)	-	2	1	1	4	15	27%	1	-	-	-	1	-	-	-	3	
14	POLRES WAY KANAN (D)	-	2	8	2	12	15	80%	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
15	POLRES PESBAR (D)	-	1	3	-	4	11	36%	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH		-	26	89	23	138	229	60%	31	7	1	7	7	5	1	5	4	

- b. Untuk penguatan kelembagaan TAB 2023 adalah melakukan pemutahiran terhadap usulan pembentukan tujuh Polsubsektor pada TAB 2022 yang masih dalam proses kajian dari Mabes Polri, masing-masing satu usulan dari Polres Lampung Selatan dan Tanggamus, dua usulan dari Polres Mesuji dan tiga usulan dari Polres Lampung Tengah, sebagai mana Surat Kapolda Lampung Nomor: B/309/II/OTL.1.1.1./2022 tanggal 09 Februari 2022;
- c. Pemutahiran data penguatan kelembagaan lainnya adalah pembentukan Polsek, terdapat dua tahap usulan yang diusulkan Polda Lampung yang masih dalam proses kajian dari Mabes Polri, pertama terdapat tujuh usulan pembentukan Polsek yang berasal dari lima Polres yakni satu usulan masing-masing dari Polres Lampung Barat, Mesuji, Pesawaran dan Pringsewu, ditambah tiga usulan dari Polres Tanggamus. Sebagai mana Surat Kapolda Lampung Nomor: B/3071/XII/OTL.1.1.1./2021 tanggal 31 Desember 2021. Kemudian usulan kedua sebanyak lima usulan masing-masing satu usulan dari Polresta Bandar Lampung, Polres Tulang Bawang Barat dan Pringsewu. Selanjutnya dua usulan dari Polres Lampung Utara. Sebagai mana surat Kapolda Lampung Nomor: B/3015/XII/ OTL.1.1.1./2022 tanggal 13 Desember 2022;

- d. Demikian juga pemutahiran data terhadap usulan peningkatan tipologi sebelas Polsek (D) menjadi Polsek (C), masing-masing satu usulan dari Polres Way Kanan, dua usulan dari Polres Lampung Timur dan Tulang Bawang, sedangkan yang tiga usulan dari Polres Lampung Selatan dan Tanggamus. Sebagai mana Surat Kapolda Lampung Nomor: B/3022/XII/OTL.1.1.1./2021 tanggal 24 Desember 2021, masih dalam kajian Mabes Polri;
- e. Selama TAB 2023 telah melakukan studi kelayakan terhadap usulan peningkatan Polres Lampung Selatan (D) menjadi Polres tipe (C), studi kelayakan usulan pembentukan Polsek tipe (D) dari lima Polsubsektor yaitu; Polsubsektor Rajabasa Polresta Bandar Lampung, Polsubsektor Kota Gajah Polres Lampung Tengah, Polsubsektor Ambarawa Polres Pringsewu, Polsubsektor Bumi Agung Polres Way Kanan dan Polsubsektor Abung Pekurun Polres Lampung Utara; juga melakukan studi kelayakan pembentukan empat calon Polsubsektor yaitu di tiga di Polres Lampung Barat yaitu di wilayah Kecamatan Batubrak, Air Hitam dan Kecamatan Tebu serta di Polres Tanggamus pada Kecamatan Kelumbayan.
- f. Selanjutnya dalam penataan organisasi telah melakukan penataan nomenklatur Polsek yang disesuaikan dengan nama kecamatan, yaitu Polsek Kedaton Polresta Bandar Lampung menjadi Polsek labuan Ratu, Polsek Teluk Betung Selatan menjadi Polsek Bumi Waras, kemudian di Polres Pesisir Barat Polsek Bengkuntat menjadi Polsek Ngaras, di Polres Way Kanan Polsek Blambangan Umpu menjadi Polsek Umpu Semenguk;
- g. dalam rangka mengimplementasikan transformasi organisasi dengan merintis penyatuan data kinerja program lidik sidik guna memudahkan dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program anggaran lidik sidik tindak pidana, mulai dari tingkat Polsek, Polres sampai pada saker pembinaan dan penanggung jawab program lidik sidik di tingkat Polda dengan mengimplementasikan keberadaan Perpol 4 Tahun 2022 tentang Satu Data Polri. Dengan melibatkan Satker Bid TIK sebagai Wali Data tingkat Polda, kemudian terdapat satker sebagai sumber data dan pengguna data. Pada penyatuan data ini diawali dengan penandatanganan Pakta Integritas satu data program lidik sidik kemudian dilanjutkan dengan mekanisme pengumpulan data kinerja program lidik sidik setiap bulannya dalam pertemuan melalui daring yang dikelola Bid TIK bekerja sama dengan Rorena melalui aplikasi berbagi pakai *microsite* <https://s.id/REKAPKINERJALPG> yang terhubung dengan worksheet googlespreadsheet yang datanya bersumber dari aplikasi yang berbasis website yaitu aplikasi DORS dan e-MP;
- h. Dalam pelaksanaan tupoksi Polda Lampung sepanjang tahun 2023 telah terbit 659 Keputusan Kapolda Lampung terkait penguatan kapasitas dan kapabilitas organisasi Polda Lampung;
- i. Berlaku 35 Mou/perjanjian kerja sama antara Polda Lampung dengan *stakeholder* dalam penguatan dinamika operasional tupoksi.

E. Penghargaan dan apresiasi.

- a. Penghargaan dan apresiasi dari Gubernur Lampung No: G.350/IV.408/HK/2023 tanggal 26 Juni 2023 atas penanganan dan pengungkapan kasus yang menjadi atensi nasional, yakni mengagalkan pengiriman pekerja migran Indonesia yang akan dikirimkan ke negara Timur Tengah dari wilayah Provinsi Lampung.
- b. Penghargaan dan apresiasi dari Koordinator nasional TRC (tim reaksi cepat) perlindungan perempuan dan anak atas dedikasi penegakan hukum serta keberhasilan mengungkap perkara anak dan perdagangan orang selama 2023 di Wilayah Provinsi Lampung (14/9 2023).
- c. Penghargaan dan apresiasi dari Kepala Badan Karantina Indonesia atas dukungan dan partisipasi dalam pelaksanaan tugas perlindungan sumber daya alam hayati Tahun 2023 di wilayah Indonesia (17/10 2023).
- d. Penghargaan dari DPD Federasi Guru Independen Indonesia Provinsi Lampung Nomor: 001/A/FGII/XI/2023 atas perhatian pada dunia pendidikan dan respon cepat atas penanganan tawuran antar pelajar di wilayah provinsi Lampung.
- e. Penghargaan dari Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia Nomor : 0018/PP.PMI/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023, atas dukungan pelaksanaan kegiatan Jumbara PMR tingkat nasional IX tahun 2023 di Kalianda Lampung Selatan Provinsi Lampung dari tanggal 2-10 Juli 2023.
- f. Penghargaan dari Kepala BKKBN atas komitmen menggerakkan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana serta percepatan penurunan stunting untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera, (7/5 2023).

IV. Penutup

Laporan Kinerja Polda Lampung tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis, sebagai tahun ke-empat Renstra 2020-2024 dan perkembangan perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Pendukung. Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan hasil yang signifikan, meskipun masih ada agregat komponen penyusun indikator kinerja yang belum menunjukkan level kinerja yang memadai, tetapi masih dapat dilapisi dengan agregat komponen penyusun indikator kinerja yang level kinerja di atas memadai, sehingga pencapaian target dapat terpenuhi. Pada capaian kinerja Polda Lampung T.A. 2023 ini, terdapat beberapa indikator kinerja pendukung yang tidak mencapai target, tetapi secara keseluruhan tidak berpengaruh terhadap nilai pencapaian sasaran strategis, yang dicapai 107,11%. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis capaian kinerja Polda Lampung T.A. 2023 ini, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dan disarankan sebagai berikut:

1. Kesimpulan

- a. Secara umum Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Polda Lampung T.A. 2023 adalah sebesar 107,11%. Semua Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Resntra 2020-2024, capaiannya antara 98,18%-112,89%, sebagaimana rincian pada tabel berikut ini:

Tabel 37. Capaian Sasaran Strategis Polda Lampung, 2023.

Kode SS	Nama SS	NSS
SS <i>impack</i>	Keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.	107,97%
SS1	Harkamtibmas yang partisipatif	112,89%
SS2	Penegakan hukum yang berkeadilan.	103,45%
SS3	Sumber daya manusia yang profesional	98,18%
SS4	Modernisasi pelayanan kepolisian yang berkelanjutan.	106,62%
SS5	Manajemen pengawasan kepolisian yang akuntabel	110,88%

- b. Dari 14 (empat belas indikator kinerja baik indikator kinerja *impack*, indikator kinerja utama dan indikator kinerja pendukung), capaian antara 94%-120%, dengan perincian masing-masing target, realisasi dan capaian sebagai berikut:

Tabel 38. Capaian IKU dan IKP Polda Lampung, 2023.

No.	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi	Capaian
1.	IKU-0 Indeks keamanan dan ketertiban	3,400	3,67	107,97%
2.	IKU-1 Indeks pemeliharaan kamtibmas.	74,00	83,54	112,89%
3.	IKU-2 Indeks penegakan hukum.	69,00	71,38	103,45%
4.	IKP-3 Indeks profesionalitas personel.	73,00	71,67	98,18%
5.	IKP-4 Indeks dukungan sarpras dan peralatan.	70,00	81,97	117,11%
6.	IKP-5 Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik.	2,40	2,40	100,00%
7.	IKP-6 Nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan.	70,00	71,92	102,74%
8.	IKP-7 Indeks penguatan implementasi kebijakan.	74,00	87,95	118,85%
9.	IKP-8 Indeks Tatakelola Kepolisian.	5,40	5,58	103,33%
10.	IKP-9 Indeks kepuasan pelayanan kepolisian.	82,00	84,05	102,50%
11.	IKP-10 Persentase penanganan pengaduan masyarakat.	75,00%	100,00%	120,00%
12.	IKP-11 Persentase penyelesaian pelanggaran personel.	86,00%	95,75%	111,34%
13.	IKP-12 Persentase penyelesaian masalah hukum.	91,00%	100,00%	109,89%
14.	IKP-13 Nilai kinerja anggaran.	78,00	85,98	110,23%

- c. Bahwa ke-14 (empat belas) indikator kinerja Polda Lampung tersebut, target yang dapat dicapai sebanyak 13 (tiga belas) indikator kinerja dan satu indikator kinerja tidak tercapai, yakni indeks profesionalitas personel dengan capaian 98,18%.
- d. Faktor yang menyebabkan kegagalan capaian kinerja dari Indeks profesionalitas personel pada tahun 2023, yang tersusun atas kinerja komposit bersama lima komponen kinerja pendukungnya, yang salah satunya adalah mengenai alokasi jumlah peserta pelatihan dan pendidikan pengembangan spesialis di SPN Polda Lampung yang tidak

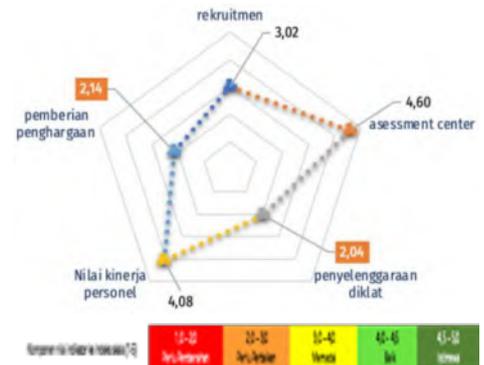


Gambar 67. Perkembangan alokasi peserta pelatihan dan dikbangspes dalam empat tahun terakhir.

mengalami kenaikan, karena berhubungan dengan alokasi anggarannya tidak mengalami kenaikan, adapun langkah yang sudah dilakukan sebelumnya adalah dengan menurunkan target pada Resntra 2020-2024 (perubahan). Kondisi ini dapat dilihat pada empat tahun terakhir, yang tidak mengalami kenaikan, sementara itu upaya SPN untuk menambah anggaran pelatihan dan dikbangspes belum membuahkan hasil, demikian juga

kontruksi kebutuhan anggaran pelatihan dan dikbangspes dari sumber lain pun (hibah), belum dapat dipenuhi. Selanjutnya **upaya untuk meningkatkan kinerja indeks profesionalitas personel, maka untuk komponen penyelenggaraan diklat pada tahun berikutnya Polda Lampung tetap optimis melakukan pemetaaan kebutuhan dan mengusulkan penambahan alokasi peserta pelatihan dan dikbangspes ke Mabes Polri, demikian juga melalui fungsi Rorena mengusulkan penambahan anggaran, ataupun SPN berinisiatif membuat terobosan dengan membuat usulan tambahan anggaran pelatihan melalui sumber pembiayaan lainnya, yang sebelumnya dilengkapi dengan menyusun analisa kebutuhan pelatihan fungsi kepolisian prioritas berdasarkan masukan dari satker dan Polres jajaran, dengan mempertimbangkan capaian target kinerja pada tahun yang akan datang.**

Gambar 68. Komponen kinerja indeks profesionalitas personel,



- e. Selanjutnya komponen penyusun indikator kinerja pendukung indeks profesionalitas personel yang lainnya adalah berupaya untuk memberikan **atensi terhadap menurunnya pemberian penghargaan bagi personel yang berprestasi, melalui upaya para kasatker secara konsisten dan**

berkesinambungan selalu memberikan dorongan kepada personel melalui komitmen membangun kerja sama, soliditas dan menjalin hubungan yang harmonis dalam rangka merangsang personel untuk berprestasi. Karena konsepsi dalam pemberian penghargaan adalah merupakan bentuk stimulan pemimpin kepada personel, agar bekerja dengan lebih baik, semangat, berdedikasi dan terpeliharanya loyalitas serta kecintaan terhadap pekerjaan yang digeluti.

- f. Selanjutnya menyangkut mekanisme pencapaian kinerja satuan kerja di lingkungan Polda Lampung, akan selalu dilakukan monitoring dan evaluasi sehingga memacu dalam pencapaian target kinerja, melalui upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas organisasi dengan kegiatan asistensi, sosialisasi, bimbingan teknis, rapat teknis, koordinasi, konsolidasi, sinkronisasi dan harmonisasi proses bisnis organisasi dan hubungan tata cara kerja baik pada satker, subsatker maupun hubungan personal antar personel, sehingga terjalin *networking* dan *framework* yang satu pemahaman dalam mencapai visi dan misi Polda Lampung, dengan merealisasikan program, kebijakan dan strategi menjadi kegiatan Satker. Mendorong setiap satker pelaksana program untuk memahami dan mengaktualisasikan tugas, fungsi dan peran dalam organisasi, sehingga setiap tahun anggaran target indikator kinerja dapat dicapai secara optimal.

2. Saran

- a. Berdasarkan hasil capaian kinerja Polda Lampung tahun 2023 ini, terhadap realisasi kinerja dari komponen penyusun indikator kinerja utama maupun indikator kinerja pendukung, yang performa kinerjanya mengalami polarisasi meningkat (*maximize*) maupun menurun (*minimize*), perlu melakukan langkah kreatif untuk selalu waspada, perkuat jalinan kerja sama, lakukan koordinasi dan konsolidasi, sinkronisasi, revitalisasi organisasi dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas organisasi pada satuan kerja masing-masing. mengingat perkembangan lingkungan strategis yang terus berkembang sehingga diperlukan langkah dan upaya untuk meraih legitimasi sosial dan legitimasi hukum dalam setiap pelaksanaan tugas.
- b. Berdasarkan hasil kinerja tahun ke-empat Renstra 2020-2024 ini, Polda Lampung harus berupaya mempertajam implementasi dari visi-misi dan tujuan organisasi Polri, yang secara umum berupaya melaksanakan tupoksi sesuai dengan amanat undang-undang Kepolisian, di samping itu tetap konsisten berupaya meraih legitimasi sosial dan legitimasi hukum yang didukung kepercayaan masyarakat. Secara khusus berupaya menjadi kebanggaan masyarakat provinsi Lampung, dengan lebih fokus pada percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilandasi gerakan revolusi mental, melalui kebijakan internal, bahwa semua personel Polda Lampung dalam melaksanakan tugasnya mampu memerankan fungsi kepolisian dengan mengembangkan arahan dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit

Prabowo, S.IK., M.Si transformasi menuju Polri yang presisi (prediktif, responsibilitas dan transparan berkeadilan).

- c. Selanjutnya dalam mengimplementasikan agenda transformasi menuju Polri yang Presisi, Polda Lampung telah, sedang dan akan mengimplementasikannya sesuai dengan petunjuk dan arahan serta tanggung jawab kewenangan lokalitas kewilayahan, dengan dilandasi semangat kerja sama antar satuan fungsi internal Polda Lampung dan pembina fungsi pada satuan kerja di Mabes Polri.
- d. Khusus dalam teknis terhadap pemantauan capaian kinerja, Polda Lampung beserta seluruh satuan kerja secara berkelanjutan, setiap triwulan melaksanakan kegiatan diseminasi capaian kinerja, guna mengetahui dan mengevaluasi dari realisasi dan capaian target kinerja tahun anggaran berjalan. Di samping itu meningkatkan jalur koordinasi dan konsolidasi dalam mengimplementasikan kebijakan Polri sebagai fokus bersama dari semua satuan kerja di Polda Lampung, berkomitmen melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Polda Lampung T.A. 2023 disusun, kiranya dapat digunakan Pimpinan Polri sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya, serta bagi para Kasatker agar dapat digunakan sebagai bahan introspeksi untuk menjalankan Rencana Strategis 2020-2024, khususnya dalam menjalankan Rencana Kerja T.A. 2024.

Lampung Selatan, 20 Februari 2024

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG



LAMPIRAN-LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA
POLDA LAMPUNG T.A. 2023**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. AKHMAD WIYAGUS, S.I.K., M.Si., M.M.
Pangkat : INSPEKTUR JENDERAL POLISI
Jabatan : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.
Pangkat : JENDERAL POLISI
Jabatan : KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua:

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

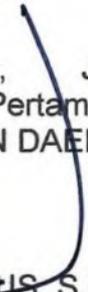
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.
JENDERAL POLISI

Lampung Selatan, Januari 2023
Pihak Pertama
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG



Dr. AKHMAD WIYAGUS, S.I.K., M.Si., M.M.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
 KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
0.	Keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.	Indeks keamanan dan ketertiban masyarakat.	3,4
1.	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang partisipatif.	Indeks pemeliharaan kamtibmas.	73
2.	Penegakan hukum yang berkeadilan.	Indeks penegakan hukum.	69
3.	Sumber daya manusia yang profesional.	Indeks profesionalitas SDM.	73
4.	Modernisasi pelayanan kepolisian yang berkelanjutan.	a. Indeks dukungan sarpras dan peralatan.	70
		b. Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik.	2,4
		c. Nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan.	70
5.	Manajemen pengawasan Kepolisian yang akuntabel.	a. Indeks penguatan implementasi kebijakan.	74
		b. Indeks tatakelola Kepolisian.	5,4
		c. Indeks kepuasan layanan Kepolisian.	82
		d. Persentase penanganan pengaduan masyarakat.	75%
		e. Persentase penyelesaian pelanggaran personel.	86%
		f. Persentase penyelesaian masalah hukum.	91%

g. Nilai

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		g. Nilai kinerja anggaran.	78

Program

1. Profesionalisme SDM Polri
2. Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
3. Modernisasi Alamatsus dan Sarana Prasarana Polri
4. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
5. Dukungan Manajemen

Anggaran

- Rp. 37.952.732.000,-
Rp. 107.569.907.000,-
Rp. 163.938.127.000,-
Rp. 341.190.986.000,-
Rp. 701.506.624.000,-

Keterangan

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Drs. LISTYO SIGHT PRABOWO, M.Si.
JENDERAL POLISI

Lampung Selatan, Januari 2023

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG


Dr. AKHMAD WIYAGUS, S.I.K., M.Si., M.M.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Kep Kapolda Lampung Nomor :
Kep/145/II/2023 tanggal 15 Februari 2023
Perihal Penetapan IKU Polda Lampung
Tahun 2020-2024



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
Nomor : Kep / 145 /II/2023

tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG (PERUBAHAN)

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

- Menimbang : bahwa dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Kapolri Nomor 18 tahun 2012 tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Polri, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Daerah;
3. Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
4. surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/360/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005, tentang Grand Strategis Polri 2005 – 2025;
5. Keputusan Kapolri Nomor: Kep/1132/V/2020, tanggal 29 Mei 2020 tentang Rencana Strategis Polri Tahun 2020-2024.
- Memperhatikan: Surat Perintah Kapolda Lampung Nomor : Sprin/1095/VI/ HUK.6.6./2019 tanggal, 21 Juni 2019 susunan tim kerja penyusunan Renja Polda Lampung Tahun 2020 dan Renstra Polda Lampung Tahun 2020-2024 dan penyusunan IKU Polda Lampung Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG.

1. penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Polda Lampung tahun 2020-2024 (Perubahan), merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra Polda Lampung tahun 2020-2024 (Perubahan);
2. indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kepolisian Daerah Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing satuan kerja untuk menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis, Rencana Kerja dan anggaran, Penetapan Kinerja dan Laporan Capaian Kinerja Polda Lampung, sebagaimana amanat dari Keputusan Kapolda Lampung Nomor: Kep/699/XII/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Polda Lampung;
3. dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/467/VI/2020 tanggal 30 Juni 2012, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kepolisian Daerah Lampung, dinyatakan tidak berlaku lagi; dan
4. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Lampung Selatan
pada tanggal: 15 Februari 2023

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG



Dr. AKHMAD WIYAGUS, S.I.K., M.Si., M.M.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Kepada Yth :

Distribusi A, B dan C Polda Lampung.

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

1. Nama Unit Organisasi / Satker : Kepolisian Daerah Lampung
2. Tugas : melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat; dan melaksanakan tugas – tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan intelijen teknologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas, maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polda dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri;
 - c. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi, laboratorium forensik lapangan, pembinaan dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pengawasan proses penyidikan;
 - d. pelaksanaan sabhara kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek khusus yang meliputi *Very Very Important Person* (VVIP), *Very Important Person* (VIP), tempat pariwisata dan objek vital khusus lainnya;
 - e. pelaksanaan

- e. pelaksanaan lalu lintas kepolisian, yang meliputi kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (turjawali) lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta Registrasi dan Identifikasi (regident) pengemudi dan kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas);
- f. pelaksanaan kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan/*Search and Rescue* (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan;
- g. pembinaan masyarakat, yang meliputi Perpolisian Masyarakat (Polmas), pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban, terjalinnya hubungan Polri dengan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian, serta pembinaan teknis dan pengawasan kepolisian khusus termasuk satuan pengamanan; dan
- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR

INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENSTRA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG TAHUN 2020 – 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	SATKER PENGEMBAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
0.	Keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.	Indeks keamanan dan ketertiban masyarakat	Seluruh program anggaran yang menjadi tanggung jawab Polda Lampung	Seluruh kegiatan Polda Lampung yang berdampak pada situasi keamanan dan ketertiban di daerah hukum	Seluruh Satker di Polda Lampung
1.	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang partisipatif.	Indeks pemeliharaan kamtibmas.	04-Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	3133-Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lintas 5076-Pembinaan Potensi Keamanan 3130-Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara 3134-Penyelenggaraan Kepolisian Perairan	Ditlantas dan Polres Ditbinmas dan Polres Ditsamapta dan Polres Roops dan Satker pelaksana operasi kepolisian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	SATKER PENGEMBAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
				3131-Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital	Ditpamobvit dan Polres
				5087-Penanggulangan Keamanan Dalam Negeri	Satbrimob
				3114- Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik	- Ditintelkam dan Polres
				3115-Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi	- Ditintelkam dan Polres
				3116-Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya	- Ditintelkam dan Polres
				3117-Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang	- Ditintelkam dan Polres

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	SATKER PENGEMBAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
				Keamanan Negara	
				3112-Analisis Keamanan	- Ditintelkam dan Polres
				3120-Kerjasama Keamanan dan Ketertiban K/L	- Roops dan Polres
2.	Penegakan hukum yang berkeadilan.	Indeks penegakan hukum.	05-Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	3137-Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	- Ditreskrimum, Ditreskrimsus, Ditresnarkoba dan Polres
				3140-Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	- Ditreskrimum, Ditreskrimsus, Ditresnarkoba dan Polres
				3142-Penindakan Tindak Pidana Umum	- Ditreskrimum, Ditlantasi, Ditpolairud dan Polres
				3143-Penindakan Tindak Pidana Terorisme	- Ditreskrimum, dan Polres

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	SATKER PENGEMBAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
				3144-Penindakan Tindak Pidana Narkoba	- Ditresnarkoba dan Polres
				3145-Penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus	- Ditreskrimsus, dan Polres
				3146-Penindakan Tindak Pidana Korupsi	- Ditreskrimsus, dan Polres
				5082-Pembinaan Operasional Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	- Ditreskrimum, Ditreskrimsus, Ditresnarkoba dan Polres
				5083-Penindakan Tindak Pidana Tertentu	- Ditreskrimsus, dan Polres
				5086-Pengawasan Penyidikan	- Ditreskrimum, Ditreskrimsus, Ditresnarkoba dan Polres
				3151-Penindakan Tindak Pidana siber	- Ditreskrimsus, dan Polres

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	SATKER PENGEMBAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
3.	Sumber daya manusia yang profesional.	Indeks profesionalitas personel.	03-Program Profesionalisme SDM Polri	3107-Pengendalian Pegawai Polri	- Ro SDM
				3108-Pembinaan Karier Personel Polri	- Ro SDM
				3105-Peyelenggaraan Administrasi Perawatan Pegawai Polri	- Ro SDM
				3110-Pelayanan Psikologi Anggota Polri	- Ro SDM
				3100-Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri	- SPN
				5069-Pembinaan Pendidikan dan Latihan Polri	- SPN
4.	Modernisasi pelayanan kepolisian yang berkelanjutan.	a. indeks dukungan sarpras dan peralatan.	02-Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	5062-Pengembangan Fasilitas dan Kontruksi Polri	- Rolog dan Polres
				3084-Pengembangan Peralatan Polri	- Rolog dan satker

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	SATKER PENGEMBAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
		b. Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).	01-Program Dukungan Manajemen	3071-Penyelenggaraan Teknologi Informasi	- Bid TIK dan satker
				5052-Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Polri	- Rorena dan Rorena
		c. Nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan.	01-Program Dukungan Manajemen	3070-Penerangan Masyarakat	- Bidhumas
				5056-Pengelola Informasi Dan Dokumentasi	- Bidhumas
5.	Manajemen pengawasan kepolisian yang akuntabel	a. Indeks penguatan implementasi kebijakan.	01-Program Dukungan Manajemen	5051-Penyusunan Kebijakan Polri	- Rorena dan satker pembina fungsi kepolisian terkait
				b. Indeks Tatakelola Kepolisian (ITK).	01-Program Dukungan Manajemen
		3088-Pertanggung jawaban Profesi	- Bidpropam dan Polres		
		3090-Penegakan Tata tertib dan Disiplin Polri	- Bidpropam dan Polres		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	SATKER PENGEMBAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
				3091-Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan	- Itwasda dan Polres
			02-Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	5062-Pengembangan Fasilitas dan Kontruksi Polri	- Rolog dan Polres
				5059-Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras	- Rolog dan Polres
			03-Program Profesionalisme SDM Polri	3105-Peyelenggaraan Administrasi Perawatan Pegawai Polri	- Ro SDM dan Polres
				3108-Pembinaan Karier Personel Polri	- Ro SDM dan Polres
			04-Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	0002 Dukungan Manajemen Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat.	- Ditintelkam, Ditbinmas, Dilantas, Ditsamapta dan Polres
				5080-Pengendalian Operasi Kepolisian	- Roops

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	SATKER PENGEMBAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
			05-Program Penyidikan Tindak Pidana	3137-Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	- Pembina fungsi Reskrim dan Polres
		c. Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian.	01-Program Dukungan Manajemen	5053-Reformasi Birokrasi Polri	- Rorena dan Polres
			04-Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	5051-Penyusunan Kebijakan Polri	- Rorena dan Polres
			01-Program Dukungan Manajemen	3072-Pelayanan Kesehatan Polri	- Rumkit bhayangkara
			04-Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	5080-Pengendalian Operasi Kepolisian	- SPKT dan Polres
				0002 Dukungan Manajemen Pemeliharaan Keamanan Dan	- Dintelkam, Ditlintas, Ditreskrim, Ditreskrimsus

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	SATKER PENGEMBAN PROGRAM			
1	2	3	4	5	6			
				Ketertiban Masyarakat	dan Diresnarkoba			
				03-Program Profesionalisme SDM Polri	3107-Pengendalian Pegawai Polri	- Ro SDM		
			d. Persentase penanganan pengaduan masyarakat.	01-Program Dukungan Manajemen	3091-Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan	- Itwasda dan Polres		
					01-Program Dukungan Manajemen	3090-Penegakan Tata tertib dan Disiplin Polri	- Bidpropam dan Polres	
						3088-Pertanggung jawaban Profesi	- Bidpropam dan Polres	
						3089-Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri	- Bidpropam dan Polres	
					f. Persentase penyelesaian masalah hukum	01-Program Dukungan Manajemen	3154-Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum	- Bidkum dan Polres
							3155-Penyusunan dan Penyuluhan Hukum	- Bidkum dan Polres

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	SATKER PENGEMBAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
		g. Nilai kinerja anggaran.	01-Program Dukungan Manajemen	5054-Manajemen Anggaran	- Rorena

Ditetapkan di: Lampung Selatan
 pada tanggal: 15 Februari 2023
 KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

Dr. AKHMAD WIYAGUS, S.I.K., M.Si., M.M.
 INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Penghargaan dan dukungan kepada
Polda Lampung T.A. 2023

DAFTAR PENGHARGAAN KAPOLDA LAMPUNG IRJEN POL HELMY SANTIKA, S.H.,S.I.K.,M.Si.

NO	URAIAN SINGKAT PENGHARGAAN	PEJABAT PEMBERI PENGHARGAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	<p>PIAGAM PENGHARGAAN DARI DEWAN PIMPINAN DAERAH FEDERASI GURU INDEPENDEN INDONESIA (FGII) KEPADA KAPOLDA LAMPUNG IRJEN POL HELMY SANTIKA, S.H., S.I.K., M.Si. ATAS PERHATIAN YANG DIBERIKAN TERHADAP DUNIA PENDIDIKAN DAN RESPONS CEPAT DALAM MENYELESAIKAN KASUS TAWURAN ANTAR PELAJAR DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG.</p>	<p>Ketua Dewan Pimpinan Daerah FGII (ANTON KURNIAWAN, S.Pd.,M.M.)</p>	<p>NOVEMBER 2023</p>
2.	<p>PIAGAM PENGHARGAAN DARI BADAN KARANTINA INDONESIA KEPADA IRJEN POL HELMY SANTIKA, S.H., S.I.K., M.Si. ATAS PARTISIPASI DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KARANTINA INDONESIA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN SDA HAYATI DIWALAYAH NKRI.</p>	<p>Kepala Badan Karantina Indonesia (SAHAT M. PANGGABEAN)</p>	<p>17 OKTOBER 2023</p>
3.	<p>PIAGAM PENGHARGAAN DARI GUBERNUR LAMPUNG KEPADA IRJEN POL HELMY SANTIKA, S.H., S.I.K., M.Si. ATAS JASANYA MENGUNGKAP DAN MENGGAGALKAN PENGIRIMAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG AKAN DIKIRIM KE NEGARA TIMUR TENGAH, DIMANA KASUS TERSEBUT MENJADI ATENSI PUBLIK TINGKAT NASIONAL DAN PIMPINAN DI WILAYAH LAMPUNG.</p>	<p>Gubernur Lampung (ARINAL DJUNAIDI)</p>	<p>27 JUNI 2023</p>
4.	<p>PIAGAM PENGHARGAAN DARI BKKBN KEPADA IRJEN POL HELMY SANTIKA, S.H., S.I.K., M.Si. ATAS PRESTASI DAN KOMITMEN DALAM MENGERAKKAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA KECIL BAHAGIA SEJAHTERA.</p>	<p>Kepala BKKBN (Dr. (H.C.) dr. HASTO WARDOYO, Sp.OG(K)</p>	<p>7 MEI 2023</p>

NO	URAIAN SINGKAT PENGHARGAAN	PEJABAT PEMBERI PENGHARGAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
5.	<p>PIAGAM PENGHARGAAN DARI PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KEPADA IRJEN POL HELMY SANTIKA, S.H., S.I.K., M.Si. ATAS DUKUNGANNYA DALAM KEGIATAN JUMBARA PMR TINGKAT NASIONAL IX TAHUN 2023 DI KALIANDA, LAMPUNG SELATAN-PROVINSI LAMPUNG.</p>	Ketua Umum PMI (M. SUYUF KALLA)	10 JULI 2023
6.	<p>PIAGAM PENGHARGAAN DARI TIM REAKSI CEPAT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPADA IRJEN POL HELMY SANTIKA, S.H., S.I.K., M.Si. ATAS DEDIKASINYA PENEKAKAN HUKUM SERTA BERHASIL UNGKAP PERKARA ANAK TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.</p>	Koordinator Nasional TRC Perlindungan perempuan dan anak (JENY CLAUDYA LUMOWA)	14 SEPTEMBER 2023
7.	<p>PIAGAM PENGHARGAAN DARI BEM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG KEPADA IRJEN POL HELMY SANTIKA, S.H., S.I.K., M.Si. SEBAGAI MEMATERI SEMINAR FOFESI.</p>	DEKAN FH UNILA (Dr. M. FAKIH, S.H.,M.S.)	10 OKTOBER 2023



DEWAN PIMPINAN DAERAH
FEDERASI GURU INDEPENDEN INDONESIA (FGII)
PROVINSI LAMPUNG



PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: 001/A/FGII/DPD/XI/2023

Diberikan Kepada

Kapolda Lampung
Irjen Pol. Helmy Santika, S.H., SIK., M.Si.

Atas Perhatian yang diberikan terhadap Dunia Pendidikan
Dan Respons Cepat dalam Menyelesaikan Kasus Tawuran Antar Pelajar di Wilayah Provinsi Lampung

DEWAN PIMPINAN DAERAH
FEDERASI GURU INDEPENDEN INDONESIA (FGII)



Ketua

Anton Kurniawan, S.Pd., M.M.

Sekretaris

Jully Andriyanto, M.Pd.



PIAGAM PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA

Irjen. Pol. Helmy Santika, S.H., S.I.K., M.Si

KEPALA POLISI DAERAH (KAPOLDA) LAMPUNG

Atas Partisipasinya Dalam Mendukung
Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi **BADAN KARANTINA INDONESIA**
Dalam Upaya Perlindungan Sumber Daya Alam Hayati Di Wilayah
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Lampung, 17 Oktober 2023

Sahat M. Panggabean

Kepala Badan Karantina Indonesia



Piagam Penghargaan

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung
Nomor : G 50 /VI.08/HK/2023 Tanggal 26 Juni 2023 Tentang
Pemberian Penghargaan Kepada Personil Direktorat
Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Lampung,
Memberikan Penghargaan .

KEPADA :

IRJEN POL HELMY SANTIKA, S.H.,S.I.K,M.Si

JABATAN

KAPOLDA LAMPUNG

Atas Jasanya Pengungkapan dan Menggagalkan Pengiriman
Pekerja Migran Indonesia yang akan dikirim ke Negara Timur
Tengah, dimana kasus tersebut menjadi Atensi Publik Tingkat
Nasional dan Pimpinan di Wilayah Lampung.

Semoga Pengabdianya dicatat sebagai amal ibadah
oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Bandar Lampung, 27 Juni 2023


GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAI DI



Piagam Penghargaan

**KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

Diberikan kepada :

Nama : Irjen Pol. Helmy Santika, SH, SIK, M.Si.
Jabatan : Kepala Kepolisian Daerah Lampung

Penghargaan atas prestasi dan komitmen dalam menggerakkan
Program Pembangunan keluarga, Kependudukan dan
Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan Stunting
untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera

Jakarta, 7 Mei 2023

**KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG(K)



Palang
Merah
Indonesia

PENGHARGAAN

No : 0018/PP.PMI/VII/2023

Diberikan kepada :

KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

Atas dukungannya dalam kegiatan
JUMBARA PMR Tingkat Nasional IX Tahun 2023
di Kalianda, Lampung Selatan-Provinsi Lampung
pada tanggal 2-10 Juli 2023.

Jakarta, 10 Juli 2023

Pengurus Pusat
PALANG MERAH INDONESIA
Ketua Umum,




M. Jusuf Kalla



TIM REAKSI CEPAT

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Memberi :

PENGHARGAAN

Kepada

KAPOLDA LAMPUNG

IRJEN. POL. HELMY SANTIKA, S.H., S.I.K., M.Si.

ATAS DEDIKASINYA PENEGAKAN HUKUM
SERTA BERHASIL UNGKAP PERKARA ANAK DAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Jakarta, 14 September 2023
KOORDINATOR NASIONAL TRC
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Jeny Claudya Lumowa
(Naumi)





BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

SERTIFIKAT

02.04/PANPEL-BEM/FH/UL/X/2023

Diberikan kepada

IRJEN POL HELMY SANTIKA S.H.S.I.K.M.SI.

Sebagai

PEMATERI

SEMINAR PROFESI

Bandar Lampung, 10 Oktober 2023

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
Dekan FH UNILA

Ridho Saputra Barlian
Gubernur BEM FH



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG

📍 Jl. Terusan Ryacudu Jati Agung 35365

✉ birorenalampung@gmail.com

📷 @rorenapoldalampung